



PROSIDING

**SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG**

Nilai-Nilai Kearifan Lokal
dalam Pembangunan Hukum Nasional
yang Responsif dan Progresif



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPER*
FAKULTAS HUKUM
2024

*Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Hukum Nasional
yang Responsif dan Progresif*

Semarang, 10 Juli 2024



**JUDUL : PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FH USM 2024
Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan Hukum Nasional yang
Responsif dan Progresif**

Steering Commitee

Dekan FH USM : Dr. Amri Panahatan Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.
Wakil Dekan FH USM : Dhian Indah Astanti, S.H., M.H.

Organizing Committee

Ketua Panitia : B. Rini Heryanti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H.
Bendahara : Dr. Endah Pudjiatuti, S.H., M.H.
Sie Acara : Dr. Sukimin, S.H., M.H.
Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.
Sie Publikasi : Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H.
Sie Naskah : Dr. Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.
Dr. Agus Saiful Abib, S.H., M.H.
Stefani Dewi Rosaria, M. Hum.
Sie Perlengkapan : Dr. Supriyadi, S.H., M.Kn.
Sie Konsumsi : Dharu Triasih, S.H., M.H.
Sie Dokumentasi : Dynna Arienta Octavia, S. Psi., M. Psi
IT : Saifurrohman, S. Kom.
Kesekretariatan : Amru Sulistyowati, S.E.
Nur Hidayah, S.TP

Reviewer

Dr. Tri Mulyani, S.Pd., S.H., M.H.
Dr. Agus Saiful Abib, S.H., M.H.
Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H.
Dr. Sukimin, S.H., M.H.
Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Editor/Penyunting

Dr. Dian Septiandani, S.H., M.H.
Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H.

Diorganisir Oleh:

Fakultas Hukum
Universitas Semarang

Diterbitkan oleh:

Universitas Semarang Press (USM Press), Anggota IKAPI
Jl. Soekarno-Hatta Pedurungan Semarang 50196 Indonesia
Telp: 024-6702757, Fax: 024-6702272
e-mail: usmpress@usm.ac.id
http://www.usmpress.usm.ac.id
xi + 123 hlm., 15,5 × 23 cm
ISBN: 978-623-7986-78-2

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya kegiatan Seminar dan *Call For Paper* Fakultas Hukum 2024, Universitas Semarang, pada tanggal 10 Juli 2024.

Prosiding ini merupakan luaran dari kegiatan *Call for Paper*. Penyusunannya melibatkan peranan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, komitmen, tenaga, dan waktu yang tercurah atas penyelesaian prosiding ini. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Semarang
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang
3. Dekan Fakultas Hukum kampus *co-host*
4. Panitia Seminar dan *Call For Paper* FH USM 2024
5. Seluruh partisipan

Akhir kata, kami sadari bahwa penyusunan prosiding abstrak ini masih ada kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan atas kekurangan dan keterbatasan tersebut sehingga dapat kami gunakan untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

Semarang, 11 Juli 2024
Ketua Panitia

B. Rini Heryanti, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RUNDOWN ACARA	xi
KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA - Ani Triwati, A. Heru Nuswanto, Kadi Sukarna	1
IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM KERJASAMA PROGRAMRENDAH KARBON - Helen Intania Surayda, Dedi Suwandi	2
DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PERWUJUDAN PENGEMBANGAN HUKUM ZAKAT YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT - Riska Azizatul Ula, Dian Septiandani, Agus Saiful Abib	3
REKONSTRUKSI HUKUM ATAS PERATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA - Dian Septiandani, Soegianto, Yudhitiya Dyah Sukmadewi.....	4
PENGAKUAN NILAI KEARIFAN LOKAL PADA KEBIASAAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF - Imelda Nuthasari Gunawan, Lukman Hakim, Dikcky Feri Nugroho,Wafda Vivid Izziyana	5
ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIVE PADA PRAKTIK EKSTRADISI - Aziyza Qurrotu A'yun Sul-tonu Mas'ad, Yunna Hidayatullah Majid, Supriyadi, Subaidah Ratna Juita	6
EFEKTIVITAS SANKSI DEPORTASI TERHADAP OVERSTAY WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU KEARIFAN LOKAL - Aurora Fatya Jenar, Rangga Aditya, Wafda Vivid Izziyana.....	7
PENYELESAIAN EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA DI SINGAPURA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Dian Pratiwi, Ailsa Calista F., Supriyadi, Subaidah Ratna Juita	8
PERJANJIAN EKSTRADIKSI INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF - Muhamad Naufal Syutan F., atrio Wicaksono Bagus N., Nanik Rahmayani, Renggayani Carmelia P., Subaidah Ratna Juita.....	9
PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL - Atik Kusmawati, Ninda Prasetya, Wafda Vivid Izziyana.....	10
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Thalenta Nadhya, Alvina Rachawati, Supriyadi, Dharu Triasih	11
DISTORSI IZIN KEIMIGRASIAN DALAM PRAKTIK PROSTITUSI PADA WARGA NEGARA ASING CHINA DI INDONESIA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Putri Ayu Anggorowati, Nurul Sya'baniyah, Mujiburahman, Risma, Tri Mulyani.....	12
IMPLEMENTASI PRINSIP KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL - Nova Yuliani, Raka Wahyu Ananda, Khalifah Ayu Oktaviana, Putri Khoirunisa, Supriyadi	13
PELAKSANAAN EKSTRADISI DI KOREA SELATAN PERSPEKTIF ASAS KEARIFAN LOKAL - Farah Nisrina Labibah, Oei Rachel Chintya S., Stevanus Gavin Herdyan, Subaidah Ratna Juita	14

PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN SINGAPURA PADA KASUS KORUPSI PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL – Hilyatul Aulia Rahayu, Vania Zulfa Arsa A., Zaenal Arifin.....	15
NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF PADA PERMASALAHAN EKSTRADISI – Prananindya Kristian Lukita, Rangga Adiguna, Nanang Arizal Pratama, Rafly Maulana, Subaidah Ratna Juita	16
SEJARAH DAN IMPLIKASI DEPORTASI PADA MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL – Dewi Malynda, Tarisa Anjar Putri, Nabila Rastiana, Ivana Malida Malfa Lena, Wafda Vivid Izziyana, Yusuf Adam Hilman.....	18
DEPORTASI WARGA NEGARA INDONESIA DI JERMAN BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL - Akarel Satrya Pratama, Raden Odityo Valen Aprian Jaya, Rifky Aziz Nur Rosafa, Manggala Abiyu Indra Daniswara, Wafda Vivid Izziyana	19
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSEDUR EKTRADISI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL – Nur Irhas Zen, M. Adam Firman, Subaidah Ratna Juita, Sukimin	20
PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF PADA PERMASALAHAN PROSTITUSI PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL – Putri Asya Ramadhita, Wafda Vivid Izziyana, Subaidah Ratna Juita	21
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN MEMPERHATIKAN HUKUM NASIONAL – Rista Ika Puspitasari, Thifani Alfita Rahmania, Handika Fitrah Tyasmara, Subaidah Ratna Juita, Sukimin	22
TRANSFORMASI HUKUM PERDATA MENUJU KEADILAN PROGRESIF PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL – Ade reza Aulia, Putri Amelia Safina, Renandiny Oktrizal N., Supriyadi, Dharu Triasih..	23
PERANAN RUMAH <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF – Ridzky Wahyu Nugroho, Hesti Nur Khotimah, Asri Damayanti	24
IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL PADA HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF – Adelia Putri Riyanto, Muchamad Adi Prasetyo, A. Heru Nuswanto	25
IMUNITAS DIPLOMATIK DALAM IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL – Muhammad A’an Burhana, Dito Firmansyah, Sukimin	26
PERAN DUTA BESAR DAN MISI DIPLOMATIK PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL – Amirra Syafira, Naila Putri Amanda	27
PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES NEGOSIASI DAN PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL – Arya Viptri P., Supriyadi, Dharu Triasih	28
PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM RATIFIKASI, IMPLEMENTASI DAN PENGHENTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL – Dian Puspita Wahyu N.T., Nela Rosita Bunga Teju, Dharu Triasih	30
PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KONVENSI JENEWA DAN HUKUM KONFLIK BERSENJATA – Christian Kevin Vieri Wibisono, Jaden Audrey, Wafda Vivid Izziyana, Arief Budiono	31
PERLINDUNGAN TERHADAP KOMBATAN DAN NON-KOMBATAN PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL – Bintang Sukma Putra D., Karim Wahyu Aji, Wafda Vivid Izziyana, Amri Panahatan Sihotang.....	32
PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KEJAHATAN PERANG DAN TRIBUNAL INTERNASIONAL – Amalia Sintiya Dewi, Wahyu Rismadiyanti, Wafda Vivid Izziyana, Amri Panahatan Sihotang.....	33

PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA - Muhammad Farel Akmal, Farhan Fahkryzi Saputra, B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti.....	34
PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KONVENSI INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA - Yaser, Nurul Hidayatulloh, B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti.....	35
AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PERAN MAHKAMAH HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL - Misgiahma Aprilia, Aulia Bintang.R., Ahmad Riou .I., B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti.....	36
AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS) - Gustada Putra Awala, Muhammad Sulthon Fahmi, Wafda Vivid Izziyana.....	37
AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN - Rendy Setyo Prakoso, Shidqi Atha Yassar, Subaidah Ratna Juita	38
AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM SENGKETA MARITIM DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA - Azka Seftia Nenda, Ananke Olga Prihastiw, Wafda Vivid Izziyana	39
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (<i>WORLD TRADE ORGANIZATION</i>) PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Afiqoh Dwi Anggraeni, Zahra Karima, Dhian Indah Astanti , Dharu Triasih.....	40
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI DALAM PERWUJUDAN NILAI KEARIFAN LOKAL - Afitya Nur Asyah, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti.....	41
PENGADILAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM PERWUJUDAN NILAI KEARIFAN LOKAL - Moh. Yunus, Wafda vivid Izziyana, Andhika Yuli Rimbawan.....	42
PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL - Roby Azmi, Petrus Seto Haryanto, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti....	43
PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI LINGKUNGAN (PROTOKOL KYOTO, PERJANJIAN PARIS) DALAM PERWUJUDAN NILAI KEARIFAN LOKAL - Liana Putri Amanda, Nova Ellistiya, Supriyadi	44
ISU-ISU LINGKUNGAN GLOBAL DALAM (PERUBAHAN IKLIM, POLUSI, KEANEKARAGAMAN HAYATI) PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL - Puput Dini Augustia, Alfhadhea Catur Prasepyani, Wafda vivid Izziyana, Yusuf Adam Hilman	45
PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL - Defin Ahmad Zahfran, Alditho Bomasika, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti	46
PENYELESAIAN MEDIASI DAN NEGOSIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Ade Irma Srimurni Ati, Selvie Nauria Laila, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti.....	47
ANALISIS KASUS HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL - Fadhila Ratnadewati, Vania, B Rini Heryanti	48
PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KASUS PERJANJIAN INTERNASIONAL, SENGKETA INTERNASIONAL, DAN KEPUTUSAN PENGADILAN INTERNASIONAL - Jenny Oktaviani S, Wahyu Rahma F, Supriyadi.....	49
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Nurul Huda Sodikhin, Muhammad Azimar Rousli, Sukimin, A Heru Nuswanto.....	50
IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION MENGENAI TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES - Ramadhan Sulistiyanto, Andini Nur Fadhila Syah Putri, Dharu Triasih	51

ARTI PENTING PERJANJIAN TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES PADA NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL - Kurnia Majid Gunawan , Randi Kusuma Prasetyo, Ahmad Ridho, Dharu Triasih, Dhian Indah Astanti	52
PENGHORMATAN, PELAKSANAAN DAN PENAFSIRAN ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Fatasha Aulya Fiko , Julia Ananda Cintha, Mohammad Khoirul Huda, Dhian Indah Astanti, Dharu Triasih.....	53
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM - Satrio Nabawi.....	54
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH ATAS TANAH YANG MUSNAH - Zela Ony Zulfida, Edi Pranoto	55
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF - Haziul Ma'arif.....	56
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF - Wafda Vivid izziyana, Sukimin, Endah Pujiastuti.....	57
NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TATA KELOLA DESA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF - Sukimin	58
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PERTANGGUNGJAWABAN BANK BAGI NASABAH TERHADAP KEJAHATAN ITE PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Dhian Indah Astanti, Amri Panahatan S, B. Rini Heryanti.....	60
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA ASURANSI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF - B. Rini Heryanti.....	61
IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM JUAL BELI ONLINE UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIVE - Dharu Triasih.....	62
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - Supriyadi, Tri Mulyani, Dyah Ayu Sulistyarini	63
PERIZINAN PENGGUNAAN AIR BAWAH TANAH BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN AIR - Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih. .	64
URGENSI DAN IMPLEMENTASI PERBANDINGAN WAKAF PRODUKTIF ANTAR NEGARA DEMI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Mukharom, Dhian Indah Astanti.....	65
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKOPERASIAN DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI BERKELANJUTAN - Nur Sulisty Budi Ambarini.....	66
PARTISIPASI MASYARAKAT SUKU BADUY DALAM PEMILU SERENTAK 2024 - Nur Aida.....	67
NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ADAT SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF - Rosnidar Sembiring, Nurhadi Ahmad Juang	68
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI - Sri Astutik, Dudik Daja Sidharta, Subekti, Nur Handayati.....	69
KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA-PERTAMBANGAN TIMAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG - Iga Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adi, Agung Basuki Prasetyo	70
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAKLINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA - Joice Soraya, Muhammad Ansy Althafzufar	71

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERKENAAN DENGAN TARIF PROGRESIF (STUDI KASUS DI UPTD SAMSAT WIDODAREN KABUPATEN NGAWI) - Mohammad Choirul Anam, Retno Catur Kusuma Dewi.....	72
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU <i>LOVE SCAMMING</i> - Krista Yitawati, Eka Widia Ningrum	73
AKIBAT HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL - Anik Tri Haryani, Taufiq Yuli Purnama.....	74
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOMOGRAPH - Meirza Aulia Chairani, Bambang Sukarjono.....	75
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT: SEBUAH PERBANDINGAN HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI <i>CITIZEN LAW SUIT</i> - Sigit Sapto Nugroho, Sarjiyati.....	76
RECONSTRUCTION OF CUSTOMARY LAW IN DEVELOPMENT AGRARIAN LAW IN THE FIELD OF MORTGAGE RIGHTS - Anita Kamilah, Hesti Dwi Astuti, Grace E. Tambun, & Ajeng Permana	77
ANALISIS ALIH FUNGSI HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL, PERUMAHAN, DAN VILLA DI KAWASAN PUNCAK - CIANJUR - M. Budi Mulyadi, M. Raka Pratama Nurjati.....	78
LEGAL PROTECTION OF THE NATION'S CULTURAL IDENTITY IN THE ERA OF GLOBALISATION - Yuyun Yulianah, Mumum M Rozi, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Salsabila Hadi Aulia, Rendy Kurniawan.....	79
THE CHALLENGES OF GLOBALISATION: EXISTENCE AND EFFORTS IN MAINTAINING CULTURAL IDENTITY - Saptaning Ruju Paminto, Mia Amalia, Ira Permatasari, Salsa Octaviani Suryanto.....	80
SOCIAL CONFLICT RESOLUTION RELATED TO BULLYING CASES THROUGH THE DELIBERATION SYSTEM BASED ON PANCASILA PERSPECTIVE - Trini Handayani, Aji Mulyana, Cucu Solihah, Azzahra Salsabila Ramadani, Kayla Andini Putri	81
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI SAMARINDA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL - Yatini, Tombur Ompu Sunggu	82
FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAERAH (<i>GOOD REGIONAL GOVERNANCE</i>) - Jaidun, Syaharie Jaang.....	83
INDEPENDENSI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DIKOTA SAMARINDA - Dinny Wirawan Pratiwie	84
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PENGEMBANGAN UMKM DI SAMARINDA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF - Wahyuni Safitri, Nainuri Suhadi.	85
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DIDESA KUTAI LAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA - Rustiana.....	86
IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEMANDU <i>NATIONAL INTEREST LAW</i> - Naya Amin Zaini.....	87
KAJIAN KEKUATAN HUKUM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2023 - Wieke Dewi Suryandari.....	88
INTERVENSI ATURAN PERPU TERHADAP PUTUSAN HUKUM ADAT ATAS KASUS PELECEHAN DI DESA ADAT SUKU PASEMAH BENGKULU - Ridho Sa'dillah Ahmad, Faisal Mirza Pradana	89
NILAI KEARIFAN LOKAL PADA HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL - Lailasari Ekaningsih	90

INTEGRASIKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL: PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF - Mohamad Tohari.....	91
KONTRA PERSEPSI HUKUM PIDANA TENTANG PASAL PERZINAAN DAN KOHABITASI DALAM KUHP BARU (SUATU TELAAH BUDAYA TABU DALAM DINAMIKA MASYARAKAT ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL) - Surya Kusuma Wardana, Emy Handayani.....	92
KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BAGI ANAK PASKA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG) - Nurdin	94
WEWENANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MENGESAHKAN SUATU AKTA OTENTIK - Mikayani Putri, Evelyn B. Sumbay.....	95
AN ANALYTICAL STUDY ON THE LEGAL FRAMEWORK OF MONEY POLITICS AND ITS COMPLIANCE WITH BAWASLU REGULATION - Susianikanaha.....	96
PEMUKA AGAMA DAN LINGKARAN PELECEHAN SEKSUAL: STUDI KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH OKNUM VIKARIS DI GMTI SILOAM NAILANG, KABUPATEN ALOR - Andi Irfan, Siti Syahida Nurani, Dan Sahrul Amir.....	97
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PELAKU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) DI WILAYAH PERAIRAN DESA TABLOLONG KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG - Satria Akbar Bachtar.....	98
EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DAN LAUT YANG TIDAK BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL - Nabilla Rastiana, Ivana Malida Malfa Lena, Wafda Vivid Izziyana, A Heru Nuswato	100
PENGELOLAAN LIMBAH PLASTIK DAN LIMBAH ELEKTRONIK YANG MENINGKAT PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Rizqy Firman Syah, Athallah Febrio Yumna Faruqi, Sukimin	101
EKSPLOITASI PENAMBANGAN PADA PENGAMBILAN MINERAL DAN BAHAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - M Nurul Auliyail Arifin, Adellia Lutfi Indriani, Subaidah Ratna Juita.....	102
TANTANGAN POLUSI UDARA, AIR, DAN TANAH YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN MANUSIA DAN EKOSISTEM DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL - Stefani Aurel Pradina, Debora, Wafda Vivid Izziyana.....	103
UPAYA EKSTRADISI SEBAGAI PENGATURAN PENEGAK HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA - Beatrich Advismadya Pamungkas, Muhamad Feri Setiawan, Subaidah Ratna Juita	104
IMPLEMENTASI DEPORTASI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF - Bunga Punta Wibi, Ananda Ridho Rafiqi, Supriyadi.....	105
PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPOSIF PADA PELAKSANAAN EKSTRADISI DALAM PERMASALAHAN BOM BALI - Divo Aulia Adhitama, Saman Rois Aziiz Zakiri Subaidah Ratna Juita, Supriyadi	106
MASA DEPAN HUKUM TRANSNASIONAL DAN KEARIFAN LOKAL - M Agung Izzul, Zaki Pramudita N, Wafda Vivid Izziyana, B Rini Heryanti.....	107
SIGNIFIKANSI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM - Resky Amalia, Putri Nurmasari, B Rini Heryanti, A Heru Nuswanto	108
HUKUM DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL - Farros Kaka A, Deco Maftuh R, Tri Mulyani.....	109
PENGARUH MODERNISASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL DALAM KEHUTANAN - Zaki Pramudita N, Muhammad Agung Izzul, Tri Mulyani.....	110

KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM PENGELOLAAN HUTAN - M Naufal Asyhari, Yanuar Tri, Tri Mulyani	111
KONTRIBUSI PEREMPUAN TERHADAP KEBERLANJUTAN HUTAN DAN EKONOMI LOKAL - Moh Dwi Ferrinata, Victaura Chrisendy, Sukimin	113
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAUT - Lutfi Amaliya, Bararela Sebastian U, Wafda Vivid Izziyana	114
KEARIFAN LOKAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF PERFEKTIF KAJIAN HUKUM PERDATA - Japansen Sinaga, Irene Puteri AS Sinaga, Alum Simbolon	115
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA : DISKURSUS ANTARA ASAS LEGALITAS DAN <i>LIVING LAW</i> DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA HUKUM NASIONAL - Erwin Syahrudin, Mella Ismelina, Diana Fitria	116
INTEGRITAS & EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU - Vieta Imelda Cornelis, Siti Marwiyah, Stefanus Budi Juwono, Andik Mannulusi	117
PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM DIMENSI HUKUM ADAT DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN PENDAFTARAN TANAH - Wahyu Prawesthi, M.Syahrul Borman, Dedi Wardana Nasoetion	119
ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ALIH KREDIT - Sri Astutik, Renda Aranggraeni, Alvin Pratama Choiri, Lukman Hakim	120
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI - Sri Astutik, Dudik Djaja Sidharta, Subekti, Nur Handayati	121
PENERAPAN TEORI KONTRAK DALAM SENGKETA JUAL BELI RUMAH PERUMAHAN - Subekti, Dudik Djaja Sidarta, Nur Handayati, Fita Fitriana Parwahadi, Humairoh.....	122
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG KEBEBASAN BERBICARA DI DUNIA MEDIA SOSIAL MEDIA - Tri Supartini.....	123

RUNDOWN ACARA
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
“KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF”
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG
Rabu, 10 Juli 2024

No.	Waktu	Agenda	Keterangan
1.	07.30-08.30	Registrasi peserta	Peserta hadir di Ruang Teleconference USM dan <i>Room Zoom Meeting</i>
2.	08.30-08.35	Pembukaan	MC
3.	08.35-08.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars USM	Panitia
4.	08.45-08.50	Doa	Muhammad Iftar Aryaputra, S.H., M.H.
5.	08.50-08.55	Laporan Ketua Panitia	B. Rini Heryanti, S.H., M.H.
6.	08.55-09.05	Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama	Panitia
7.	09.05-09.10	Sambutan sekaligus membuka kegiatan	WR I Bidang Akademik USM Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahjuningsih, M.P.
8.	09.10-11.00	Seminar Nasional	
		Pengantar	Moderator Dr. Agus Saiful Abib, S.H., M.H.
		Narsum 1	Prof. Dr. Laksanto, S.H., M.Hum.
		Narsum 2	Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
		Narsum 3	Dr. Amri P. Sihotang, S.S., S.H., M.Hum.
9.	11.00-12.00	Tanya Jawab	Moderator Dr. Agus Saiful Abib, S.H., M.H.
10.	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
11.	13.00-15.00	Presentasi Paper	Moderator
12.	15.00-15.30	<i>Coffee Break</i> , SHOLAT	Panitia
13.	15.30-15.45	Persiapan Penutupan	Panitia
14.	15.45-16.00	Penutupan (Pengumuman 3 Paper terbaik)	MC

KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Ani Triwati, A. Heru Nuswanto, Kadi Sukarna

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

ani.triwati@usm.ac.id

Abstract

Restorative justice as part of criminal case resolution is a hereditary legacy from our ancestors, who wanted justice with balance and peace. Balance obtains justice for perpetrators, victims and communities affected by criminal acts. The peace of the parties aims to restore the situation or relationship that has been fractured between the perpetrator and / or the perpetrator's family and the victim and / or the victim's family, including the restoration of the situation for the community due to the occurrence of a criminal offense. The settlement of criminal cases with restorative justice includes accommodating the interests of victims, in this research is child victims, so that child victims can obtain compensation or recovery from the perpetrator as before the crime occurred. The problem is focused on how the restorative justice approach for child victims in the criminal justice system. Restorative justice has been regulated in legislation, although it is still fragmentary. Children as victims of criminal acts require special protection and treatment in order to recover both physically and psychologically. Protection for child victims includes the Child Protection Act, the Witness and Victim Protection Act and the Juvenile Criminal Justice System Act. The restorative justice approach is based on an admission of guilt and forgiveness, namely an apology from the perpetrator and an apology from the victim. For child victims and/or their families, admission of guilt and apologies are very important and are part of obtaining justice, in addition to restoration. For the perpetrator, the admission of guilt and apology is an access to obtain peace with the child victim and / or his family, which can then be followed by compensation as part of the recovery of the impact of the crime.

Keywords: *Child Victims; Restorative Justice; Criminal Justice System.*

Abstract

Keadilan restoratif sebagai bagian dalam penyelesaian perkara pidana merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita, yang menghendaki keadilan dengan keseimbangan dan perdamaian. Keseimbangan memperoleh keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat terdampak tindak pidana. Perdamaian para pihak bertujuan untuk pemulihan keadaan atau hubungan yang telah retak antara pelaku dan/atau keluarga pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban, termasuk pemulihan keadaan bagi masyarakat akibat terjadinya tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif di antaranya untuk mengakomodir kepentingan korban, dalam penelitian ini adalah anak korban, agar anak korban memperoleh ganti kerugian atau pemulihan dari pelaku sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Permasalahan difokuskan pada bagaimana pendekatan keadilan restoratif bagi anak korban dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun masih bersifat fragmentaris. Anak sebagai korban tindak pidana memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus dalam rangka pemulihan baik fisik maupun psikis. Perlindungan bagi anak korban di antaranya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan keadilan restoratif didasari adanya pengakuan bersalah dan permaafan yaitu permohonan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari korban. Bagi anak korban dan/atau keluarganya, pengakuan bersalah dan permohonan maaf merupakan hal yang sangat penting dan merupakan bagian untuk memperoleh keadilan, selain adanya pemulihan. Bagi pelaku, pengakuan bersalah dan pemberian maaf merupakan akses untuk memperoleh perdamaian dengan anak korban dan/atau keluarganya, yang selanjutnya dapat diikuti dengan ganti kerugian sebagai bagian pemulihan dampak terjadinya tindak pidana.

Katakunci : *Anak Korban; Keadilan Restoratif; Sistem Peradilan Pidana.*

IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DALAM KERJASAMA PROGRAM RENDAH KARBON

Helen Intania Surayda, Dedi Suwandi.

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

helen@usm.ac.id

Abstract

The importance of international cooperation in the protection and improvement of the environment is emphasized in the Stockholm Declaration. Indonesia is working with the UK to mitigate the impact of climate change through the development of environmentally friendly urban public transportation while implementing the commitment of the Glasgow conference to realize the transition to zero emission vehicles. This cooperation is in accordance with the principles of environmental law. Barriers to implementation: there is no classification of users in terms of social, economic and environmental benefits that are inclusive, services and infrastructure are not yet optimal, the needs and desires of users have not been fulfilled as a favorite choice of accommodation. Solutions are carried out through assessments and focused discussions for users and managers from various vulnerable and socio-economic groups to provide data needs for transportation users both in terms of comfort and safety so that they can explore what needs to be improved so that low-carbon transportation becomes the main choice of urban mobility and work together with the regional government and third parties to develop the Semarang metropolitan area according to the road map and become a pilot city with the largest low-carbon transportation user.

Keywords: *Implementation; Environment; Low Carbon.*

Abstrak

Pentingnya kerjasama internasional dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan ditekankan Deklarasi Stockholm. Indonesia bekerjasama dengan Inggris memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan ramah lingkungan sekaligus menjalankan komitmen konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan *zero emission*. Kerjasama ini sesuai prinsip hukum lingkungan. Hambatan pelaksanaan: tidak adanya klasifikasi pengguna dari segi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang inklusif, kurang *maksimalnya* layanan dan sarpras infrastruktur, belum terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pengguna sebagai pilihan favorit akomodasi. Solusi dilakukan melalui *assesment* dan diskusi terfokus bagi penggunadan pengelola dari berbagai kelompok rentan dan social ekonomi untuk memberikan data kebutuhan pengguna transportasi baik dari segi kenyamanan dan keselamatan sehingga dapat menggali apa yang harus ditingkatkan agar transportasi rendah karbon menjadi pilihan utama mobilitas di perkotaan serta bekerjasama dengan pemda setempat dan pihak ketiga untuk mengembangkan area metropolitan Semarang sesuai dengan *road map* dan kota percontohan dengan pengguna transportasi rendah karbon terbesar.

Kata Kunci: Implementasi; Lingkungan; Rendah Karbon.

DISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTUNAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI PERWUJUDAN PENGEMBANGAN HUKUM ZAKAT YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG PENGELOLAAN ZAKAT

Riska Azizatul Ula, Dian Septiandani, Agus Saiful Abib

Fakultas Hukum Universitas Semarang
riska1.ula@gmail.com, dian.septiandani@usm.ac.id, agussaifulabib@usm.ac.id

Abstract

In this modern era, the development and revival of Muslims began to be seen in various lines of life, including zakat whose development has begun to be seen. Basically, a good understanding of zakat can make Muslims aware of the importance of helping in life, and good zakat management can improve the standard of living of the community so that it can create new hopes for a prosperous life. This is also in line with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management (hereinafter referred to as the Zakat Law) which explains that zakat management aims to realize community welfare and poverty reduction. The formulation of the problem raised in this research is regarding the distribution of zakat through the public health benefit program at the Indonesian Zakat Initiative which is reviewed based on Islamic law and Law No. 23 of 2011 concerning zakat management. The type of research used in this research is normative juridical. Based on the results of the research, it is found that the management of zakat distribution in Zakat Initiative Indonesia has not fully complied with the provisions of Islamic law, which is because the recipients of zakat are only 7 asnaf, but the results of the review based on Law No. 23 of 2011, Zakat Initiative Indonesia has fulfilled the provisions of the regulation as evidenced by the application of the legal basis of Law No. 23 of 2011 including Article 20, Article 21, Article 29, and Article 34 (1), as well as the views of Islamic law on the development of zakat law related to zakat distribution. 23 of 2011 including Article 20, Article 21, Article 29, and Article 34 (1), as well as the view of Islamic law on the development of zakat law related to the distribution of zakat realized through public health benefit programs, which is allowed by scholars, by referring to the MUI fatwa even though there is no specific evidence that regulates the distribution of zakat through health benefit programs.

Keywords: Zakat Distribution; Development of Zakat Law, Community Health Benefit

Abstrak

Di zaman modern ini, perkembangan dan kebangkitan umat Islam mulai terlihat di berbagai lini kehidupan, termasuk zakat yang perkembangannya sudah mulai terlihat. Pada dasarnya pemahaman zakat yang baik dapat menyadarkan umat Islam akan pentingnya tolong menolong dalam kehidupan, dan pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat tercipta harapan baru untuk kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut juga selaras dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Selanjutnya disebut UU Zakat) yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penyaluran zakat melalui program santunan Kesehatan masyarakat di Inisiatif Zakat Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan penyaluran zakat di Inisiatif Zakat Indonesia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Islam, yang dikarenakan penerima zakat hanya 7 asnaf, akan tetapi hasil dari tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Inisiatif Zakat Indonesia sudah memenuhi ketentuan dari peraturan tersebut yang dibuktikan dengan penerapan dasar hukum dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 (1), serta pandangan hukum Islam tentang pengembangan hukum zakat berkaitan dengan pendistribusian zakat diwujudkan melalui program santunan kesehatan masyarakat yaitu diperbolehkan oleh ulama, dengan mengacu pada fatwa MUI meskipun tidak ada dalil khusus yang mengatur tentang penyaluran zakat melalui program santunan kesehatan.

Katakunci: Pendistribusian Zakat; Pengembangan Hukum Zakat, Santunan Kesehatan Masyarakat.

REKONSTRUKSI HUKUM ATAS PERATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Dian Septiandani, Soegianto, Yudhitiya Dyah Sukmadewi

Fakultas Hukum, Universitas

Semarang

dian.septiandani@usm.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find the right legal reconstruction regarding interfaith marriages in Indonesia. In Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law, that Marriage is valid, if performed according to the laws of each religion and belief. Meanwhile, the content of the explanation of Article 35 of the Population Administration Law allows interfaith marriages. With this, the legal rules regarding interfaith marriages need to be reconstructed clearly and firmly, so that there is no different understanding and implementation in the community, because it will cause legal uncertainty. This research is a normative legal research with a statutory approach. The method of collecting secondary data is done through literature study. The data obtained is analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the regulation of marriage in Indonesia does not recognize the existence of interfaith marriages, this relies on the laws of each religion, so the result is that the marriage becomes invalid. The consequences impact on the status of children to be illegitimate children or outside of marriage and the status of inheritance. Furthermore, related to the regulation of interfaith marriages, there is disharmony in the regulations of the Marriage Law and the Population Administration Law, the provisions of Articles 35 and 36 of the Population Administration Law should be revoked because they cause conflict of norms with the Marriage Law. This will provide legal certainty to the community.

Keywords: *Different Religion; Marriage; Reconstruction.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menemukan rekonstruksi hukum yang tepat mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengizinkan perkawinan beda agama. Dengan adanya hal tersebut, aturan hukum mengenai perkawinan beda agama perlu di rekonstruksi secara jelas dan tegas, agar tidak terjadi pemahaman serta implementasi yang berbeda-beda di masyarakat, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan datanya berupa data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap Perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, hal ini bertumpu pada hukum masing-masing agama, sehingga akibatnya adalah perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Konsekuensinya berimbas pada status anak menjadi anak tidak sah atau luar perkawinan serta status terhadap hal kewarisan. Selanjutnya, terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama terdapat disharmoni dalam regulasi Undang- Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, seharusnya ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dicabut karena menimbulkan pertentangan norma dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini, akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Katakunci: Beda Agama; Perkawinan; Rekonstruksi.

PENGAKUAN NILAI KEARIFAN LOKAL PADA KEBIASAAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF

Imelda Nuthasari Gunawan , Lukman Hakim, Dikcky Feri Nugroho, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Imelda.nutasari19@gmail.com, wafda@usm.ac.id

Abstract

Recognizing the value of local wisdom in customary international law plays a vital role in the development of progressive and responsive law. Local wisdom, which includes values, traditions, norms and practices passed down from generation to generation in a community, contributes significantly to the formation of inclusive and equitable international law. This research uses normative juridical method. The research explores how the recognition of indigenous peoples' traditional rights, the integration of customary principles in dispute resolution, and the preservation of the environment through traditional ecological knowledge, can enrich international law. Case studies such as the Nagoya Protocol and an environmental court decision in Ecuador demonstrate the tangible implementation of indigenous values. Despite challenges such as differences in cultural interpretations and resistance from the formal legal system, great opportunities exist to create an adaptive international legal framework by integrating indigenous knowledge. Thus, the recognition and integration of indigenous knowledge in international law not only preserves cultural heritage but also provides innovative solutions to global challenges, strengthening progressive and responsive legal development.

Keywords : *Local Wisdom, International Customary Law, Progressive Law Development*

Abstrak

Pengakuan terhadap nilai kearifan lokal dalam kebiasaan hukum internasional memainkan peran vital dalam pembangunan hukum yang progresif dan responsif. Kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai, tradisi, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas, berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan hukum internasional yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian mengeksplorasi bagaimana pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat, integrasi prinsip-prinsip adat dalam penyelesaian sengketa, dan pelestarian lingkungan melalui pengetahuan ekologi tradisional, dapat memperkaya hukum internasional. Studi kasus seperti Protokol Nagoya dan keputusan pengadilan lingkungan di Ekuador menunjukkan implementasi nyata dari nilai-nilai kearifan lokal. Meskipun terdapat tantangan seperti perbedaan interpretasi budaya dan resistensi dari sistem hukum formal, peluang besar terbuka untuk menciptakan kerangka hukum internasional yang adaptif dengan mengintegrasikan kearifan lokal. Dengan demikian, pengakuan dan integrasi kearifan lokal dalam hukum internasional tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga menyediakan solusi inovatif bagi tantangan global, memperkuat pembangunan hukum yang progresif dan responsif.

Katakunci: Kearifan Lokal, Kebiasaan Hukum Internasional, Pembangunan Hukum Progresif

ASAS KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIVE PADA PRAKTIK EKSTRADISI

Aziyza Qurrotu A'yun Sulthoni Mas'ad, Yunna Hidayatullah Majid, Supriyadi, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

¹aziyzahqurrotu.asm@gmail.com; ²yunahunterz@gmail.com.

Abstract

The development of progressive and responsive extradition law practices is a critical step in combating international level crimes. Traditional extradition laws are often unable to keep up with the complexity and dynamics of cross-border crimes, such as Narcotics, which are increasingly structured and organized. Progressive law, conditions and innovations in legal response, while responsive law ensures swift and effective legal action in accordance with the needs of the global community. The integration of local values or local wisdom in the development of extradition law can enrich and strengthen the legal system. However, challenges such as fundamental differences between legal systems and international resistance require solutions in the form of cooperation between countries. The research method used is Novelty Research by using search engines, Google Scholar, Research Gate for the process of collecting previous journals. The results of this study show that extradition plays an important role in fighting international crimes. This study examines extradition, the principles of extradition, the prevention and eradication of crime, and the types of crimes that can be extradited.

Keywords: Extradition; Crime; Responsive; Progressive.

Abstrak

Pengembangan praktik hukum ekstradisi yang progresif dan responsif merupakan langkah kritis dalam memerangi kejahatan tingkat internasional. Hukum ekstradisi tradisional sering kali tidak mampu mengikuti kompleksitas dan dinamika kejahatan lintas batas, seperti Narkotika yang semakin terstruktur dan terorganisir. Hukum progresif, kondisi dan inovasi dalam respons hukum, sementara hukum responsif memastikan tindakan hukum yang cepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat global. Integrasi nilai-nilai lokal atau kearifan lokal dalam pengembangan hukum ekstradisi dapat memperkaya dan memperkuat sistem hukum. Namun, tantangan seperti perbedaan mendasar antara sistem hukum dan resistensi internasional memerlukan solusi berupa kerjasama antar negara. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian Novelty dengan menggunakan search engine, Google Scholar, Research Gate untuk proses pengumpulan jurnal terdahulu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstradisi memainkan peran yang penting dalam memerangi kejahatan tingkat Internasional Penelitian ini mengkaji pada ekstradisi, asas-asas ekstradisi, pencegahan dan pembarantasan tindak kejahatan, dan jenis kejahatan yang dapat di Ekstradisi.

Katakunci: Ekstradisi; Kejahatan; Responsif; Progresif.

EFEKTIVITAS SANKSI DEPORTASI TERHADAP OVERSTAY WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU KEARIFAN LOKAL

Aurora Fatya Jenar, Rangga Aditya, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

aurora@gmail.com, rangga17@gmail.com

Abstract

In the era of globalization, there is an increase in world population mobility which has various impacts, both beneficial and detrimental to the interests and life of the nation and state of the Republic of Indonesia. The phenomenon of many foreigners entering the territory of Indonesia has turned out to cause various problems, for example, cases of criminal overstay, especially in the Bali area. Based on the information we obtained in the first 5 months of this year, more than 37 foreigners were deported due to overstay in the Bali area, violations of residence permits in the form of overstay in the Bali area tend to continue to increase. This study aims to determine the effectiveness of deportation sanctions against criminal overstay of foreign nationals in the Bali area, in its preparation is done by research that utilizes the data we get from sources on the internet which is supported by secondary data in the form of opinions from native Balinese related to the effectiveness of deportation sanctions for foreign nationals against criminal overstay. The results showed that deportation sanctions against criminal overstay in the Bali Region are not effective, this can be seen from the data we obtained through sources on the internet, namely in the first 5 months of this year and violations of residence permits in the form of overstay in the Bali area tend to continue to increase, this shows that deportation sanctions do not provide a deterrent effect for perpetrators and other foreigners. Therefore, immigration authorities should be firm in handling overstay cases in the Bali area.

Keywords: *Deportation; Effectiveness; Overstay.*

Abstract

Dalam era globalisasi terjadi peningkatan mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Fenomena banyaknya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia ternyata menimbulkan berbagai permasalahan contohnya overstay terkhususnya di daerah Bali. Berdasarkan informasi yang kami dapat dalam kurun waktu 5 bulan pertama tahun ini, lebih dari 37 WNA yang dideportasi karena tindakan overstay di daerah Bali, pelanggaran izin tinggal dalam bentuk overstay di daerah Bali ini cenderung terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sanksi deportasi terhadap tindak pidana *overstay* Warga Negara Asing di daerah Bali, Dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian yang memanfaatkan data-data yang kami dapat dari sumber-sumber yang ada di internet yang didukung dengan data sekunder berupa pendapat dari orang asli daerah Bali terkait dengan efektifitas sanksi deportasi Warga Negara Asing terhadap tindak pidana overstay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi deportasi terhadap tindak pidana overstay di Daerah Bali tidak efektif, hal ini dapat diketahui dari data-data yang kami peroleh melalui sumber-sumber yang berada di internet yaitu dalam kurun waktu 5 bulan pertama tahun ini dan pelanggaran izin tinggal dalam bentuk overstay di daerah Bali ini cenderung terus meningkat, Hal ini menunjukkan bahwa sanksi deportasi tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan orang asing lainnya. Oleh karena itu sudah seharusnya pihak keimigrasian bersikap tegas dalam menangani kasus overstay yang ada di daerah Bali.

Katakunci: *Deportasi; Efektivitas; Overstay.*

PENYELESAIAN EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA DI SINGAPURA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Dian Pratiwi, Ailsa Calista F, Supriyadi, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

DianP17@gmail.com, ailsac@gmail.com

Abstract

This research examines the settlement of extradition cases of Indonesian citizens in Singapore through the perspective of local wisdom. In dealing with transnational crimes, extradition is an important instrument to bring perpetrators to justice. However, this process often faces complex challenges, including differences in legal, political and socio-cultural systems between sending and receiving countries. Using a local wisdom approach, this study seeks to identify cultural values and traditional norms that can be applied in the resolution of extradition cases, to achieve fairer and more effective outcomes. The study highlights some key aspects of relevant local wisdom, such as respect for human rights, involvement of community leaders, customary mediation, and restorative justice. Through case study analysis of the extradition of Indonesian citizens in Singapore, it is found that the integration of local wisdom can help reduce tensions between the two countries, increase public support, and ensure the protection of the rights of the accused. This research also underscores the importance of regional cooperation and cultural dialogue in strengthening a more harmonious and effective extradition mechanism. In conclusion, the local wisdom approach not only promotes respect for cultural and social values, but also has the potential to improve the efficiency and sustainability of the extradition process. Proper implementation of these principles can serve as a model for other countries in addressing extradition challenges in the era of globalization and transnational crime.

Keywords: Extradition, Indonesian Citizens, Singapore, Local Wisdom

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus ekstradisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Singapura melalui perspektif kearifan lokal. Dalam, menghadapi kejahatan transnasional, ekstradisi menjadi instrumen penting untuk membawa pelaku ke pengadilan. Namun, proses ini seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk perbedaan sistem hukum, politik, dan sosial-budaya antara negara pengirim dan penerima. Dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, penelitian ini berusaha mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian kasus ekstradisi, untuk mencapai hasil yang lebih adil dan efektif. Studi ini menyoroti beberapa aspek utama dari kearifan lokal yang relevan, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan pemimpin komunitas, mediasi adat, dan keadilan restoratif. Melalui analisis studi kasus ekstradisi WNI di Singapura, ditemukan bahwa integrasi kearifan lokal dapat membantu mengurangi ketegangan antara kedua negara, meningkatkan dukungan masyarakat, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional dan dialog budaya dalam memperkuat mekanisme ekstradisi yang lebih harmonis dan efektif. Kesimpulannya, pendekatan kearifan lokal tidak hanya mempromosikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses ekstradisi. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengatasi tantangan ekstradisi di era globalisasi dan kejahatan transnasional.

Katakunci: Ekstradisi, Warga Negara Indonesia, Singapura, Kearifan Lokal

PERJANJIAN EKSTRADIKSI INDONESIA DAN MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF

Muhamad Naufal Syutan F, Satrio Wicaksono Bagus N, Nanik Rahmayani, Renggayani Carmelia P, Subaidah Ratna Juita

Falkutas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
naufalsyutan13@gmail.com; tiosilversatrio03@gmail.com.

Abstract

The development of crime will always continue to increase and major criminals roam from one country to another with impunity. This will clearly threaten the security of the international community, and the security and peace that is aspired to will never be realized. One of the means used to overcome this problem is through an institution called "Extradition" or the surrender of criminals between countries. The surrender of criminals indicates a process by which a State surrenders at the request of another state a person accused or convicted of committing a criminal offense that violates the laws of the requesting state. However, such surrender is not as easy as one might think, as the criminal cannot simply be returned to his or her home country. There needs to be cooperation between countries, both bilateral and international. In this case, officials from the aggrieved country cannot simply enter the territorial area of another country to arrest the perpetrator of the crime. This is because in international law the principle of respecting the sovereignty of each country applies so that to enter another country there must be prior approval from the country to be entered Therefore, it is felt that there is a need for a treaty and legislation specifically regulating the repatriation of criminals.

Keywords: Extradition; Extradition Treaty; Progressive; Responsive

Abstrak

Perkembangan kejahatan akan senantiasa terus meningkat dan para penjahat-penjahat besar berkeliaran dari negara satu ke negara lainnya tanpa dikenakan hukuman. Hal demikian jelas akan mengancam keamanan masyarakat internasional, serta keamanan dan kedamaian yang dicita-citakan tidak akan pernah terwujud. Salah satu sarana yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut adalah melalui suatu lembaga yang disebut "Extradition" atau penyerahan penjahat antar negara Penyerahan penjahat menunjukkan suatu proses dimana suatu Negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang negara pemohon. Akan tetapi, penyerahan tersebut tidak semudah yang dibayangkan, penjahat tersebut tidak dapat begitu saja dipulangkan ke nagara asalnya. Perlu adanya suatu kerjasama antara negara-negara, baik itu bersifat bilateral maupun internasional. Dalam hal ini aparat dari negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Hal ini karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan masing-masing negara sehingga untuk memasuki negara lain pun harus ada persetujuan terlebih dahulu dari negara yang akan dimasuki Oleh karena itu dirasakan perlunya ada suatu perjanjian dan perundang-undangan khusus mengatur mengenai pemulangan pelaku kejahatan.

Katakunci: Ekstradisi; Perjanjian Ekstradisi; Progesif; Reponsif

PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL

Atik Kusmawati, Ninda Prasetya, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

kusumaatikkusuma@gmail.com; nindnindi76@gmail.com

Abstract

This research examines the role of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in providing legal protection to illegal Indonesian migrant workers from the perspective of local wisdom. Illegal Indonesian migrant workers often face various challenges and risks, including exploitation, human rights violations, and lack of access to adequate legal protection in destination countries. Local wisdom, which includes cultural values and traditional norms, can play an important role in these protection efforts. This study explores how the Ministry of Foreign Affairs can integrate local wisdom in its strategies and policies for the protection of illegal migrant workers. The aspects analyzed include respect for human rights, involvement of traditional leaders and local communities, custom-based mediation, and restorative justice approaches. This research uses a qualitative approach with case study methods and in-depth interviews to explore best practices and challenges faced. The results show that by adopting local wisdom principles, the Ministry of Foreign Affairs can improve the effectiveness of legal protection for illegal migrant workers. For example, the involvement of community leaders and traditional leaders in the mediation process can help resolve disputes in a way that is more acceptable to all parties. In addition, restorative justice approaches can provide a more holistic solution, focusing on restoring harm and rehabilitating migrant workers. In conclusion, local wisdom offers a rich and relevant perspective in providing legal protection to illegal Indonesian migrant workers. Proper implementation of these principles by the Ministry of Foreign Affairs can strengthen protection efforts, reduce the risk of exploitation, and improve the welfare of migrant workers abroad.

Keywords: Ministry of Foreign Affairs, Legal Protection, Illegal Migrant Workers, Indonesia, Local Wisdom,

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia ilegal dari perspektif kearifan lokal. Pekerja migran Indonesia ilegal sering kali menghadapi berbagai tantangan dan risiko, termasuk eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya akses terhadap perlindungan hukum yang memadai di negara tujuan. Kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional, dapat memainkan peran penting dalam upaya perlindungan ini. Studi ini mengeksplorasi bagaimana Kementerian Luar Negeri dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam strategi dan kebijakan perlindungan pekerja migran ilegal. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan tokoh adat dan komunitas lokal, mediasi berbasis adat, serta pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam untuk menggali praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengadopsi prinsip-prinsip kearifan lokal, Kementerian Luar Negeri dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja migran ilegal. Misalnya, keterlibatan pemimpin komunitas dan tokoh adat dalam proses mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih diterima oleh semua pihak. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih holistik, dengan fokus pada pemulihan kerugian dan rehabilitasi pekerja migran. Kesimpulannya, kearifan lokal menawarkan perspektif yang kaya dan relevan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia ilegal. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh Kementerian Luar Negeri dapat memperkuat upaya perlindungan, mengurangi risiko eksploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran di luar negeri.

Katakunci: Kementerian Luar Negeri., Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Ilegal, Indonesia, Kearifan Lokal,

PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Thalenta Nadhya, Alvina Rachawati, Supriyadi, Dharu Triasih

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

thalenta@gmail.com, alvina@gmail.com

Abstrak

This study examines extradition treaties between Indonesia and several countries from the perspective of local wisdom. Extradition is a legal process by which a suspect or convicted criminal is transferred from one country to another for trial or punishment. In the context of globalization and the rise of transnational crime, extradition treaties have become an important instrument in international law enforcement. The perspective of local wisdom, which includes cultural values and traditional norms, can provide an additional dimension in the management and implementation of extradition treaties. This research uses a qualitative approach with document analysis and in-depth interviews. The main focus of the research includes respect for human rights, involvement of community leaders, custom-based mediation, as well as the application of restorative justice. Case studies are taken from Indonesia's extradition treaties with countries such as Malaysia, Singapore and Australia. The results show that the integration of local wisdom in extradition treaties can increase the effectiveness and public acceptance of the extradition process. For example, respect for human rights and the application of restorative justice can ensure that suspects receive fair and humane treatment. In addition, the involvement of traditional leaders and community leaders in mediation can help resolve conflicts in a way that is more accommodating and acceptable to all parties. In conclusion, the local wisdom perspective makes a significant contribution in strengthening Indonesia's extradition treaty framework with other countries.

Keywords: Extradition Treaty, Indonesia, Local Wisdom.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan beberapa negara dari perspektif kearifan lokal. Ekstradisi adalah proses hukum dimana seorang tersangka atau terpidana kejahatan dipindahkan dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kejahatan transnasional, perjanjian ekstradisi menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum internasional. Perspektif kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional, dapat memberikan dimensi tambahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan perjanjian ekstradisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan wawancara mendalam. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan pemimpin komunitas, mediasi berbasis adat, serta penerapan keadilan restoratif. Studi kasus diambil dari perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian kearifan lokal dalam perjanjian ekstradisi dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap proses ekstradisi. Misalnya, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penerapan keadilan restoratif dapat memastikan bahwa tersangka mendapatkan perlakuan yang adil dan humanis. Selain itu, keterlibatan tokoh adat dan pemimpin komunitas dalam mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih akomodatif dan diterima oleh semua pihak. Kesimpulannya, perspektif kearifan lokal memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kerangka kerja perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara-negara lain.

Katakunci: Perjanjian Ekstradisi, Indonesia, Kearifan Lokal.

DISTORSI IZIN KEIMIGRASIAN DALAM PRAKTIK PROSTITUSI PADA WARGA NEGARA ASING CHINA DI INDONESIA PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Putri Ayu Anggorowati, Nurul Sya'baniyah, Mujiburahman, Risma, Tri Mulyani
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

¹ putriayu2265@gmail.com ; ² nurulsyabaniyah2@gmail.com ;

Abstract

This research examines the misuse of immigration permits by Chinese foreign nationals in the practice of prostitution in Indonesia from the perspective of local wisdom. This phenomenon not only violates immigration law and public order, but also negatively impacts the socio-culture of local communities. The local wisdom approach, which involves cultural values and traditional norms, can provide an alternative framework in addressing this issue more effectively and humanely. This study uses a qualitative approach with case study methods and in-depth interviews to understand the dynamics of immigration permit abuse in prostitution practices by Chinese foreigners in Indonesia. The research focuses on the influence of local culture, the role of traditional leaders and community leaders, and the application of restorative justice in handling cases. This research also analyzes the efforts of the government and related institutions in integrating local wisdom into law enforcement policies and practices. The results show that the application of local wisdom principles can strengthen law enforcement efforts and prevent abuse of immigration permits. The involvement of community leaders and traditional leaders in the mediation process can help resolve problems with an approach that is more accepted by the community. In addition, the application of restorative justice can provide a more holistic and sustainable solution, focusing on restoring social relations and preventing recurrence of violations. In conclusion, the integration of local wisdom in handling the abuse of immigration permits in the practice of prostitution by Chinese foreigners in Indonesia can increase the effectiveness and humanity in law enforcement. Proper implementation of these principles by the government and relevant agencies can strengthen local socio-cultural protection and promote better public order.

Keywords: *Immigration Permit Abuse, Chinese Foreigners, Prostitution, Indonesia, Local Wisdom.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan izin keimigrasian oleh Warga Negara Asing (WNA) China dalam praktik prostitusi di Indonesia dari perspektif kearifan lokal. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum keimigrasian dan ketertiban umum, tetapi juga berdampak negatif pada sosial budaya masyarakat lokal. Pendekatan kearifan lokal, yang melibatkan nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional, dapat memberikan kerangka kerja alternatif dalam menangani masalah ini secara lebih efektif dan manusiawi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam untuk memahami dinamika penyalahgunaan izin keimigrasian dalam praktik prostitusi oleh WNA China di Indonesia. Fokus penelitian meliputi pengaruh budaya lokal, peran tokoh adat dan pemimpin komunitas, serta penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus. Penelitian ini juga menganalisis upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kearifan lokal dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan izin keimigrasian. Keterlibatan pemimpin komunitas dan tokoh adat dalam proses mediasi dapat membantu menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lebih diterima oleh masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencegahan berulangnya pelanggaran. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal dalam penanganan penyalahgunaan izin keimigrasian dalam praktik prostitusi oleh WNA China di Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat perlindungan sosial budaya lokal dan mendorong terciptanya ketertiban umum yang lebih baik.

Katakunci : *Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, WNA China, Prostitusi, Indonesia, Kearifan Lokal.*

IMPLEMENTASI PRINSIP KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Nova Yuliani¹, Raka Wahyu Ananda², Khalifah Ayu Oktaviana, Putri Khoirunisa, Supriyadi

¹² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia.

¹ novayi2507@gmail.com; ² A111220201@student.usm.ac.id

Abstract

This research examines the implementation of the principle of local wisdom in international law, focusing on how cultural values and traditional norms can be integrated into globally applicable legal frameworks. Indigenous knowledge, which includes customary practices and values of local communities, has the potential to enrich and strengthen the international legal system by providing a more diverse and contextualized perspective. A qualitative approach was used in this research, using document analysis and in-depth interviews to explore cases where the principles of local wisdom have been successfully applied in an international context. The main focus of the research includes respect for human rights, the involvement of local communities in policy-making processes, customary dispute resolution mechanisms, and the application of restorative justice. The study also analyzes the role of international organizations and governments in promoting the integration of local values into global policies. The results show that the application of local wisdom principles can enhance the effectiveness and legitimacy of international law. For example, consultation and active participation of local communities can ensure that international policies are more appropriate to the local context and gain wider acceptance. In addition, custom-based mediation and restorative justice mechanisms can offer more holistic and sustainable solutions in international dispute resolution. In conclusion, the integration of indigenous principles in international law makes a significant contribution to creating a more inclusive, equitable and sustainable legal system. Proper implementation of these principles by international organizations, governments, and local communities can strengthen the protection of human rights and promote more harmonious international cooperation.

Keywords : Local Wisdom, International Law, Human Rights

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip kearifan lokal dalam hukum internasional, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang berlaku secara global. Kearifan lokal, yang mencakup praktik-praktik adat dan nilai-nilai komunitas lokal, memiliki potensi untuk memperkaya dan memperkuat sistem hukum internasional dengan memberikan perspektif yang lebih beragam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode analisis dokumen dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi berbagai kasus di mana prinsip-prinsip kearifan lokal telah berhasil diterapkan dalam konteks internasional. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan komunitas lokal dalam proses pembuatan kebijakan, mekanisme penyelesaian sengketa adat, dan penerapan keadilan restoratif. Studi ini juga menganalisis peran organisasi internasional dan pemerintah dalam mendorong integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi hukum internasional. Misalnya, konsultasi dan partisipasi aktif komunitas lokal dapat memastikan bahwa kebijakan internasional lebih sesuai dengan konteks lokal dan mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Selain itu, mekanisme mediasi dan keadilan restoratif yang berbasis adat dapat menawarkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa internasional. Kesimpulannya, integrasi prinsip kearifan lokal dalam hukum internasional memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh organisasi internasional, pemerintah, dan komunitas lokal dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mendorong kerja sama internasional yang lebih harmonis.

Katakunci : Kearifan Lokal, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia

PELAKSANAAN EKSTRADISI DI KOREA SELATAN PERSPEKTIF ASAS KEARIFAN LOKAL

Farah Nisrina Labibah, Oei Rachel Chintya S, Stevanus Gavin Herdyan, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: fnisrina02@gmail.com

Abstract

This study examines the application of the principle of local wisdom in the implementation of extradition in South Korea. Extradition is a legal process in which a suspect or convicted criminal is transferred from one country to another for trial or punishment. In the context of globalization and the rise of transnational crime, it is important to understand how cultural values and traditional norms can be integrated into extradition procedures to improve the effectiveness and fairness of the process. A qualitative approach is used in this research, with case study methods and in-depth interviews to identify how the principles of local wisdom are applied in extradition cases in South Korea. The focus of the research includes respect for human rights, involvement of community leaders, custom-based mediation, and the application of restorative justice. This study also evaluates the role of the South Korean government and related institutions in integrating local values into extradition policy. The results show that the application of local wisdom principles can help reduce tensions and increase community acceptance of the extradition process. The involvement of traditional leaders and community leaders in mediation can help resolve disputes in a way that is more acceptable to all parties. In addition, restorative justice approaches can provide more holistic and sustainable solutions, with a focus on restoring relationships and reparations for losses. In conclusion, the integration of local wisdom principles in the implementation of extradition in South Korea can improve the effectiveness and humanity of handling these cases. Proper implementation of these principles by the government and relevant agencies can strengthen the protection of human rights and the welfare of suspects, and promote a fairer and more sustainable extradition system.

Keywords : Extradition, South Korea, Local Wisdom.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas kearifan lokal dalam pelaksanaan ekstradisi di Korea Selatan. Ekstradisi adalah proses hukum di mana seorang tersangka atau terpidana kejahatan dipindahkan dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kejahatan transnasional, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional dapat diintegrasikan ke dalam prosedur ekstradisi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan proses tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal diterapkan dalam kasus-kasus ekstradisi di Korea Selatan. Fokus penelitian meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan pemimpin komunitas, mediasi berbasis adat, dan penerapan keadilan restoratif. Studi ini juga mengevaluasi peran pemerintah Korea Selatan dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan ekstradisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kearifan lokal dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proses ekstradisi. Keterlibatan tokoh adat dan pemimpin komunitas dalam mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih diterima oleh semua pihak. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemulihan hubungan dan reparasi kerugian. Kesimpulannya, integrasi asas kearifan lokal dalam pelaksanaan ekstradisi di Korea Selatan dapat meningkatkan efektivitas dan kemanusiaan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan tersangka, serta mendorong terciptanya sistem ekstradisi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Katakunci : Ekstradisi, Korea Selatan, Kearifan Lokal.

PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN SINGAPURA PADA KASUS KORUPSI PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL

Hilyatul Aulia Rahayu, Vania Zulfa Arsa A, Zaenal Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
hilyatulaulia2303@gmail.com; ariyantovania39@gmail.com

Abstract

This study examines the extradition agreement between Indonesia and Singapore in corruption cases from the perspective of local wisdom values. Corruption is a crime that harms the state and society, and often involves an extradition process to execute corruption suspects or convicts who have fled to another country. In this context, it is important to understand how cultural values, traditional norms and customary practices can influence the implementation of extradition treaties to ensure fairness and effectiveness of law enforcement. This research uses a qualitative approach with document analysis methods and in-depth interviews to explore how the principles of local wisdom are applied in the implementation of the extradition treaty between Indonesia and Singapore in corruption cases. The main focus of the research includes respect for human rights, involvement of traditional leaders and community leaders, custom-based mediation, and the application of restorative justice. The study also evaluates the role of legal institutions and the government in integrating local values into law enforcement policies. The results show that the application of local wisdom can strengthen the implementation of extradition treaties, increase the legitimacy of legal proceedings, and ensure that individual rights are respected at every stage of prosecution. The involvement of local communities and customary mediation practices can facilitate the resolution of disputes in a way that is more acceptable to all parties, while restorative justice approaches can help restore the harm arising from corruption. In conclusion, the integration of local wisdom values in the extradition treaty between Indonesia and Singapore in corruption cases can strengthen cross-border law enforcement efforts. Proper implementation of these principles by governments and relevant agencies can help build more effective cooperation in combating international corruption and ensure justice for all parties involved.

Keywords: Extradition Treaty, Indonesia, Singapore, Corruption

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dalam kasus korupsi dari perspektif nilai kearifan lokal. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, serta sering melibatkan proses ekstradisi untuk mengeksekusi tersangka atau terpidana korupsi yang melarikan diri ke negara lain. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya, norma-norma tradisional, dan praktik adat dapat mempengaruhi implementasi perjanjian ekstradisi untuk memastikan keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip kearifan lokal diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura dalam kasus korupsi. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan tokoh adat dan pemimpin komunitas, mediasi berbasis adat, serta penerapan keadilan restoratif. Studi ini juga mengevaluasi peran lembaga hukum dan pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai kearifan lokal dapat memperkuat implementasi perjanjian ekstradisi, meningkatkan legitimasi proses hukum, dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dalam setiap tahapan penuntutan. Keterlibatan komunitas lokal dan praktik mediasi adat dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih diterima oleh semua pihak, sementara pendekatan keadilan restoratif dapat membantu memulihkan kerugian yang timbul akibat korupsi. Kesimpulannya, integrasi nilai kearifan lokal dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dalam kasus korupsi dapat memperkuat upaya penegakan hukum lintas batas. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu membangun kerjasama yang lebih efektif dalam memerangi korupsi internasional dan memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat.

Katakunci : Perjanjian Ekstradisi, Indonesia, Singapura, Korupsi

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF PADA PERMASALAHAN EKSTRADISI

Prananindya Kristian Lukita, Rangga Adiguna, Nanang arizal Pratama, Rafly Maulana, Subaidah Ratna Juita

¹Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

¹ lukitaprananindya@gmail.com; ² ranggaadigunasy@gmail.com

Abstract

This research examines the values of local wisdom in progressive legal development related to extradition issues. Extradition is a legal process that involves the transfer of individuals from one country to another for trial or punishment for violations of the law. In the context of globalization and the complexity of cross-border crime, it is important to consider cultural values, traditional norms and customary practices in designing and implementing fair and effective laws. This research uses a qualitative approach by analyzing case studies and relevant literature to explore how principles of local wisdom can be communicated and integrated into progressive laws related to extradition. The main focus of the research includes respect for human rights, active involvement of local communities in the policy-making process, customary mediation mechanisms, and the application of restorative justice. In addition, the research also evaluates the role of legal institutions and governments in promoting the inclusion of local values in the context of international law. The results show that the integration of local wisdom values can enhance legal legitimacy, stimulate policy innovation, and strengthen human rights protection in the context of extradition. The involvement of local communities can ensure that legal policies not only meet international standards but are also relevant to local social and cultural realities. Meanwhile, restorative justice approaches and customary mediation can help create more sustainable and widely accepted solutions in cross-border dispute resolution. In conclusion, the implementation of indigenous values in the development of progressive laws related to extradition is an important step to strengthen global justice and promote the overall well-being of the international community. This requires collaboration between governments, international institutions and local communities to achieve a more inclusive, just and sustainable legal system.

Keywords : Extradition, Local Wisdom, Progressive Law,

Abstract

Penelitian ini mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan hukum progresif terkait permasalahan ekstradisi. Ekstradisi merupakan proses hukum yang melibatkan pemindahan individu dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau dihukum atas pelanggaran hukum. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas kejahatan lintas batas, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya, norma-norma tradisional, dan praktik adat dalam merancang dan melaksanakan hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis studi kasus dan literatur yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal dapat dikomunikasikan dan diintegrasikan ke dalam hukum progresif terkait ekstradisi. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan aktif komunitas lokal dalam proses pembuatan kebijakan, mekanisme mediasi adat, dan penerapan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran lembaga hukum dan pemerintah dalam mempromosikan inklusi nilai-nilai lokal dalam konteks hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan legitimasi hukum, merangsang inovasi kebijakan, dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ekstradisi. Keterlibatan komunitas lokal dapat memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga relevan dengan realitas sosial dan budaya setempat. Sementara itu, pendekatan keadilan restoratif dan mediasi adat dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima secara luas dalam penyelesaian sengketa lintas batas. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan hukum progresif terkait ekstradisi merupakan langkah penting untuk memperkuat keadilan global dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat internasional secara keseluruhan. Upaya ini

memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas lokal untuk mencapai sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Katakunci : Ekstradisi, Kearifan Lokal, Hukum Progresif,

SEJARAH DAN IMPLIKASI DEPORTASI PADA MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Dewi Malynda¹, Tarisa Anjar Putri², Nabila Rastiana, Ivana Malida Malfa Lena, Wafda Vivid Izziyana, Yusuf Adam Hilman,

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
dewiap@gmail.com, tarisaAJ@gmail.com, adam_hilman@umpo.ac.id, wafda@usm.ac.id

Abstract

Deportation has been an important part of immigration policy in Indonesia, with significant impacts on local communities. This research explores the history and implications of deportation in Indonesian society from a local wisdom perspective. The history of deportation in Indonesia covers a range of contexts, from the colonial period to the modern era of globalization, which provides an overview of the evolution of this policy and its impact on the identity and social stability of local communities. Qualitative research methods were used, analyzing historical literature, case studies, and in-depth interviews to uncover how cultural values, traditional norms, and customary practices influence perceptions and responses to deportation. The focus of the research included socio-cultural influences, local community responses to deportation, and the role of traditional leaders and community leaders in managing the social and economic impacts of deportation. The results show that the implementation of deportation policies that respect local wisdom can strengthen social integration and promote the recovery of affected communities. The involvement of traditional leaders in mediation and social recovery also contributes significantly to managing conflict and building sustainable solutions. In addition, restorative justice approaches and locally appropriate policy adaptations can increase the effectiveness of immigration policies and reduce social tensions in communities. In conclusion, a better understanding of the history and implications of deportation in the perspective of local wisdom can help design more inclusive and sustainable policies in Indonesia. By considering local values in immigration policy implementation, Indonesia can strengthen human rights protection, build social stability, and support justice for all citizens.

Keywords: *Deportation, Indonesia, Implications, Local Wisdom, History*

Abstrak

Deportasi telah menjadi bagian penting dari kebijakan imigrasi di Indonesia, dengan dampak yang signifikan bagi masyarakat lokal. Penelitian ini mengeksplorasi sejarah dan implikasi deportasi dalam masyarakat Indonesia dari perspektif kearifan lokal. Sejarah deportasi di Indonesia mencakup berbagai konteks, mulai dari masa kolonial hingga era modern globalisasi, yang memberikan gambaran tentang evolusi kebijakan ini dan dampaknya terhadap identitas dan stabilitas sosial masyarakat lokal. Metode penelitian kualitatif digunakan, dengan menganalisis literatur historis, studi kasus, dan wawancara mendalam untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya, norma-norma tradisional, dan praktik adat mempengaruhi persepsi dan respons terhadap deportasi. Fokus penelitian meliputi pengaruh sosial budaya, respon masyarakat lokal terhadap deportasi, serta peran tokoh adat dan pemimpin komunitas dalam mengelola dampak sosial dan ekonomi deportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan deportasi yang menghormati kearifan lokal dapat memperkuat integrasi sosial dan mendorong pemulihan komunitas yang terkena dampak. Keterlibatan tokoh adat dalam mediasi dan pemulihan sosial juga memberikan kontribusi signifikan dalam mengelola konflik dan membangun solusi yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dan adaptasi kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal dapat meningkatkan efektivitas kebijakan imigrasi dan mengurangi ketegangan sosial di masyarakat. Kesimpulannya, pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan implikasi deportasi dalam perspektif kearifan lokal dapat membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam implementasi kebijakan imigrasi, Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia, membangun stabilitas sosial, dan mendukung keadilan bagi semua warga negara.

Katakunci: Deportasi, Indonesia, Implikasi, Kearifan Lokal, Sejarah.

DEPORTASI WARGA NEGARA INDONESIA DI JERMAN BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL

Akarel Satrya Pratama¹, Raden Odityo Valen Aprian Jaya², Rifky Aziz Nur Rosafa, Manggala Abiyu Indra Daniswara, Wafda Vivid Izziyana

¹²Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

¹akarels@gmail.com; ²odityor@gmail.com

Abstract

This research examines the practice of deportation of Indonesian citizens (WNI) in Germany based on the perspective of local wisdom. Deportation is a legal action that repatriates individuals to their country of origin due to immigration violations. This process often has significant impacts on individuals and their families, and requires an approach that takes into account cultural values and traditional norms. The local wisdom approach can provide a more humane and effective alternative in handling deportation cases. This research uses a normative method to explore how the principles of local wisdom can be applied in the deportation practices of Indonesian citizens in Germany. The main focus of the research includes respect for human rights, involvement of community leaders, custom-based mediation, and the application of restorative justice. The study also evaluates the role of the Indonesian government and related institutions in integrating local values into deportation policies and practices. The results show that the application of local wisdom can help reduce the negative impacts of deportation and increase community acceptance of the process. The involvement of traditional leaders and community leaders in the mediation process can help resolve disputes in a way that is more acceptable to all parties. In addition, restorative justice approaches that emphasize the restoration of relationships and reparation of losses can provide more holistic and sustainable solutions for deported Indonesians. In conclusion, the integration of local wisdom in the deportation practices of Indonesian citizens in Germany can improve the effectiveness and humanity of handling these cases. Proper implementation of these principles by the government and relevant institutions can strengthen the protection of human rights and the welfare of Indonesian citizens, as well as encourage the creation of a more just and sustainable deportation system.

Keywords : *Deportation, Indonesian citizens, Germany, local wisdom.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik deportasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman berdasarkan perspektif kearifan lokal. Deportasi adalah tindakan hukum yang memulangkan individu ke negara asalnya akibat pelanggaran keimigrasian. Proses ini sering menimbulkan dampak signifikan bagi individu dan keluarganya, serta memerlukan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional. Pendekatan kearifan lokal dapat memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus deportasi. Penelitian ini menggunakan metode normative mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kearifan lokal dapat diterapkan dalam praktik deportasi WNI di Jerman. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keterlibatan pemimpin komunitas, mediasi berbasis adat, serta penerapan keadilan restoratif. Studi ini juga mengevaluasi peran pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan dan praktik deportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dapat membantu mengurangi dampak negatif deportasi dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap proses tersebut. Keterlibatan tokoh adat dan pemimpin komunitas dalam proses mediasi dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih diterima oleh semua pihak. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan dan reparasi kerugian dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan bagi WNI yang dideportasi. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal dalam praktik deportasi WNI di Jerman dapat meningkatkan efektivitas dan kemanusiaan dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan WNI, serta mendorong terciptanya sistem deportasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Katakunci : *Deportasi, Warga Negara Indonesia, Jerman, kearifan local.*

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSEDUR EKSTRADISI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Nur Irhas Zen , M. Adam Firman, Subaidah Ratna Juita, Sukimin

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
23IrhasNur@gmail.com , MadamF@gmail.com

Abstract

This research examines the protection of human rights in extradition procedures from the perspective of local wisdom. Extradition is a legal process that moves individuals from one country to another to stand trial or serve sentences for offenses committed in the country of origin or destination. In the context of globalization and international cooperation, it is important to ensure that extradition procedures respect and protect universal human rights, while accommodating local cultural values and traditional norms. This research uses a qualitative approach by analyzing literature studies, legal documents, as well as views from experts and practitioners. The main focus of the research includes respect for individual rights, active involvement of local communities in the legal process, customary mediation mechanisms, and the application of restorative justice principles. The study also evaluates the role of international institutions and governments in promoting the integration of local values in the global legal framework. The results show that the integration of local wisdom in the protection of human rights in extradition procedures can strengthen global justice and maintain a balance between the interests of states in enforcing the law and the rights of individuals involved. The involvement of local communities can ensure that legal policies and practices are not only legally effective but also socially and culturally. Restorative justice approaches and customary mediation can provide more holistic solutions to international disputes, promoting global peace and stability. In conclusion, the protection of human rights in extradition procedures from the perspective of local wisdom is an important step towards a more inclusive, just and sustainable legal system. Proper implementation of these principles by governments, legal institutions and civil society can strengthen global human rights protection and increase public confidence in the international legal system.

Keywords: Extradition, Human Rights, Local Wisdom

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam prosedur ekstradisi dari perspektif kearifan lokal. Ekstradisi adalah proses hukum yang memindahkan individu dari satu negara ke negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman atas pelanggaran hukum yang dilakukan di negara asal atau tujuan. Dalam konteks globalisasi dan kerjasama internasional, penting untuk memastikan bahwa prosedur ekstradisi menghormati dan melindungi hak asasi manusia secara universal, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis studi literatur, dokumen hukum, serta pandangan dari ahli dan praktisi. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak individu, keterlibatan aktif komunitas lokal dalam proses hukum, mekanisme mediasi adat, dan penerapan prinsip keadilan restoratif. Studi ini juga mengevaluasi peran lembaga internasional dan pemerintah dalam mempromosikan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam perlindungan HAM dalam prosedur ekstradisi dapat memperkuat keadilan global dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara-negara dalam menegakkan hukum serta hak individu yang terlibat. Keterlibatan komunitas lokal dapat memastikan bahwa kebijakan dan praktik hukum tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga secara sosial dan budaya. Pendekatan keadilan restoratif dan mediasi adat dapat memberikan solusi yang lebih holistik dalam menangani sengketa internasional, mempromosikan perdamaian serta stabilitas global. Kesimpulannya, perlindungan HAM dalam prosedur ekstradisi dari perspektif kearifan lokal adalah langkah penting menuju sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dapat memperkuat perlindungan HAM global dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum internasional.

Katakunci : Ekstradisi, Hak Asasi Manusia, Kearifan Lokal.

PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF PADA PERMASALAHAN PROSTITUSI PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL

Putri Asya Ramadhita , Wafda Vivid Izziyana, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

asyaramadhita@gmail.com

Abstract

This research examines the value of local wisdom in the development of a progressive and responsive national law on the issue of prostitution. Prostitution is a complex phenomenon involving social, cultural, economic and legal aspects. In this context, it is important to understand how cultural values, traditional norms and customary practices can be integrated into a legal framework that aims to protect individual rights, promote social welfare and address prostitution-related issues in a holistic way. This research utilizes a qualitative approach. The main focus of the research included respect for individual rights, active involvement of local communities in policy-making, customary mediation mechanisms, and the application of restorative justice. This study aims to evaluate the role of government agencies, non-governmental organizations, and civil society in promoting the integration of local values in a responsive national legal framework. The results show that the integration of local wisdom values in the development of progressive national laws can strengthen the effectiveness of public policies, increase community participation in the legal process, and promote social justice. The involvement of local communities can ensure that legal approaches to prostitution are not only legally effective but also in line with local socio-cultural values and realities. Restorative justice approaches and customary mediation can help create more sustainable solutions to the problem of prostitution, with a focus on healing the individuals and communities involved. In conclusion, the development of national laws that are progressive and responsive to prostitution by taking into account local wisdom is an important step in building a more just and sustainable society. Proper implementation of these principles by the government, legal institutions, and civil society can result in more comprehensive and effective policies in holistically addressing the challenges of prostitution.

Keywords : Prostitution, Local Wisdom, National Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji nilai kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional yang progresif dan responsif terhadap permasalahan prostitusi. Prostitusi merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya, norma-norma tradisional, dan praktik adat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan mengatasi permasalahan terkait prostitusi dengan cara yang holistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap hak individu, keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pembuatan kebijakan, mekanisme mediasi adat, dan penerapan keadilan restoratif. Studi ini bertujuan mengevaluasi peran lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mempromosikan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum nasional yang responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional yang progresif dapat memperkuat efektivitas kebijakan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum, serta mempromosikan keadilan sosial. Keterlibatan komunitas lokal dapat memastikan bahwa pendekatan hukum terhadap prostitusi tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai dan realitas sosial budaya setempat. Pendekatan keadilan restoratif dan mediasi adat dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menangani masalah prostitusi, dengan fokus pada pemulihan individu dan masyarakat yang terlibat. Kesimpulannya, pengembangan hukum nasional yang progresif dan responsif terhadap prostitusi dengan mempertimbangkan nilai kearifan lokal merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani tantangan prostitusi secara holistik.

Katakunci : Prostitusi, Kearifan Lokal, Hukum Nasional.

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN MEMPERHATIKAN HUKUM NASIONAL

**Rista Ika Puspitasari, Thifani Alfita Rahmania, Handika Fitrah Tyasmara, Subaidah Ratna
Juita, Sukimin**

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia.

¹ristaapuspitasari@gmail.com; ²thifanialfita4@gmail.com; ³tyasmarahandika@gmail.com

Abstract

This article analyzes the legitimacy of local wisdom values as the basis of criminal law in Indonesia. It also discusses the benefits and drawbacks of the application of such values. The study analyzes the principle of material legality and how the concepts of criminal pluralism and modern criminal paradigm are applied. One form of local wisdom is customs that have existed for a long time in Indonesia and coexist. One of the basic concepts of criminal popularity that emerged or survived the longest is the application of the punishment system in normative regulation (ordinary punishment). The enforceability and protection of criminal law sanctions greatly influences the lifestyle of indigenous people. This is due to the fact that criminal punishment promotes social harmony and balance, as well as unity among individuals and human groups, associations (institutions), and society as a whole. According to the philosophy of the Indonesian nation, one of the requirements for the realization of social justice is to incorporate values that have been ingrained in society as a reasonable punishment (normal punishment) into the new Criminal Code rules and become the foundation as formal law for the punishment system in Indonesia which is expected to cover all levels of society. This research uses secondary data in the form of library materials using normative juridical research methods.

Keywords: Customary Law; Local Wisdom; National Criminal Law.

Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang legitimasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Hal ini juga membahas manfaat dan kelemahan dari penerapan nilai-nilai tersebut. Studi ini menganalisis asas legalitas materiil dan bagaimana konsep pluralisme pidana dan paradigma pidana modern diterapkan. Salah satu bentuk kearifan lokal adalah kebiasaan yang telah ada sejak lama di Indonesia dan hidup berdampingan. Salah satu konsep dasar popularitas pidana yang muncul atau bertahan paling lama adalah penerapan sistem pemidanaan dalam regulasi normatif (pidana biasa). Keberlakuan dan perlindungan sanksi hukum pidana sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat adat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hukuman pidana meningkatkan keselarasan dan keseimbangan sosial, serta persatuan dan kesatuan di antara individu dan kelompok-kelompok manusia, perkumpulan-perkumpulan (lembaga), dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut falsafah bangsa Indonesia, salah satu syarat untuk terwujudnya keadilan sosial adalah memasukkan nilai-nilai yang telah mendarah daging dalam masyarakat sebagai hukuman yang wajar (hukuman normal) ke dalam aturan KUHP baru dan menjadi landasan sebagai hukum formil untuk sistem pemidanaan di Indonesia yang diharapkan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Katakunci: Hukum Adat; Hukum Pidana Nasional; Kearifan Lokal.

TRANSFORMASI HUKUM PERDATA MENUJU KEADILAN PROGRESIF PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Ade Reza Aulia, Putri Amelia Safina , Renandiny Oktrizal N, Supriyadi, Dharu Triasih

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
aderezaaulia40@gmail.com; 2 psafina224@gmail.com; 3 renandinyo@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of local wisdom in the transformation of Indonesian civil law towards progressive justice. Local wisdom is interpreted as the values, practices, and norms embraced by local communities in their daily lives. In Indonesia, local wisdom holds significant implications in the context of civil law, reflecting cultural pluralism and the need for inclusive justice. The background of this research lies in the necessity to understand and integrate local values into a progressive national legal system capable of addressing complex social and cultural dynamics. The research method employed is a literature review using a descriptive-analytical approach to explore various literature relevant to local wisdom and civil law in Indonesia. The novelty of this study lies in its emphasis on integrating local values within the framework of civil law, aiming to enhance progressive and responsive justice to societal needs. The findings indicate that local wisdom plays a crucial role in various aspects of civil law, such as religious courts, civil mediation, and customary agreements. The integration of these values not only strengthens social cohesion and harmony within communities but also supports more effective and inclusive legal protections. The implications of this study suggest that recognizing local wisdom in civil law development can significantly contribute to achieving holistic and sustainable justice in Indonesia.

Keywords: Civil Law; Integration Of Local Values; Progressive Justice; Civil Mediation; Religious Courts.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi kearifan lokal dalam transformasi hukum perdata Indonesia menuju keadilan progresif. Kearifan lokal diinterpretasikan sebagai nilai-nilai, praktik, dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, kearifan lokal memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum perdata, mencerminkan pluralitas budaya dan kebutuhan akan keadilan yang inklusif. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional yang progresif, yang mampu menjawab dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengeksplorasi berbagai literatur yang relevan dengan tema kearifan lokal dan hukum perdata di Indonesia. Novelty dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap integrasi nilai-nilai lokal dalam konteks hukum perdata, yang dapat meningkatkan keadilan progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memainkan peran krusial dalam berbagai aspek hukum perdata, seperti pengadilan agama, mediasi perdata, dan perjanjian adat. Integrasi nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial dan harmoni dalam masyarakat, tetapi juga mendukung upaya perlindungan hukum yang lebih efektif dan inklusif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pembangunan hukum perdata dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai keadilan yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

Katakunci: Hukum Perdata; Integrasi Nilai Lokal; Keadilan Progresif; Mediasi Perdata; Pengadilan Agama.

PERANAN RUMAH *RESTORATIVE JUSTICE* KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF

Ridzky Wahyu Nugroho, Hesti Nur Khotimah, Asri Damayanti,

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

¹ ridzkywahyu14@gmail.com; ² hestinurkhotimah0@gmail.com ; ³ asriidamayanti9@gmail.com

Abstract

Restorative justice is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crimes and also involves the role of the community in restoring the situation with an agreement to achieve peace. Restorative justice houses are a forum for implementing and maximizing restorative justice efforts in regulated criminal cases. in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. The urgency of this research is that society, in its development, realizes that the current model of justice is too time consuming, tiring and expensive, which in this case does not look at the interests of the parties. The type of research used is sociological juridical with analytical descriptive research specifications. Data will be collected through primary data by means of interviews at the Semarang District Prosecutor's Office and the data will be analyzed using qualitative data analysis methods. The purpose of this research is to determine the functions and constraints of the Semarang District Attorney's restorative justice house in handling criminal cases in the jurisdiction of the Semarang District Prosecutor's Office. The results of this research show that the Semarang District Prosecutor's Office has established 3 restorative justice houses in the jurisdiction of the Semarang District Prosecutor's Office and the obstacles faced is to reach an agreement between the parties to achieve peace. The conclusion is that the house of restorative justice as a means of implementing restorative justice as a necessity for the legal system in handling criminal cases is one of the solutions for resolving criminal cases for the community in order to restore conditions to achieve peace for the parties.

Keywords: Attorney; Peace; Restorative Justice House.

Abstrak

Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan dan juga melibatkan peran masyarakat untuk memulihkan keadaan dengan adanya kesepakatan untuk mencapai perdamaian. Rumah restorative justice menjadi suatu wadah dalam menerapkan dan maksimalkan upaya keadilan restoratif justice pada perkara pidana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Urgensi penelitian ini yaitu Masyarakat dalam perkembangannya menyadari bahwa model peradilan yang sekarang terlalu memakan waktu, melelahkan, dengan biaya mahal yang mana dalam hal ini tidak melihat kepentingan para pihak. Jenis penelitian yang digunakan ada yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data akan dikumpulkan melalui data primer dengan cara wawancara di ke Kejaksaan negeri Semarang serta data akan dianalisis melalui metode analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peraranaan dan kendala rumah restorative justice Kejaksaan Negeri Semarang dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Semarang sudah membentuk 3 Rumah restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Semarang dan kendala yang dihadapi adalah mencapai kesepakatan antar para pihak untuk mencapai perdamaian. Kesimpulannya adalah rumah restorative justice sebagai sarana implementasi dari keadilan restoratif sebagai keberharuan sistem hukum dalam penanganan perkara pidana menjadi salah satu solusi penyelesaian perkara tindak pidana bagi masyarakat dalam rangka memulihkan kondisi untuk mencapai perdamaian bagi para pihak.

Katakunci: Kejaksaan; Perdamaian; Rumah Restorative Justice.

IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL PADA HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Adelia Putri Riyanto, Muchamad Adi Prasetyo, A Heru Nuswanto

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
adeliaiii1405@gmail.com

Abstract

This research examines the application of local wisdom values in diplomatic and consular law from the perspective of progressive law. Through theoretical and empirical studies, this research explores how local cultural principles can be integrated into diplomatic and consular practices to strengthen international relations that are more humanist and inclusive. A progressive legal approach is used to assess and critique the existing legal framework, and propose changes that promote social justice, human rights protection and equality. The empirical juridical research method used in this article combines a legal approach and empirical data analysis to explore the implementation of local wisdom values in the context of diplomatic and consular law. The juridical approach is used to identify relevant legal frameworks and analyze how local wisdom values can be integrated into them substantially. Meanwhile, the empirical approach involves collecting qualitative data from case studies, interviews with diplomatic law practitioners, and document and policy analysis to examine the relevance and effectiveness of the implementation of local wisdom values in daily practice. This combination of methods made it possible to gain an in-depth understanding of the challenges, opportunities and impacts of using local wisdom values in the evolving context of international law. The results explain that local wisdom values, such as deliberation, gotong royong, and restorative justice, can enrich and strengthen diplomatic and consular legal mechanisms. The implementation of these values not only improves legal effectiveness, but also reflects a more comprehensive cultural identity in international relations. The results of this research are expected to make a real contribution to the development of diplomatic and consular law that is more adaptive and responsive to global socio-cultural dynamics.

Keywords: Implementation, Local Wisdom Value, Diplomatic Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum diplomatik dan konsuler dari sudut pandang hukum progresif. Melalui kajian teoritis dan empiris, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip budaya lokal dapat diintegrasikan ke dalam praktik diplomasi dan konsuler untuk memperkuat hubungan internasional yang lebih humanis dan inklusif. Pendekatan hukum progresif digunakan untuk menilai dan mengkritisi kerangka hukum yang ada, serta mengusulkan perubahan yang mendorong keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kesetaraan. Metode penelitian menggunakan Metode penelitian yuridis empiris yang digunakan dalam artikel ini menggabungkan pendekatan hukum dan analisis data empiris untuk menjelajahi implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks hukum diplomatik dan konsuler. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan dan menganalisis bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalamnya secara substansial. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data kualitatif dari studi kasus, wawancara dengan para praktisi hukum diplomatik, serta analisis dokumen dan kebijakan untuk menguji relevansi dan efektivitas implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik sehari-hari. Kombinasi metode ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang tantangan, peluang, dan dampak dari penggunaan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks hukum internasional yang terus berkembang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan restoratif, dapat memperkaya dan memperkuat mekanisme hukum diplomatik dan konsuler. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga mencerminkan identitas budaya yang lebih komprehensif dalam hubungan internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum diplomatik dan konsuler yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya global.

Katakunci : Implementasi, Nilai Kearifan Lokal, Hukum Diplomatik

IMUNITAS DIPLOMATIK DALAM IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL

Muhammad A'an Burhana, Dito Firmansyah, Sukimin

Fakultas Hukum Universitas Semarang

aanburhana16@gmail.com

Abstract

Diplomatic immunity is a principle of international law that grants diplomats and diplomatic staff immunity from the legal jurisdiction of the host country. This principle aims to ensure that diplomats can carry out their duties without the threat of interference, arrest or prosecution from the host country. Diplomatic immunity includes various privileges such as freedom from arrest or detention, as well as immunity from civil and criminal courts in the host country. Although diplomats have broad freedoms, they are expected to respect local laws, and the sending country is responsible for the actions of its diplomats. Diplomatic immunity is governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, which has been ratified by many countries in the world, and aims to facilitate harmonious and effective diplomatic relations between countries. This research reviews the implementation of local wisdom values in the context of diplomatic immunity. The focus is on how local cultural values can be integrated with the principles of diplomatic immunity to create a more inclusive and adaptive legal framework. Through a comparative legal approach and analysis of case studies, this research explores the ways in which principles of local wisdom, such as restorative justice and communal consensus, can enrich the understanding and implementation of diplomatic immunity in the context of international law. The research method used is the normative method using an approach that focuses on the normative aspects of law, namely the norms that regulate the procedure, substance, and application of law in various contexts. The results of the research provide new insights into how cultural values can strengthen and expand the application of diplomatic immunity, as well as improve relations between states in an increasingly complex global environment.

Keywords : Implementation, Local Wisdom, Diplomatic Immunity

Abstrak

Imunitas diplomatik adalah prinsip hukum internasional yang memberikan kekebalan hukum kepada diplomat dan staf diplomatik dari yurisdiksi hukum negara tuan rumah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa diplomat dapat melaksanakan tugasnya tanpa ancaman gangguan, penangkapan, atau penuntutan dari negara tuan rumah. Imunitas diplomatik mencakup berbagai hak istimewa seperti kebebasan dari penangkapan atau penahanan, serta kekebalan dari pengadilan sipil dan pidana di negara tuan rumah. Meskipun diplomat memiliki kebebasan yang luas, mereka diharapkan untuk menghormati hukum setempat, dan negara pengirim bertanggung jawab atas tindakan para diplomatnya. Imunitas diplomatik diatur oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang telah diratifikasi oleh banyak negara di dunia, dan bertujuan untuk memfasilitasi hubungan diplomatik yang harmonis dan efektif antara negara-negara. Penelitian ini mengulas tentang implementasi nilai kearifan lokal dalam konteks imunitas diplomatik. Fokusnya adalah pada bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip imunitas diplomatik untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Melalui pendekatan hukum komparatif dan analisis kasus-kasus studi, penelitian ini mengeksplorasi cara-cara di mana prinsip-prinsip kearifan lokal, seperti keadilan restoratif dan konsensus komunal, dapat memperkaya pemahaman dan implementasi imunitas diplomatik dalam konteks hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan metode normative dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada aspek normatif hukum, yaitu norma-norma yang mengatur tata cara, substansi, dan aplikasi hukum dalam berbagai konteks. Hasil penelitian memberikan pandangan baru terhadap bagaimana nilai-nilai budaya dapat memperkuat dan memperluas aplikasi imunitas diplomatik, serta meningkatkan hubungan antara negara-negara dalam lingkungan global yang semakin kompleks.

Katakunci : Implementasi, Nilai Kearifan Lokal, Imunitas Diplomatik

PERAN DUTA BESAR DAN MISI DIPLOMATIK PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Amirra Syafira, Naila Putri Amanda, Sukimin

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Indonesia

amirrrasyafira1@gmail.com

Abstract

Ambassadors and diplomatic missions play an important role in international relations, serving as the official representative of the sending country in the host country. Ambassadors, as heads of diplomatic missions, are responsible for strengthening bilateral relations, promoting national interests, and protecting citizens abroad. They take part in diplomatic negotiations and dialogues to resolve relevant political, economic, cultural, and social issues between the two countries. In addition, diplomatic missions, which include embassies and consulates, are tasked with managing a range of consular services such as visa issuance, assisting nationals in need, and facilitating trade and investment. By performing these functions, ambassadors and diplomatic missions become key elements in maintaining stability and building productive and peaceful relations between countries. This research examines the implementation of local wisdom values in the role of ambassadors and diplomatic missions through a normative juridical research method. The main focus is on normative analysis of international and national regulations governing the functions and responsibilities of ambassadors and diplomatic missions, and how local wisdom values can be integrated into the legal framework. By evaluating legal documents, diplomatic regulations, as well as academic literature, this research explores the ways in which local cultural principles, such as deliberation, gotong royong, and communal justice, can enrich and strengthen the conduct of diplomatic duties. The results show that the integration of local wisdom values not only enhances the effectiveness and credibility of diplomacy, but also supports the creation of more inclusive and sustainable international relations. The findings provide an important contribution to the development of diplomatic policies that are more adaptive and responsive to global socio-cultural dynamics.

Keywords: *Implementation, Local Wisdom, Ambassador, Diplomacy*

Abstrak

Duta besar dan misi diplomatik memainkan peran penting dalam hubungan internasional, berfungsi sebagai perwakilan resmi negara pengirim di negara tuan rumah. Duta besar, sebagai kepala misi diplomatik, bertanggung jawab untuk memperkuat hubungan bilateral, mempromosikan kepentingan nasional, dan melindungi warga negara di luar negeri. Mereka berperan dalam negosiasi dan dialog diplomatik untuk menyelesaikan isu-isu politik, ekonomi, budaya, dan sosial yang relevan antara kedua negara. Selain itu, misi diplomatik, yang mencakup kedutaan besar dan konsulat, bertugas mengelola berbagai layanan konsuler seperti penerbitan visa, membantu warga negara yang membutuhkan, dan memfasilitasi perdagangan dan investasi. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, duta besar dan misi diplomatik menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan membangun hubungan yang produktif dan damai antara negara-negara. Penelitian ini mengkaji implementasi nilai kearifan lokal dalam peran duta besar dan misi diplomatik melalui metode penelitian yuridis normatif. Fokus utama adalah analisis normatif terhadap peraturan-peraturan internasional dan nasional yang mengatur fungsi dan tanggung jawab duta besar serta misi diplomatik, serta bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum tersebut. Dengan mengevaluasi dokumen hukum, peraturan diplomatik, serta literatur akademik, penelitian ini mengeksplorasi cara-cara di mana prinsip-prinsip budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan komunal, dapat memperkaya dan memperkuat pelaksanaan tugas diplomatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya meningkatkan efektivitas dan kredibilitas diplomasi, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan diplomatik yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya global.

Kata Kunci : *Impelementasi, Kearifan Lokal, Duta Besar, Diplomatik*

PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES NEGOSIASI DAN PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Arya Viptri P, Supriyadi, Dharu Triasih

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
andellanoor@gmail.com

Abstract

The process of negotiating and forming international agreements is a complex one that involves various actors and diplomatic moves. Starting with the identification of an issue or need that requires international cooperation, countries then send delegations to negotiate. Negotiations are often conducted through international conferences or bilateral and multilateral meetings, where diplomats and technical experts discuss to reach agreement on the content and terms of the agreement. During this process, compromise and consensus are essential to bring different interests together. Once the draft agreement is agreed upon, the document is signed by representatives of the countries involved, demonstrating their commitment to abide by the agreed terms. However, signing alone does not make the agreement legally effective. The treaty must be ratified by the legislature or competent authority in each country. Upon ratification, the treaty comes into force and becomes part of international law binding on the signatory countries. This research discusses the application of local wisdom values in the negotiation process and the formation of international agreements through normative juridical research methods. This research aims to analyze how local cultural values, such as deliberation, gotong royong, and communal justice, can be integrated into the international legal framework governing the process of negotiation and treaty formation. By evaluating relevant international regulations, legal documents, and academic literature, this research identifies the potential contribution of local wisdom values in enhancing effectiveness, fairness, and inclusiveness in international negotiations. The results show that the integration of indigenous values can enrich negotiation dynamics, facilitate the formation of more balanced agreements, and strengthen relations between countries. These findings make an important contribution to the development of legal approaches that are more responsive to cultural diversity in the process of diplomacy and international treaty formation.

Keywords: Implementation, Local Wisdom, International Treaties

Abstrak

Proses negosiasi dan pembentukan perjanjian internasional adalah tahapan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan langkah diplomatik. Dimulai dengan identifikasi isu atau kebutuhan yang memerlukan kerjasama internasional, negara-negara kemudian mengirimkan delegasi untuk berunding. Negosiasi seringkali dilakukan melalui konferensi internasional atau pertemuan bilateral dan multilateral, di mana para diplomat dan ahli teknis berdiskusi untuk mencapai kesepakatan isi dan ketentuan perjanjian. Selama proses ini, kompromi dan konsensus sangat penting untuk menyatukan kepentingan yang berbeda. Setelah rancangan perjanjian disepakati, dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan negara-negara yang terlibat, menunjukkan komitmen mereka mematuhi ketentuan yang disepakati. Namun, penandatanganan saja tidak membuat perjanjian tersebut berlaku secara hukum. Perjanjian harus diratifikasi oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang di masing-masing negara. Setelah ratifikasi, perjanjian tersebut mulai berlaku dan menjadi bagian dari hukum internasional yang mengikat negara-negara penandatangan. Penelitian ini membahas penerapan nilai kearifan lokal dalam proses negosiasi dan pembentukan perjanjian internasional melalui metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan komunal, dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum internasional yang mengatur proses negosiasi dan pembentukan perjanjian. Dengan mengevaluasi peraturan-peraturan internasional, dokumen hukum, dan literatur akademik yang relevan, penelitian ini mengidentifikasi potensi kontribusi nilai-nilai kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas, keadilan, dan inklusivitas dalam perundingan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memperkaya dinamika

negosiasi, memfasilitasi pembentukan perjanjian yang lebih berimbang, serta memperkuat hubungan antarnegara. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya dalam proses diplomasi dan pembentukan perjanjian internasional.

Katakunci : Penerapan, Kearifan Lokal, Perjanjian Internasional

PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM RATIFIKASI, IMPLEMENTASI DAN PENGHENTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Dian Puspita Wahyu N.T, Nela Rosita Bunga Teju, Dharu Triasih

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

dianpuspita.mila@gmail.com

Abstrak

Ratification, implementation and termination of international agreements are important stages in the life cycle of a treaty. Once an international treaty is signed, the ratification process is carried out by the countries involved. This ratification process usually involves the legislature or competent authority in each country, which will review and approve the agreement. Once ratified, the implementation stage begins, where signatory states take steps to ensure that the treaty's provisions are implemented in their domestic laws and practices. Termination of an international treaty can occur through various means, such as the expiration of a set period of time, a mutual agreement among the signatory states to terminate the treaty, or a breach of the treaty's provisions by one of the parties. This termination must be done by formal notice and follow an agreed mechanism to ensure that the termination is orderly and in accordance with international law. This research examines the application of local wisdom values in the process of ratification, implementation and termination of international treaties through normative juridical methods. By analyzing various international regulations, national laws, as well as related legal documents, this study aims to evaluate how local cultural principles, such as deliberation, gotong royong, and restorative justice, can be integrated in the legal framework governing the life cycle of international agreements. The research found that the application of local wisdom values can enhance the legitimacy and effectiveness of international law by strengthening community participation, improving implementation mechanisms, and regulating treaty termination in a fair and inclusive manner. These findings are expected to make a significant contribution to the development of international law that is more adaptive and responsive to socio-cultural dynamics, as well as supporting the creation of more harmonious and sustainable international relations.

Keywords : Local Wisdom, Ratification, International Treaties

Abstrak

Ratifikasi, implementasi, dan penghentian perjanjian internasional adalah tahapan penting dalam siklus hidup sebuah perjanjian. Setelah perjanjian internasional ditandatangani, proses ratifikasi dilakukan oleh negara-negara yang terlibat. Proses ratifikasi ini biasanya melibatkan badan legislatif atau otoritas yang berwenang di masing-masing negara, yang akan meninjau dan menyetujui perjanjian tersebut. Setelah diratifikasi, tahap implementasi dimulai, di mana negara-negara penandatanganan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan perjanjian diterapkan dalam hukum dan praktik domestik mereka. Penghentian perjanjian internasional dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, kesepakatan bersama di antara negara-negara penandatanganan untuk mengakhiri perjanjian, atau pelanggaran ketentuan perjanjian oleh salah satu pihak. Penghentian ini harus dilakukan dengan pemberitahuan resmi dan mengikuti mekanisme yang disepakati untuk memastikan bahwa penghentian berjalan dengan tertib dan sesuai dengan hukum internasional. Penelitian ini mengkaji penerapan nilai kearifan lokal dalam proses ratifikasi, implementasi, dan penghentian perjanjian internasional melalui metode yuridis normatif. Dengan menganalisis berbagai peraturan internasional, undang-undang nasional, serta dokumen-dokumen hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan restoratif, dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang mengatur siklus hidup perjanjian internasional. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum internasional dengan memperkuat partisipasi masyarakat, memperbaiki mekanisme implementasi, dan mengatur penghentian perjanjian secara adil dan inklusif. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya, serta mendukung terciptanya hubungan internasional yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Katakunci : Kearifan Lokal, Ratifikasi, Perjanjian Internasional

PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KONVENSI JENEWA DAN HUKUM KONFLIK BERSENJATA

Christian Kevin Vieri Wibisono, Jaden Audrey, wafda Vivid Izziyana, Arief Budiono

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
jadenaudrey5@gmail.com

Abstract

The Geneva Conventions and the law of armed conflict are key pillars in international law governing the conduct of states and combatants during war and armed conflict. The Geneva Conventions, consisting of four main treaties adopted in 1949 and their additional protocols, set standards of protection for those who are not or no longer involved in hostilities, such as civilians, medical personnel, and prisoners of war. The Convention aims to reduce human suffering during conflict by establishing basic rights and protections. These principles are applied to ensure that military operations are conducted humanely and minimize negative impacts on civilian populations and infrastructure. Through the Geneva Conventions and the law of armed conflict, the international community strives to maintain humanitarian values even in the midst of war situations, promote accountability, and provide legal protection to vulnerable individuals during conflict. This research examines the application of local wisdom values in the Geneva Conventions and the law of armed conflict through empirical juridical methods. The main focus of this research is to explore how local cultural principles, such as gotong royong, deliberation, and restorative justice, can be integrated in the international legal framework governing the protection of victims of armed conflict. This research method is empirical juridical. The results show that the integration of local wisdom values can strengthen the implementation of international humanitarian law, increase protection for victims, and improve conflict resolution mechanisms. These findings provide an important contribution to the development of a legal approach that is more contextual and responsive to local socio-cultural dynamics, and supports the creation of more humanist and inclusive protection in armed conflict.

Keywords : *Local Wisdom, Geneva Conventions, Armed Conflict*

Abstrak

Konvensi Jenewa dan hukum konflik bersenjata adalah pilar utama dalam hukum internasional yang mengatur perilaku negara dan kombatan selama perang dan konflik bersenjata. Konvensi Jenewa, terdiri dari empat perjanjian utama yang diadopsi pada tahun 1949 dan protokol tambahannya, menetapkan standar perlindungan bagi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang. Konvensi ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia selama konflik dengan menetapkan hak dan perlindungan dasar. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa operasi militer dilakukan secara manusiawi dan meminimalkan dampak negatif terhadap populasi sipil dan infrastruktur. Melalui Konvensi Jenewa dan hukum konflik bersenjata, komunitas internasional berusaha untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan bahkan di tengah situasi perang, mempromosikan akuntabilitas, dan memberikan perlindungan hukum kepada individu yang rentan selama konflik. Penelitian ini mengkaji pengaplikasian nilai kearifan lokal dalam Konvensi Jenewa dan hukum konflik bersenjata melalui metode yuridis empiris. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan restoratif, dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan korban konflik bersenjata. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memperkuat implementasi hukum humaniter internasional, meningkatkan perlindungan bagi korban, dan memperbaiki mekanisme resolusi konflik. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya lokal, serta mendukung terciptanya perlindungan yang lebih humanis dan inklusif dalam konflik bersenjata

Katakunci : Kearifan Lokal , Konvensi Jenewa, Konflik Bersenjata

PERLINDUNGAN TERHADAP KOMBATAN DAN NON-KOMBATAN PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL

Bintang Sukma Putra D, Karim Wahyu Aji, Wafda Vivid Izziyana, Amri Panahatan Sihotang
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
karimmb112@gmail.com

Abstract

The protection of combatants and non-combatants is a fundamental principle in international humanitarian law, which aims to reduce suffering during armed conflict. Combatants, i.e. members of lawful armed forces participating in hostilities, are protected by the Geneva Conventions and their additional protocols when they are wounded, sick, or become prisoners of war. This protection includes the right to be treated humanely, receive medical care, and be free from torture or degrading treatment. Non-combatants, including civilians, medical personnel, and humanitarian workers, are afforded special protection because they are not involved in hostilities. International humanitarian law requires parties to a conflict to always distinguish between combatants and non-combatants and take all necessary measures to avoid civilian casualties and damage to civilian infrastructure. Attacks aimed directly at non-combatants or using weapons that cannot distinguish between combatants and non-combatants are strictly prohibited. Through these principles, international humanitarian law seeks to preserve human dignity and minimize the adverse effects of war on the most vulnerable individuals. This research utilizes the normative juridical method. The main focus is on analyzing the international and national legal frameworks governing the protection of combatants and non-combatants, and how local cultural values, such as gotong royong, deliberation, and restorative justice, can be integrated into them. The results show that the application of local wisdom values can enrich existing legal approaches, strengthen protection mechanisms, and create a more inclusive and humane environment for combatants and non-combatants. These findings provide an important contribution to the development of protection laws that are more adaptive and responsive to local socio-cultural contexts, and support the creation of sustainable peace and security.

Keywords: Local Wisdom, Protection, Combatants and Non-Combatants

Abstrak

Perlindungan terhadap kombatan dan non-kombatan adalah prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan selama konflik bersenjata. Kombatan, yaitu anggota angkatan bersenjata yang sah yang berpartisipasi dalam permusuhan, dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya ketika mereka terluka, sakit, atau menjadi tawanan perang. Perlindungan ini mencakup hak untuk diperlakukan dengan manusiawi, menerima perawatan medis, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Non-kombatan, termasuk warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan, diberikan perlindungan khusus karena mereka tidak terlibat dalam permusuhan. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan non-kombatan dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghindari korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil. Serangan yang ditujukan secara langsung terhadap non-kombatan atau menggunakan senjata yang tidak dapat membedakan antara kombatan dan non-kombatan dilarang keras. Melalui prinsip-prinsip ini, hukum humaniter internasional berupaya untuk menjaga martabat manusia dan meminimalkan dampak buruk perang pada individu yang paling rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Fokus utama adalah analisis terhadap kerangka hukum internasional dan nasional yang mengatur perlindungan bagi kombatan dan non-kombatan, serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan restoratif, dapat diintegrasikan ke dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat memperkaya pendekatan hukum yang ada, memperkuat mekanisme perlindungan, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan humanis bagi kombatan dan non-kombatan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum perlindungan yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks sosial-budaya lokal, serta mendukung terciptanya perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.

Katakunci : Kearifan Lokal, Perlindungan, Kombatan Dan Non Kombatan

PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KEJAHATAN PERANG DAN TRIBUNAL INTERNASIONAL

Amalia Sintiya Dewi, Wahyu Rismadiyanti, Wafda Vivid Izziyana, Amri Panahatan Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
wahyurismadiyanti@gmail.com

Abstract

War crimes are acts that violate international humanitarian law during armed conflict, including attacks on civilians, disproportionate use of force, torture, and inhumane treatment of prisoners of war. To ensure accountability and justice, international tribunals, such as the International Criminal Court (ICC), are established to investigate, prosecute and punish individuals responsible for war crimes, crimes against humanity and genocide. These tribunals serve as independent legal bodies that ensure that perpetrators of war crimes do not escape accountability, even if they are outside the jurisdiction of their own country. Through this judicial process, the international community seeks to uphold international humanitarian law, prevent impunity, and provide justice to victims directly affected by war crimes. This research examines the application of local wisdom values in the context of war crimes and international tribunals using normative juridical methods. The main focus is on normative analysis of international and national legal regulations governing the handling of war crimes, as well as how local cultural values, such as deliberation, mutual cooperation, and restorative justice, can be integrated into the judicial process in international tribunals. By evaluating various legal documents, international conventions, and academic literature, this research aims to identify the potential contribution of local wisdom values in enriching existing legal approaches, enhancing the legitimacy and effectiveness of international tribunals, and promoting more humanist and inclusive justice. The results show that the integration of indigenous values can strengthen justice mechanisms, increase community participation, and support sustainable conflict resolution. These findings make an important contribution to the development of international law that is more adaptive and responsive to global socio-cultural dynamics.

Keywords: Local Wisdom; War Crimes; International Tribunal.

Abstrak

Kejahatan perang adalah tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan, tribunal internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), didirikan untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Tribunal ini berfungsi sebagai badan hukum independen yang memastikan bahwa pelaku kejahatan perang tidak luput dari pertanggungjawaban, meskipun mereka berada di luar yurisdiksi negara mereka sendiri. Melalui proses peradilan ini, komunitas internasional berusaha untuk menegakkan hukum humaniter internasional, mencegah impunitas, dan memberikan keadilan kepada korban yang terkena dampak langsung dari kejahatan perang. Penelitian ini mengkaji pengaplikasian nilai kearifan lokal dalam konteks kejahatan perang dan tribunal internasional menggunakan metode yuridis normatif. Fokus utama adalah analisis normatif terhadap peraturan-peraturan hukum internasional dan nasional yang mengatur penanganan kejahatan perang, serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan restoratif, dapat diintegrasikan ke dalam proses peradilan di tribunal internasional. Dengan mengevaluasi berbagai dokumen hukum, konvensi internasional, serta literatur akademik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kontribusi nilai-nilai kearifan lokal dalam memperkaya pendekatan hukum yang ada, meningkatkan legitimasi dan efektivitas tribunal internasional, serta mempromosikan keadilan yang lebih humanis dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat memperkuat mekanisme peradilan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya global.

Katakunci : Kearifan Lokal; Kejahatan Perang; Tribunal Internasional.

**PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL
DALAM DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA**

Muhammad Farel Akmal, Farhan Fakhryzi Saputra, B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

usmfarel@gmail.com

Abstract

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a landmark document in the history of international law adopted by the United Nations General Assembly in 1948. It sets universal standards that recognize the fundamental rights and dignity of every individual regardless of race, religion or nationality. The Declaration does not have the force of directly binding law, but it has been the basis for the formation of international human rights law, including conventions and other legal instruments that bind states to protect and promote human rights. By underlining these universal principles, the UDHR plays an important role in promoting the recognition, respect and protection of human rights around the world. This research examines the application of local wisdom values in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). The purpose of the study is to explore how local cultural principles, such as deliberation, gotong royong, and communal justice, can be integrated in the implementation and promotion of human rights as stipulated in the UDHR. Using empirical juridical method and qualitative data collection. The results show that the application of local wisdom values can strengthen the respect and protection of human rights, increase community participation in decision-making processes, and improve conflict resolution mechanisms. The findings provide an important contribution to the development of a more inclusive human rights approach that is responsive to the local socio-cultural context, and supports the creation of sustainable justice and prosperity for all individuals.

Keywords: Local Wisdom, Declaration, Human Rights

Abstrak

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) adalah dokumen penting dalam sejarah hukum internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini menetapkan standar universal yang mengakui hak-hak fundamental dan martabat setiap individu tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan. Deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung, namun telah menjadi dasar bagi pembentukan hukum internasional tentang hak asasi manusia, termasuk konvensi dan instrumen hukum lainnya yang mengikat negara-negara untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia. Dengan menggarisbawahi prinsip-prinsip universal ini, UDHR berperan penting dalam mendorong pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Penelitian ini mengkaji pengaplikasian nilai kearifan lokal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan komunal, dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam DUHAM. Menggunakan metode yuridis empiris dan pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai kearifan lokal dapat memperkuat penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta memperbaiki mekanisme resolusi konflik. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendekatan hak asasi manusia yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks sosial-budaya lokal, serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh individu.

Katakunci : Kearifan Lokal, Deklarasi, Hak Asasi manusia

PENGAPLIKASIAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KONVENSI INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Yaser, Nurul Hidayatulloh, B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

j33442117@gmail.com

Abstract

International Human Rights Conventions are agreements between countries that aim to protect and promote human rights at the international level. These conventions usually bind signatory countries to take concrete steps to protect the rights recognized in the document. Examples of well-known international conventions include the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), the Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), as well as the Convention on the Rights of the Child (CRC). States that ratify the conventions are expected to comply with the provisions set out in the conventions and report on their progress in implementing them to the appropriate committees or bodies. As such, international human rights conventions play a key role in strengthening the human rights protection system at the global level and promoting universal values of human dignity and equality. The research method used is the normative juridical method. The main focus is an analysis of the international legal framework governing human rights, as well as how local cultural values, such as deliberation, gotong royong, and communal justice, can be integrated into it. The research evaluates various legal documents, regulations, and academic literature to identify the potential contribution of local wisdom values in strengthening and enriching the implementation of international conventions on human rights. The results show that the integration of local wisdom values can increase the effectiveness of human rights protection, strengthen community participation in human rights processes, and create a more inclusive and adaptive approach to the local socio-cultural context. The findings make an important contribution to the development of international legal frameworks that are more responsive and sustainable, and support the creation of justice and well-being for all individuals.

Keywords: Local Wisdom, International Conventions, Human Rights

Abstrak

Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia merupakan perjanjian antarnegara yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia di tingkat internasional. Konvensi ini biasanya mengikat negara-negara penandatangan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak yang diakui dalam dokumen tersebut. Contoh konvensi internasional terkenal termasuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), serta Konvensi tentang Hak Anak-anak (CRC). Negara-negara yang meratifikasi konvensi diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut dan melaporkan kemajuan mereka dalam menerapkannya kepada komite-komite atau badan-badan yang sesuai. Dengan demikian, konvensi internasional hak asasi manusia memainkan peran kunci dalam memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di tingkat global dan mempromosikan nilai-nilai universal mengenai martabat manusia dan kesetaraan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Fokus utama adalah analisis terhadap kerangka hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan komunal, dapat diintegrasikan ke dalamnya. Penelitian ini mengevaluasi berbagai dokumen hukum, peraturan, dan literatur akademik untuk mengidentifikasi potensi kontribusi nilai-nilai kearifan lokal dalam memperkuat dan memperkaya implementasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi manusia, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses hak asasi manusia, serta menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya lokal. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kerangka hukum internasional yang lebih responsif dan berkelanjutan, serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu.

Katakunci : Kearifan Lokal, Konvensi Internasional, Hak Asasi Manusia

AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PERAN MAHKAMAH HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Misgiarahma Aprilia, Aulia Bintang.R., Ahmad Riou .I., B Rini Heryanti, Dhian Indah Astanti
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
misgiarahmaap@gmail.com

Abstract

The role of the International Court of Human Rights is critical in upholding universal human rights standards on a global level. These tribunals, such as the European Court of Human Rights (ECHR) or the International Criminal Court (ICC), are tasked with adjudicating cases that violate human rights in accordance with relevant international conventions and legal instruments. Through a fair and transparent judicial process, the court ensures that perpetrators of human rights violations are punished and victims are given justice. In addition, the judgments and decisions produced by the tribunal play an important role in developing interpretations of international law on human rights, creating precedents that influence the future actions of governments and international institutions. The purpose of this research is to examine the actualization of local wisdom values in the role of the International Human Rights Court. The research method used is normative juridical. The focus of this research is how local wisdom values can be integrated and applied in the decisions of the International Human Rights Court. The results show that the value of local wisdom has an important role in enriching and complementing the perspective of international law, especially in the context of human rights protection. Through normative juridical analysis, it is found that the integration of local wisdom values can increase the legitimacy and acceptance of the Court's decisions by various international communities. In addition, this research also highlights the challenges and obstacles that may be faced in the integration process, and provides recommendations for the development of more inclusive and sustainable policies.

Keywords: Local wisdom; Court; Human rights

Abstrak

Peran Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional sangat penting dalam menegakkan standar universal mengenai hak asasi manusia di tingkat global. Mahkamah ini, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights/ECHR) atau Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), bertugas mengadili kasus-kasus yang melanggar hak-hak asasi manusia sesuai dengan konvensi dan instrumen hukum internasional yang relevan. Melalui proses peradilan yang adil dan transparan, mahkamah ini memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia dihukum dan korban diberikan keadilan. Selain itu, putusan dan keputusan yang dihasilkan oleh mahkamah ini memainkan peran penting dalam mengembangkan interpretasi hukum internasional tentang hak asasi manusia, menciptakan preseden yang mempengaruhi tindakan pemerintah dan lembaga internasional di masa depan. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji aktualisasi nilai kearifan lokal dalam peran Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Fokus penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dan diaplikasikan dalam putusan-putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal memiliki peran penting dalam memperkaya dan melengkapi perspektif hukum internasional, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Melalui analisis yuridis normatif, ditemukan bahwa integrasi nilai kearifan lokal dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan putusan-putusan Mahkamah oleh berbagai komunitas internasional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses integrasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Katakunci : Kearifan lokal; Mahkamah; Hak asasi Manusia.

AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)

Gustada Putra Awala, Muhammad Sulthon Fahmi, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

gustada99@gmail.com

Abstract

The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is an international treaty that regulates various legal aspects related to the use and utilization of seas and oceans around the world. UNCLOS came into force in 1994, establishing the rights and obligations of states in relation to international waters, including exclusive fisheries zones, exclusive economic zones, as well as the right of peaceful passage and the determination of shipping lanes on the high seas. It also regulates the delimitation of sea and oceanic areas between bordering states, and affirms the right of island states to maintain their sovereignty over their territorial waters. In addition, UNCLOS also provides for the settlement of international disputes relating to the interpretation or application of the convention, including international arbitration tribunals or the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Thus, UNCLOS becomes the main foundation in regulating relations between states regarding the use of seas and oceans, ensuring justice, stability and sustainable management of global marine resources. The purpose of this study is to explore the actualization of local wisdom values in the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Using normative research method. The main focus of this research is to identify and examine how local wisdom values can be integrated into the UNCLOS legal framework to achieve more sustainable and inclusive management and utilization of marine resources. The results show that the integration of local wisdom values can enrich and strengthen the existing principles in UNCLOS, as well as increase the effectiveness and legitimacy of its implementation. In addition, this research identifies challenges and barriers and provides recommendations for policies that are more responsive to the local context of coastal communities' needs.

Keywords: Local Wisdom; UN Convention; Law of the Sea.

Abstrak

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan laut dan samudra di seluruh dunia. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994, menetapkan hak dan kewajiban negara terkait dengan perairan internasional, termasuk zona perikanan eksklusif, zona ekonomi eksklusif, serta hak lintas damai dan penentuan jalur pelayaran di laut lepas. Serta mengatur penentuan batas wilayah laut dan samudra antara negara-negara yang berbatasan laut, dan menegaskan hak negara-negara kepulauan untuk menjaga kedaulatan mereka atas perairan teritorial mereka. Selain itu, UNCLOS juga mengatur penyelesaian sengketa internasional berkaitan dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini, termasuk pengadilan arbitrase internasional atau Pengadilan Laut Internasional (International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS). Dengan demikian, UNCLOS menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antar-negara terkait penggunaan laut dan samudra, memastikan keadilan, stabilitas, dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut global. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aktualisasi nilai kearifan lokal dalam implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Menggunakan metode penelitian normative. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengkaji bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum UNCLOS untuk mencapai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai kearifan lokal dapat memperkaya dan memperkuat prinsip yang ada dalam UNCLOS, serta meningkatkan efektivitas dan legitimasi penerapannya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks lokal kebutuhan masyarakat pesisir.

Katakunci : Kearifan Lokal; Konvensi PBB; Hukum Laut.

AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN

Rendy Setyo Prakoso, Shidqi Atha Yassar, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Univeristas Semarang, Indonesia
rendysetyo74@gmail.com

Abstract

The Exclusive Economic Zone (EEZ) and the Continental Shelf are two important concepts in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) that govern the rights of states in relation to the management of resources in marine waters. The Exclusive Economic Zone is an area of sea that lies beyond a country's territorial waters, which can extend up to 200 nautical miles from the coastal baseline. The Continental Shelf, on the other hand, refers to the continental seabed that is a geological continuation of the coastal state's land mass, and extends to a greater distance from the coastal baseline. These two concepts, Exclusive Economic Zone and Continental Shelf, serve to facilitate sustainable management of marine resources, promote international cooperation, and foster peace and stability in the global ocean region. The purpose of this research is to explore the actualization of local wisdom values in the management of the Exclusive Economic Zone (EEZ) and continental shelf. The research method uses normative research method. The main focus of this research is how local wisdom values can be integrated into the national and international legal frameworks governing the EEZ and continental shelf, to achieve sustainable and equitable management of marine resources. The results show that local wisdom values have an important role in enriching and strengthening existing legal principles, as well as increasing the effectiveness and legitimacy of their application. The integration of these values can also help address the challenges faced in EEZ and continental shelf management, such as conflicts of interest and unsustainable resource utilization. This research also provides recommendations for policies that are more inclusive and responsive to local contexts, thereby supporting the sustainability and well-being of coastal communities.

Keywords: Local Wisdom; Continental Shelf; Exclusive Economic Zone

Abstrak

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen adalah dua konsep penting dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengatur hak-hak negara terkait dengan pengelolaan sumber daya di perairan laut. Zona Ekonomi Eksklusif adalah area laut yang terletak di luar perairan teritorial suatu negara, yang dapat mencapai jarak hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Landas Kontinen, sebaliknya, merujuk pada dasar laut benua yang merupakan kelanjutan geologis dari daratan negara pesisir, dan terbentang hingga jarak lebih jauh dari garis pangkal pantai. Kedua konsep ini, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, berfungsi untuk memfasilitasi pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, mempromosikan kerjasama internasional, dan mendorong perdamaian serta stabilitas di wilayah laut global. Tujuan Penelitian ini untuk mengeksplorasi aktualisasi nilai kearifan lokal dalam pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normative. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur ZEE dan landas kontinen, untuk mencapai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal memiliki peran penting dalam memperkaya dan memperkuat prinsip-prinsip hukum yang ada, serta meningkatkan efektivitas dan legitimasi penerapannya. Integrasi nilai-nilai ini juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ZEE dan landas kontinen, seperti konflik kepentingan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Katakunci : Kearifan Lokal; Landas Kontinen; Zona Ekonomi Eksklusif.

AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM SENGKETA MARITIM DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA

Azka Seftia Nenda, Ananke Olga Prihastiw, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
anankeolga@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the actualization of local wisdom values in maritime dispute resolution. Normative research methods are used to analyze various legal documents, laws and regulations, and relevant literature. Normative research method is an approach that focuses on the analysis and interpretation of applicable legal rules. This method aims to examine legal norms contained in legislation, doctrine, and court decisions. In normative research, researchers review primary and secondary legal materials, such as laws, constitutions, international treaties, legal journals, and other literature related to the topic under study. The main purpose of this method is to understand, explain, and formulate legal principles that can be applied in practice. Through this approach, researchers can evaluate the effectiveness and appropriateness of a rule of law, as well as provide recommendations for the improvement or development of better laws. The main focus of this research is to identify and evaluate how local wisdom values can be integrated into maritime dispute resolution mechanisms regulated by national and international law. The results show that local wisdom values can enrich the dispute resolution process by offering more contextualized and locally appropriate perspectives and approaches. The integration of these values can also increase the legitimacy and effectiveness of maritime dispute resolution, and help create more sustainable solutions that are accepted by all parties involved. This research provides recommendations for the development of more inclusive and locally-responsive dispute resolution policies and mechanisms to support maritime peace and stability in the region.

Keywords: Local Wisdom; Dispute; Maritime

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji aktualisasi nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa maritim. Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Metode penelitian normatif adalah pendekatan yang berfokus pada analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian normatif, peneliti melakukan telaah terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, konstitusi, traktat internasional, jurnal hukum, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi keefektifan dan kesesuaian suatu aturan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan hukum yang lebih baik. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa maritim yang diatur oleh hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal dapat memperkaya proses penyelesaian sengketa dengan menawarkan perspektif dan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal. Integrasi nilai-nilai ini juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas penyelesaian sengketa maritim, serta membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kearifan lokal, guna mendukung perdamaian dan stabilitas maritim di berbagai kawasan.

Katakunci : Kearifan Lokal; Sengketa; Maritim

ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (*WORLD TRADE ORGANIZATION*) PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Afiqoh Dwi Anggraeni, Zahra Karima, Dhian Indah Astanti , Dharu Triasih

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
afiqohanggraenii@gmail.com

Abstract

The World Trade Organization (WTO) is the international body responsible for regulating trade rules between its member countries. Established in 1995 as the successor to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the WTO aims to facilitate free, fair, and open international trade. The WTO enforces multilateral agreements that regulate various aspects of trade such as tariffs, non-tariff barriers, and trade policies. In addition, the WTO also provides a dispute settlement mechanism to handle trade disputes between member countries, with the aim of ensuring that international trade rules are respected and enforced fairly. The purpose of this study is to explore the actualization of local wisdom values within the framework of the World Trade Organization (WTO). This research uses normative juridical research methods, this research analyzes various legal documents, international agreements, as well as literature relevant to the Actualization of Local Wisdom Values in the World Trade Organization (WTO). The main focus of this research is to identify and evaluate how local wisdom values can be integrated into WTO policies and regulations to create a fairer and more sustainable international trading system. The results show that local wisdom values have great potential to enrich international trade principles by taking into account aspects of social, environmental, and cultural justice. The integration of these values can increase the legitimacy and acceptance of WTO policies in various countries, especially in developing countries. This study also identifies challenges and obstacles in the process of integrating local wisdom values, and provides recommendations for the development of policies that are more inclusive and responsive to local contexts, so as to support sustainable economic growth and global prosperity.

Keywords: Actualization, Local Wisdom, World Trade Organization

Abstrak

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) adalah badan internasional yang bertanggung jawab mengatur aturan perdagangan antara negara-negara anggotanya. Didirikan pada tahun 1995 sebagai penerus General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), WTO bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang bebas, adil, dan terbuka. WTO memberlakukan perjanjian-perjanjian multilateral yang mengatur berbagai aspek perdagangan seperti tarif, hambatan non-tarif, dan kebijakan perdagangan. Selain itu, WTO juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menangani perselisihan perdagangan antara negara-negara anggota, dengan tujuan untuk memastikan bahwa aturan perdagangan internasional dihormati dan diberlakukan secara adil. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi aktualisasi nilai kearifan lokal dalam kerangka kerja Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum, perjanjian internasional, serta literatur yang relevan dengan Aktualisasi Nilai kearifan lokal dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan regulasi WTO untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal memiliki potensi besar untuk memperkaya prinsip-prinsip perdagangan internasional dengan memperhatikan aspek keadilan sosial, lingkungan, dan budaya. Integrasi nilai-nilai ini dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan kebijakan WTO di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses integrasi nilai kearifan lokal, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan global.

Kata Kunci : Aktualisasi, Kearifan Lokal, Organisasi Perdagangan Dunia

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI DALAM PERWUJUDAN NILAI KEARIFAN LOKAL

Afitya Nur Asyah, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
afityanurasyah@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the actualization of local wisdom values in the context of international trade and investment. Using normative juridical research method. The main focus of this research is to identify and evaluate how local wisdom values can be integrated into international trade and investment policies and regulations to create a fairer and more sustainable system. The results explain that local wisdom values can enrich the principles of international trade and investment by taking into account aspects of social, environmental and cultural justice. The research identifies challenges and obstacles that may be faced in the integration process, and provides recommendations for policy development that is more inclusive and responsive to local contexts, to support sustainable economic growth and global prosperity. The research also provides recommendations for the development of policies that are more inclusive and responsive to local contexts. Such recommendations may include strengthening dialog among stakeholders, facilitating knowledge and technology exchange, and adopting approaches that take into account cultural and social diversity in the integration process. In addition, the study suggests enhancing the capacity and skills of local communities in the face of global economic change, as well as promoting sustainable and inclusive investment to support sustainable economic growth and broader global prosperity. As such, these recommendations are expected to help create a conducive environment for sustainable integration and benefit all parties involved.

Keywords: Local Wisdom; Trade; Investment.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi aktualisasi nilai kearifan lokal dalam konteks perdagangan internasional dan investasi. Menggunakan metode penelitian yuridis normative. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan regulasi perdagangan internasional serta investasi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa nilai kearifan lokal dapat memperkaya prinsip-prinsip perdagangan dan investasi internasional dengan memperhatikan aspek keadilan sosial, lingkungan, dan budaya. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses integrasi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan global. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal. Rekomendasi tersebut mungkin mencakup memperkuat dialog antar-pihak terkait, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta mengadopsi pendekatan yang memperhitungkan keberagaman budaya dan sosial dalam proses integrasi. Selain itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan ekonomi global, serta mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan global secara lebih luas. Dengan demikian, rekomendasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi integrasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Katakunci : Kearifan Lokal; Perdagangan; Investasi.

PENGADILAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE/ INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM PERWUJUDAN NILAI KEARIFAN LOKAL

Moh. Yunus, Wafda vivid Izziyana, Andhika Yuli Rimbawan

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia, Universitas Patria Artha
ahmedyunus863@gmail.com, wafda@usm.ac.id, andhikageyer@gmail.com

Abstract

International courts, such as the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC), play a central role in the resolution of inter-state disputes and the enforcement of international law. The ICJ, as the main body of the UN based in The Hague, Netherlands, adjudicates disputes between member states basing its decisions on international law and relevant treaties. The ICJ serves to maintain international peace and security by providing a neutral forum for countries to resolve their conflicts peacefully. Meanwhile, the ICC tries individuals accused of crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression. The ICC aims to ensure that perpetrators of international crimes do not escape accountability, even if they are protected by their own national jurisdictions. Using the normative juridical research method, this study analyzes various legal documents, court decisions, and relevant literature. The main focus of this research is to identify and evaluate how indigenous values can be integrated into international judicial processes to enhance the fairness and legitimacy of decisions. The results show that indigenous values can enrich the perspective of international law by taking into account the cultural, social and environmental contexts of various communities. The integration of these values can also increase acceptance and compliance with international court decisions, especially in developing countries. This research identifies challenges and barriers to integrating indigenous values into the international justice system, and provides recommendations for the development of policies that are more inclusive and adaptive to local contexts, in order to support more effective and sustainable efforts to achieve global justice.

Keywords: Local Wisdom; Court; International

Abstrak

Pengadilan Internasional, seperti Mahkamah Internasional Keadilan (International Court of Justice/ICJ) dan Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), memegang peran sentral dalam penyelesaian sengketa antar-negara dan penegakan hukum internasional. ICJ, sebagai badan utama PBB yang berbasis di Den Haag, Belanda, mengadili perselisihan antara negara-negara anggota yang mendasarkan keputusannya pada hukum internasional dan perjanjian yang relevan. ICJ berfungsi untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan menyediakan forum netral bagi negara-negara untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai. Sementara itu, ICC mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. ICC bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak luput dari pertanggungjawaban, bahkan jika mereka dilindungi oleh yurisdiksi nasional mereka sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam proses peradilan internasional untuk meningkatkan keadilan dan legitimasi keputusan yang diambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal dapat memperkaya perspektif hukum internasional dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, dan lingkungan dari berbagai komunitas. Integrasi nilai-nilai ini juga dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan internasional, terutama di negara-negara berkembang. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam sistem peradilan internasional, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks lokal, guna mendukung upaya pencapaian keadilan global yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Katakunci : Kearifan Lokal; Pengadilan; Internasional.

PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM AKTUALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL

Roby Azmi, Petrus Seto Haryanto, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
robayazmi08@gmail.com

Abstract

International trade dispute settlement refers to the mechanisms and processes used to resolve conflicts that arise between countries, companies or other entities engaged in cross-border trade activities. These disputes can include issues such as breach of contract, tariffs and duties, non-tariff barriers, and non-compliance with international trade regulations. Dispute resolution mechanisms can be conducted through a variety of means, including direct negotiation, mediation, arbitration, and litigation before dispute resolution bodies such as the World Trade Organization (WTO) or through international courts. The main objectives of international trade dispute settlement are to achieve fair and efficient settlements, maintain good trade relations, and ensure compliance with applicable international regulations and agreements. This process often involves complex legal analysis and requires a deep understanding of international law, trade agreements and global business practices. This research focuses on the actualization of local wisdom values in international trade dispute settlement using normative research methods. In the context of increasingly complex globalization, international trade dispute settlement often faces challenges that require a more comprehensive and inclusive approach. Local wisdom values, which include norms, customs and culture, can play an important role in this process. By highlighting concrete examples from different countries, this study aims to demonstrate that local wisdom can not only support a fairer and more effective dispute resolution process, but also strengthen harmony and cooperation between countries. The results of this research are expected to make a significant contribution to the development of international legal policies and practices that are more responsive to cultural diversity and local values.

Keywords: *Local Wisdom, Dispute Resolution, International Trade*

Abstract

Penyelesaian sengketa perdagangan internasional merujuk pada mekanisme dan proses yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara negara, perusahaan, atau entitas lain yang terlibat dalam aktivitas perdagangan lintas batas. Sengketa ini dapat mencakup berbagai isu seperti pelanggaran kontrak, tarif dan bea masuk, hambatan non-tarif, serta ketidaksesuaian dengan peraturan perdagangan internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi langsung, mediasi, arbitrase, dan litigasi di hadapan badan penyelesaian sengketa seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau melalui pengadilan internasional. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa perdagangan internasional adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efisien, menjaga hubungan dagang yang baik, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perjanjian internasional yang berlaku. Proses ini sering kali melibatkan analisis hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum internasional, perjanjian perdagangan, serta praktik bisnis global. Penelitian ini berfokus pada aktualisasi nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional menggunakan metode penelitian normatif. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, penyelesaian sengketa perdagangan internasional seringkali menghadapi tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Nilai-nilai kearifan lokal, yang mencakup norma, adat, dan budaya, dapat memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan menyoroti contoh-contoh konkret dari berbagai negara, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya dapat mendukung proses penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efektif, tetapi juga memperkuat harmoni dan kerjasama antar negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum internasional yang lebih responsif terhadap keragaman budaya dan nilai-nilai lokal.

Katakunci : Kearifan Lokal, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Internasional

PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI LINGKUNGAN (PROTOKOL KYOTO, PERJANJIAN PARIS) DALAM PERWUJUDAN NILAI KEARIFAN LOKAL

Liana Putri Amanda, Nova Ellistiya, Supriyadi

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

lianaamanda908@gmail.com, nellistiya@gmail.com

Abstract

The Kyoto Protocol and the Paris Agreement are two major international agreements designed to address global climate change through reducing greenhouse gas emissions. The Kyoto Protocol divides countries into Annex I (developed countries) and non-Annex I (developing countries), with the primary responsibility for reducing emissions falling on Annex I countries. The Paris Agreement, meanwhile, sets a goal of keeping global temperature rise below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels, with efforts to limit the rise to 1.5 degrees Celsius. Unlike the Kyoto Protocol, the Paris Agreement requires all countries, both developed and developing, to submit national action plans known as Nationally Determined Contributions (NDCs) and report periodically on their progress. Both agreements reflect the evolution of the international framework for addressing climate change, with the Paris Agreement emphasizing a bottom-up approach that is more collaborative and based on voluntary contributions from each country. This research examines the actualization of local wisdom values in international environmental agreements, particularly the Kyoto Protocol and the Paris Agreement, using normative research methods. By highlighting local practices that contribute to environmental sustainability, this research demonstrates that local wisdom can provide innovative and sustainable solutions that align with global goals to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the impacts of climate change. In addition, this research also evaluates the potential for collaboration between local communities and the international community in the implementation of more inclusive and effective environmental policies. The results of this research are expected to strengthen the international legal framework by recognizing and appreciating the contribution of local wisdom values in the global effort against climate change.

Keywords: Local Wisdom; International Treaties; Environment

Abstract

Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris adalah dua perjanjian internasional utama yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim global melalui pengurangan emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto ini membagi negara-negara menjadi Annex I (negara maju) dan non-Annex I (negara berkembang), dengan tanggung jawab utama untuk mengurangi emisi berada pada negara-negara Annex I. Sementara itu, Perjanjian Paris, menetapkan tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celsius. Tidak seperti Protokol Kyoto, Perjanjian Paris mengharuskan semua negara, baik maju maupun berkembang, untuk mengajukan rencana aksi nasional yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDCs) dan melaporkan kemajuannya secara berkala. Kedua perjanjian ini mencerminkan evolusi kerangka kerja internasional dalam menangani perubahan iklim, dengan Perjanjian Paris mengedepankan pendekatan *bottom-up* yang lebih kolaboratif dan berbasis pada kontribusi sukarela dari setiap negara. Penelitian ini mengkaji aktualisasi nilai kearifan lokal dalam perjanjian internasional mengenai lingkungan, khususnya Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dengan menyoroti praktik-praktik lokal yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi potensi kolaborasi antara masyarakat lokal dan komunitas internasional dalam implementasi kebijakan lingkungan yang lebih inklusif dan efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum internasional dengan mengakui dan menghargai kontribusi nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya global melawan perubahan iklim.

Katakunci : Kearifan Lokal; Perjanjian Internasional; Lingkungan

ISU-ISU LINGKUNGAN GLOBAL DALAM (PERUBAHAN IKLIM, POLUSI, KEANEKARAGAMAN HAYATI) PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL

Puput Dini Augusnia, Alfadhiea Catur Prasepyani, Wafda vivid Izziyana, Yusuf Adam Hilman,

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
pptdnaugusnia@gmail.com, adam_hilman@umpo.ac.id

Abstract

Global environmental issues, such as climate change, pollution and biodiversity, are pressing challenges affecting the sustainability of our planet and human well-being. Climate change, characterized by rising global temperatures, rising sea levels and extreme weather phenomena, is primarily caused by greenhouse gas emissions from human activities such as fossil fuel combustion and deforestation. Pollution, of air, water and soil, threatens human and ecosystem health, with major sources including industry, motor vehicles and plastic waste. Biodiversity, which includes genetic variation, species and ecosystems, is in steep decline due to deforestation, habitat destruction and climate change, leading to species extinction and ecosystem damage. These three issues are interconnected and require a holistic and collaborative approach from the entire international community to address their impacts. Effective mitigation and adaptation efforts, supported by strong policies, technological innovation, and active participation from the community, are essential to protect the global environment and ensure sustainability for future generations. This research examines the actualization of local wisdom values in addressing global environmental issues such as climate change, pollution, and biodiversity using normative research methods. In the face of increasingly pressing environmental challenges, time-tested local wisdom values offer sustainable and adaptive solutions. The results of this research are expected to inspire global environmental policies that are more inclusive and responsive to local contexts, and encourage closer collaboration between local communities and the international community. Thus, the actualization of local wisdom values not only enriches global environmental strategies but also strengthens our shared commitment to maintaining ecosystem balance and planetary sustainability.

Keywords: *Local Wisdom; Global Environmental Issues; Biodiversity*

Abstrak

Isu-isu lingkungan global, seperti perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati, merupakan tantangan mendesak yang mempengaruhi keberlanjutan planet kita dan kesejahteraan manusia. Perubahan iklim, yang ditandai oleh peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, dan fenomena cuaca ekstrem, terutama disebabkan oleh emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Polusi, baik udara, air, maupun tanah, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem, dengan sumber utama termasuk industri, kendaraan bermotor, dan limbah plastik. Keanekaragaman hayati, yang mencakup variasi genetik, spesies, dan ekosistem, mengalami penurunan drastis akibat deforestasi, perusakan habitat, dan perubahan iklim, yang mengarah pada kepunahan spesies dan kerusakan ekosistem. Ketiga isu ini saling terkait dan memerlukan pendekatan holistik serta kolaboratif dari seluruh masyarakat internasional untuk mengatasi dampaknya. Upaya mitigasi dan adaptasi yang efektif, didukung oleh kebijakan yang kuat, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif dari masyarakat, sangat penting untuk melindungi lingkungan global dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Penelitian ini mengkaji aktualisasi nilai kearifan lokal dalam menangani isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak, nilai-nilai kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu menawarkan solusi yang berkelanjutan dan adaptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi kebijakan lingkungan global yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat lokal dan komunitas internasional. Dengan demikian, aktualisasi nilai kearifan lokal tidak hanya memperkaya strategi lingkungan global tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan planet.

Kata Kunci : Kearifan Lokal; Isu Lingkungan Global; Keanekaragaman Hayati.

PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL

Defin Ahmad Zahfran, Alditho Bomasika, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

aldithobomasika@gmail.com

Abstract

International arbitration is a method of resolving disputes that occur between parties from different countries through an arbitration process, which involves neutral independent arbitrators to provide a binding decision. This process is usually used as an alternative to dispute resolution through national courts and aims to provide a forum that is more flexible, efficient, and suited to the needs of the disputing parties. International arbitration is often applied in disputes involving international commercial contracts, investments, and other trade issues. Arbitral decisions, otherwise known as arbitral awards, are internationally recognized and enforceable under the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. This research aims to analyze the application of local wisdom values in the international arbitration process through a normative approach. The normative research method is used to examine various legal regulations, international conventions, and relevant doctrines in the context of international dispute resolution. The research finds that the integration of indigenous values can enrich the arbitration process by adding a unique cultural perspective, which can support the achievement of a fairer award that is appropriate to the socio-cultural context of the disputing parties. In addition, this study also highlights the importance of recognizing and accepting indigenous values in the international legal framework to enhance the legitimacy and acceptability of arbitral outcomes in the eyes of the parties and the international community. The results of this study are expected to provide theoretical and practical contributions in the effort to integrate local wisdom values into the practice of international arbitration, and encourage the development of a more inclusive and equitable arbitration law.

Keywords: Application; Local Wisdom Value; International Arbitration

Abstrak

Arbitrase internasional adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak dari negara yang berbeda melalui proses arbitrase, yang melibatkan arbitrator independen yang netral untuk memberikan keputusan yang mengikat. Proses ini biasanya digunakan sebagai alternatif dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional dan bertujuan untuk menyediakan forum yang lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Arbitrase internasional sering diterapkan dalam sengketa-sengketa yang melibatkan kontrak komersial internasional, investasi, dan masalah perdagangan lainnya. Keputusan arbitrase, atau yang dikenal sebagai putusan arbitrase, diakui dan dapat ditegakkan secara internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses arbitrase internasional melalui pendekatan normatif. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan hukum, konvensi internasional, dan doktrin yang relevan dalam konteks penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai kearifan lokal dapat memperkaya proses arbitrase dengan menambahkan perspektif budaya yang unik, yang dapat mendukung tercapainya putusan yang lebih adil dan sesuai dengan konteks sosial-budaya para pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengakuan dan penerimaan nilai kearifan lokal dalam kerangka hukum internasional guna meningkatkan legitimasi dan keberterimaan hasil arbitrase di mata para pihak dan komunitas internasional. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam praktik arbitrase internasional, serta mendorong perkembangan hukum arbitrase yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Katakunci : Penerapan; Nilai Kearifan Lokal; Arbitrase Internasional.

PENYELESAIAN MEDIASI DAN NEGOSIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Ade Irma Srimurni Ati, Selvie Nauria Laila, Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
adeirmaa441@gmail.com

Abstract

Mediation and negotiated settlements in international disputes are alternative methods to resolve disputes between parties from different countries without having to go through litigation in court. Mediation is a process in which a neutral mediator assists the disputing parties to reach an agreement voluntarily and amicably. Negotiation, on the other hand, is a process in which the parties attempt to reach an agreement through direct discussion without the intervention of a third party. Both methods emphasize a win-win settlement, where the solution reached is expected to meet the interests and needs of all parties involved. The use of mediation and negotiation in international disputes is often considered to be more flexible, expeditious and less confrontational than litigation, as well as allowing for the consideration of local wisdom and cultural values of each party. This study aims to examine international dispute resolution through mediation and negotiation by considering the perspective of local wisdom using normative research methods. This study finds that local wisdom can play an important role in strengthening the mediation and negotiation process by introducing a more humanist and contextual approach, thereby promoting a fairer and more sustainable agreement. In addition, the recognition and application of local wisdom values in international dispute resolution can increase the legitimacy and acceptability of mediation and negotiation outcomes in the eyes of the disputing parties and the international community. The results of this study are expected to make theoretical and practical contributions in developing a more inclusive and culturally adaptive international mediation and negotiation framework, as well as encouraging harmonization between international law and local wisdom.

Keywords: Mediation, Negotiation, Local Wisdom

Abstrak

Penyelesaian mediasi dan negosiasi dalam sengketa internasional adalah metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak dari negara yang berbeda tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Mediasi adalah proses di mana seorang mediator netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan damai. Di sisi lain, negosiasi adalah proses di mana para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi langsung tanpa campur tangan pihak ketiga. Kedua metode ini menekankan pada penyelesaian yang bersifat win-win, di mana solusi yang dicapai diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Penggunaan mediasi dan negosiasi dalam sengketa internasional sering kali dianggap lebih fleksibel, cepat, dan kurang konfrontatif dibandingkan dengan litigasi, serta memungkinkan adanya pertimbangan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa internasional melalui mediasi dan negosiasi dengan mempertimbangkan perspektif kearifan lokal menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal dapat memainkan peran penting dalam memperkuat proses mediasi dan negosiasi dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual, sehingga mendorong tercapainya kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, pengakuan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa internasional dapat meningkatkan legitimasi dan keberterimaan hasil mediasi dan negosiasi di mata para pihak yang bersengketa dan komunitas internasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam mengembangkan kerangka kerja mediasi dan negosiasi internasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai budaya, serta mendorong harmonisasi antara hukum internasional dan kearifan lokal.

Katakunci : Mediasi, Negosiasi, Kearifan Lokal

ANALISIS KASUS HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL PERSPEKTIF NILAI KEARIFAN LOKAL

Fadhila Ratnadewati, Vania, B Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
fadhilaaar@gmail.com, Vaniavaniak99@gmail.com

Abstract

The analysis of human rights cases in international law involves an in-depth examination of violations or claims involving human rights under international legal norms. These cases are often brought before international courts. Case analysis begins by identifying relevant international legal standards, including documents such as the Universal Declaration of Human Rights and other human rights conventions. After that, the facts of the case are analyzed to determine whether a human rights violation occurred under these standards. The analysis of human rights cases also involves consideration of principles such as non-discrimination, freedom from torture, the right to private life, and the right to justice and legal protection. The ultimate goal is to establish justice, redress the harm suffered by victims of human rights violations, and ensure that states comply with their obligations under international law. This research aims to analyze real cases in international law by highlighting the application of local wisdom values using normative research methods. The results of the analysis show that the integration of indigenous values not only contributes to a deeper understanding of the socio-cultural context of the disputants, but also helps to create more equitable and sustainable solutions. In addition, this study emphasizes the importance of formal recognition and application of local wisdom values in the international legal system to enhance legitimacy and effectiveness of law enforcement. The findings of this research are expected to provide new insights for international law practitioners and policymakers in an effort to harmonize international law with local values, as well as promote a legal framework that is more inclusive and adaptive to cultural diversity.

Keywords: Case Analysis, International Law, Local Wisdom

Abstrak

Analisis kasus hak asasi manusia dalam hukum internasional melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap pelanggaran atau klaim yang melibatkan hak-hak asasi manusia berdasarkan norma-norma hukum internasional. Kasus-kasus ini sering kali dibawa ke pengadilan internasional. Analisis kasus dimulai dengan mengidentifikasi standar hukum internasional yang relevan, termasuk dokumen-dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi-konvensi hak asasi manusia lainnya. Setelah itu, fakta-fakta kasus dianalisis untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan standar ini. Analisis kasus hak asasi manusia juga melibatkan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, kebebasan dari penyiksaan, hak atas kehidupan pribadi, dan hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menegakkan keadilan, memulihkan kerugian yang diderita oleh korban pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan bahwa negara-negara mematuhi kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus nyata dalam hukum internasional dengan menyoroti penerapan nilai-nilai kearifan lokal menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai kearifan lokal tidak hanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks sosial-budaya para pihak yang bersengketa, tetapi juga membantu menciptakan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan formal dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum internasional guna meningkatkan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi praktisi hukum internasional dan pembuat kebijakan dalam upaya mengharmonisasikan hukum internasional dengan nilai-nilai lokal, serta mempromosikan kerangka hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman budaya.

Katakunci : Analisis Kasus, Hukum Internasional, Kearifan Lokal

PENERAPAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM KASUS PERJANJIAN INTERNASIONAL, SENGKETA INTERNASIONAL, DAN KEPUTUSAN PENGADILAN INTERNASIONAL

Jenny Oktaviani S, Wahyu Rahma F, Supriyadi

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
jennyoktaviani93@gmail.com, Wahyurahmafirmanda02@gmail.com

Abstract

Case studies of international treaties, international disputes and international court decisions are in-depth analyses of real-life examples that occur in the context of international relations. International treaty case studies involve an evaluation of agreements made between states or international entities, which includes a discussion of the negotiation process, the content of the agreement, and its legal and political implications. International dispute analysis examines the root causes of conflicts, the process of resolving them, and the outcomes achieved. International court decisions are decisions issued by international judicial bodies, such as the International Court of Justice or international arbitration tribunals. This research aims to analyze the application of local wisdom values in the context of international treaties, international disputes, and international court decisions using normative research methods. The results show that the application of local wisdom can make a positive contribution in enriching and refining the negotiation process, mediation, and international court decisions, resulting in fairer and more sustainable agreements and decisions. In addition, the recognition of local values in international treaties and dispute settlements can enhance the legitimacy and acceptability of those outcomes in the eyes of the international community. This research also highlights the challenges faced in harmonizing local values with the principles of international law, and offers recommendations to strengthen the integration of local wisdom in the international legal framework. Thus, the results of this study are expected to make a significant contribution to the development of international legal theory and practice that is more inclusive and adaptive to cultural diversity.

Keywords: Treaty, Dispute I, Court Decision, Local Wisdom

Abstrak

Studi kasus perjanjian internasional, sengketa internasional, dan keputusan pengadilan internasional adalah analisis mendalam terhadap contoh-contoh nyata yang terjadi dalam konteks hubungan internasional. Studi kasus perjanjian internasional melibatkan evaluasi terhadap kesepakatan yang dibuat antara negara-negara atau entitas internasional, yang mencakup pembahasan tentang proses negosiasi, isi perjanjian, serta implikasi hukum dan politiknya. Analisis sengketa internasional meneliti akar penyebab konflik, proses penyelesaiannya, serta hasil akhir yang dicapai. Keputusan pengadilan internasional adalah putusan yang dikeluarkan oleh badan yudisial internasional, seperti Mahkamah Internasional atau tribunal arbitrase internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks perjanjian internasional, sengketa internasional, dan keputusan pengadilan internasional dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkaya dan memperhalus proses negosiasi, mediasi, serta keputusan pengadilan internasional, sehingga menghasilkan kesepakatan dan putusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, pengakuan nilai-nilai lokal dalam perjanjian dan penyelesaian sengketa internasional dapat meningkatkan legitimasi dan keberterimaan hasil-hasil tersebut di mata komunitas internasional. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mengharmonisasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip hukum internasional, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat integrasi kearifan lokal dalam kerangka hukum internasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik hukum internasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman budaya.

Katakunci : Perjanjian, Sengketa I, Keputusan Pengadilan , Kearifan Lokal

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Nurul Huda Sodikhin, Muhammad Azimar Rousli, Sukimin, A Heru Nuswanto

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
hudasodiqin@gmail.com

Abstract

Compliance with national and international law refers to an individual's, group's or country's adherence to the rules and norms set by both domestic governments and the international community. It includes an entity's adherence to its domestic legal rules, such as the constitution, laws, and government regulations, as well as adherence to internationally recognized treaties and norms. This compliance reflects not only formal adherence to regulations, but also includes recognition of the moral, ethical and just values underlying those laws. In the context of globalization, compliance with national and international laws is crucial to maintaining stability, justice and harmony in relations between states and within the international community as a whole. The purpose of this research is to examine the theme of compliance with national and international laws from the perspective of local wisdom, using normative research methods. This research investigates how local wisdom values can influence the level of community compliance with applicable laws, both at the national and international levels. Through a normative approach, this study analyzes the relevance and applicability of local wisdom principles in the context of modern law, as well as their impact on the understanding and observance of applicable legal regulations. The findings of this study are expected to provide new insights on how the harmony between local wisdom and the formal legal system can be strengthened to improve holistic legal compliance.

Keywords: National, International Law, Local Wisdom

Abstrak

Kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional merujuk pada ketaatan individu, kelompok, atau negara terhadap peraturan dan norma yang ditetapkan baik oleh pemerintah dalam negeri maupun dalam lingkup komunitas internasional. Hal ini mencakup patuhnya suatu entitas terhadap peraturan hukum yang berlaku di dalam negeri mereka, seperti konstitusi, undang-undang, dan regulasi pemerintah, serta ketaatan terhadap perjanjian dan norma yang diakui secara internasional. Kepatuhan ini tidak hanya mencerminkan ketaatan formal terhadap peraturan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang mendasari hukum-hukum tersebut. Dalam konteks globalisasi, kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional menjadi krusial untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan harmoni dalam hubungan antarnegara serta di dalam masyarakat internasional secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini mengkaji tema tentang kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional dari sudut pandang kearifan lokal, menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menyelidiki bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui pendekatan normatif, studi ini menganalisis relevansi dan aplikabilitas prinsip-prinsip kearifan lokal dalam konteks hukum modern, serta dampaknya terhadap pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana harmoni antara kearifan lokal dan sistem hukum formal dapat diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan hukum secara holistic.

Katakunci : Hukum Nasional, Internasional, Kearifan Lokal

IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION MENGENAI TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES

Ramadhan Sulistiyanto, Andini Nur Fadhila Syah Putri, Dharu Triasih

¹Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia; ² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia; ³Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
¹hramadhab.sulis@gmail.com; ²andineefs13@gmail.com

Abstract

This research explores the application of local wisdom values within the framework of the WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). TRIMs is an agreement that regulates investment policies to promote global trade liberalization. However, the implementation of this agreement often faces challenges when applied in countries with strong local traditions and values. This research uses a qualitative approach through literature studies and interviews with stakeholders in several developing countries to understand how local wisdom can be integrated in the implementation of TRIMs policies. The results show that local wisdom values, such as gotong royong, simplicity, and social justice, can enrich and adapt the implementation of TRIMs to the local context. This integration not only helps reduce resistance from local communities, but also increases the effectiveness of investment policies by creating a more inclusive and sustainable business environment. In conclusion, the implementation of local wisdom values in the TRIMs Agreement can encourage the creation of harmony between international policies and local needs, strengthening the capacity of countries to take advantage of the benefits of global trade without compromising the cultural identity and interests of local communities.

Keywords: Local wisdom; TRIMs; WTO

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerangka Perjanjian WTO mengenai Trade-Related Investment Measures (TRIMs). TRIMs merupakan perjanjian yang mengatur kebijakan investasi untuk mendorong liberalisasi perdagangan global. Namun, implementasi perjanjian ini sering kali menghadapi tantangan ketika diterapkan di negara-negara dengan tradisi dan nilai-nilai lokal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan di beberapa negara berkembang untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan kebijakan TRIMs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, kesederhanaan, dan keadilan sosial, dapat memperkaya dan menyesuaikan pelaksanaan TRIMs dengan konteks lokal. Integrasi ini tidak hanya membantu mengurangi resistensi dari komunitas lokal, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan investasi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Perjanjian TRIMs dapat mendorong terciptanya keselarasan antara kebijakan internasional dan kebutuhan lokal, memperkuat kapasitas negara untuk memanfaatkan keuntungan perdagangan global tanpa mengorbankan identitas budaya dan kepentingan masyarakat setempat.

Katakunci: Kearifan lokal; TRIMs; WTO.

**ARTI PENTING PERJANJIAN TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES
PADA NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

Kurnia Majid Gunawan , Randi Kusuma Prasetyo , Ahmad Ridho, Dharu Triasih, Dhian Indah Astanti

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

¹ kurniamajid16@gmail.com, ² Randiprastt@gmail.com, ridho4600@gmail.com

Abstract

This research explores the application of local wisdom values within the framework of the WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). TRIMs is an agreement that regulates investment policies to promote global trade liberalization. However, the implementation of this agreement often faces challenges when applied in countries with strong local traditions and values. This research uses a qualitative approach through literature studies and interviews with stakeholders in several developing countries to understand how local wisdom can be integrated in the implementation of TRIMs policies. The results show that local wisdom values, such as gotong royong, simplicity, and social justice, can enrich and adapt the implementation of TRIMs to the local context. This integration not only helps reduce resistance from local communities, but also increases the effectiveness of investment policies by creating a more inclusive and sustainable business environment. In conclusion, the implementation of local wisdom values in the TRIMs Agreement can encourage the creation of harmony between international policies and local needs, strengthening the capacity of countries to take advantage of the benefits of global trade without compromising the cultural identity and interests of local communities.

Keywords: Local Wisdom; TRIMs; WTO.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kerangka Perjanjian WTO mengenai Trade-Related Investment Measures (TRIMs). TRIMs merupakan perjanjian yang mengatur kebijakan investasi untuk mendorong liberalisasi perdagangan global. Namun, implementasi perjanjian ini sering kali menghadapi tantangan ketika diterapkan di negara-negara dengan tradisi dan nilai-nilai lokal yang kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan di beberapa negara berkembang untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan kebijakan TRIMs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, kesederhanaan, dan keadilan sosial, dapat memperkaya dan menyesuaikan pelaksanaan TRIMs dengan konteks lokal. Integrasi ini tidak hanya membantu mengurangi resistensi dari komunitas lokal, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan investasi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Perjanjian TRIMs dapat mendorong terciptanya keselarasan antara kebijakan internasional dan kebutuhan lokal, memperkuat kapasitas negara untuk memanfaatkan keuntungan perdagangan global tanpa mengorbankan identitas budaya dan kepentingan masyarakat setempat.

Katakunci: Kearifan Lokal; TRIMs; WTO.

PENGHORMATAN, PELAKSANAAN DAN PENAFSIRAN ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Fatasha Aulya Fiko , Julia Ananda Cintha, Mohammad Khoirul Huda, Dhian Indah Astanti,
Dharu Triasih

¹Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia; ² Fakultas Hukum, Universitas Semarang,
Indonesia; ³Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

¹ hudamohammad0820@gmail.com; ² cinthadid@gmail.com; ³ fatasyaulya205@gmail.com

Abstract

This research aims to explore how the respect, implementation and interpretation of international treaties can be integrated with local wisdom in the legal and cultural context of a country. International treaties are often considered an important tool for maintaining good relations between states and ensuring global peace and stability. However, in their implementation, challenges arise on how to balance between international obligations and existing local values and norms. This research uses a qualitative approach with a literature study method and juridical analysis to assess the interaction between international law and local wisdom. The results show that respect for local wisdom can enrich the implementation of international agreements, create wider acceptance at the local level, and prevent cultural and social conflicts. In addition, the interpretation of international agreements that take local wisdom into account can help maintain the sustainability of policies and practices that are in line with the identity and needs of local communities. In conclusion, the integration of local wisdom in the respect, implementation, and interpretation of international treaties not only promotes justice and inclusiveness, but also strengthens international relations through a more humanist approach based on mutual understanding.

Keywords: *International Treaties; Respect; Implementation; Interpretation; Local Values*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penghormatan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian internasional dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal dalam konteks hukum dan budaya suatu negara. Perjanjian internasional sering kali dianggap sebagai alat penting untuk menjaga hubungan baik antarnegara dan memastikan perdamaian serta stabilitas global. Namun, dalam penerapannya, muncul tantangan bagaimana menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan nilai-nilai serta norma-norma lokal yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis yuridis untuk menilai interaksi antara hukum internasional dan kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kearifan lokal dapat memperkaya pelaksanaan perjanjian internasional, menciptakan penerimaan yang lebih luas di tingkat lokal, serta mencegah konflik budaya dan sosial. Selain itu, penafsiran perjanjian internasional yang mempertimbangkan kearifan lokal dapat membantu menjaga keberlanjutan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan masyarakat setempat. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal dalam penghormatan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian internasional tidak hanya mempromosikan keadilan dan inklusivitas, tetapi juga memperkuat hubungan internasional melalui pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada saling pengertian.

Katakunci: Perjanjian Internasional; Penghormatan; Pelaksanaan; Penafsiran; Nilai-Nilai Lokal.

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM

Satrio Nabawi

Fakultas Hukum Universitas Semarang
satrionabawi53@gmail.com

Abstract

Local wisdom is the values, norms and practices that have developed in society for generations. In the context of progressive and responsive legal development, local wisdom can be a source of inspiration and guidance for designing legal policies that are more inclusive and sustainable. The progressive legal approach refers to the evolution of law to meet evolving social, economic and political demands, while responsive law refers to the ability of law to respond quickly and effectively to the needs and aspirations of society. Local wisdom can make a valuable contribution in several ways. First, it can offer a deep understanding of community values and needs that are not always represented in formal law. Second, it can serve as a source of solutions to complex conflicts or legal challenges. Alternative dispute resolution methods based on local wisdom, such as community-based mediation, can help achieve better justice and more sustainable resolutions. However, the integration of local wisdom in legal development is not always without challenges. Several issues may arise, such as consistency with universal human rights standards or with prevailing principles of positive law. Therefore, a careful and coordinated approach is needed to ensure that local wisdom does not conflict with broader legal principles. As such, the incorporation of local wisdom in progressive and responsive legal development can bring significant benefits in creating a legal system that is more just, inclusive and relevant to society as a whole. Further research and open dialogue between policy makers, academics, and civil society are needed to optimize the contribution of local wisdom in a changing and evolving legal context.

Keywords: *Integration; Local Wisdom; Legal Development.*

Abstrak

Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Dalam konteks pembangunan hukum yang progresif dan responsif, kearifan lokal dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk merancang kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan hukum progresif mengacu pada evolusi hukum untuk memenuhi tuntutan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang, sementara hukum responsif merujuk pada kemampuan hukum untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif. Kearifan lokal dapat memberikan kontribusi berharga dalam beberapa cara. Pertama, kearifan lokal dapat menawarkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu terwakili dalam hukum formal. Kedua, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sumber solusi bagi konflik atau tantangan hukum yang kompleks. Metode alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kearifan lokal, seperti mediasi berbasis komunitas, dapat membantu mencapai keadilan yang lebih baik dan resolusi yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum tidak selalu tanpa tantangan. Beberapa permasalahan dapat timbul, seperti konsistensi dengan standar hak asasi manusia universal atau dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa kearifan lokal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penggabungan kearifan lokal dalam pembangunan hukum yang progresif dan responsif dapat membawa manfaat signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan relevan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut dan dialog yang terbuka antara pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi kearifan lokal dalam konteks hukum yang terus berubah dan berkembang.

Katakunci : Integrasi; Kearifan Lokal; Pembangunan Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH

ATAS TANAH YANG MUSNAH

Zela Ony Zulfida, Edi Pranoto

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

zelazulfida05@gmail.com

Abstract

Land has a very important role in human life, and the state has the authority to manage it, including overcoming problems such as land damage. Land loss occurs when land experiences structural changes due to natural events, causing dysfunction and the inability to use it. However, the handling and legal status of destroyed land in Indonesia is still not in accordance with legal provisions. In the thesis entitled "Legal Protection for Owners of Land Rights that Have Been Destroyed" the author examines the legal status and protection for owners of land rights that have been damaged. This research uses a type of normative juridical research which refers to secondary data and is analyzed descriptively with qualitative analysis. The results of the research show that the land that was destroyed has lost its legal status, including ownership rights and management, in accordance with provisions such as PP No. 18 of 2021 Article 66 and ATR/BPN Ministerial Regulation No. 17 of 2021 Article 17. Based on the research results, legal protection is provided through assistance . spiritual funds regulated by Presidential Decree Number 52 of 2022. These funds are given to land rights holders who do not carry out reconstruction or reclamation of their land which will be transferred to the government for development in the public interest. Therefore, legal protection for owners of destroyed land rights includes the elimination of the legal status of the land and assistance with spiritual funds in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Legal Protection; Land rights; Land of Desolation.*

Abstrak

Tanah memegang peran vital dalam kehidupan manusia, dan negara memiliki kewenangan untuk mengelolanya, termasuk mengatasi permasalahan seperti tanah musnah. Tanah musnah terjadi ketika tanah mengalami perubahan struktural akibat peristiwa alam, menyebabkan ketidakfungsian dan ketidakmampuan pemanfaatan. Namun, penanganan dan status hukum terkait tanah musnah di Indonesia masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah yang Musnah," penulis mengkaji status hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak atas tanah yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif mengacu pada data sekunder dan dianalisa secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang menjadi musnah dihapuskan status hukumnya, termasuk hak kepemilikan dan pengelolaan, sesuai dengan regulasi seperti PP No 18 Tahun 2021 Pasal 66 dan Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2021 Pasal 17. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui bantuan dana kerohiman, yang diatur oleh Perpres No 52 Tahun 2022. Dana ini diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi tanahnya yang akan dialihkan kepada pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang musnah mencakup penghapusan status hukum tanah dan bantuan dana kerohiman sesuai ketentuan yang berlaku..

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah; Tanah Musnah.

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF

Haziul Ma'arif

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

diaaansa@gmail.com

Abstract

In general, people understand culture in the form of works of art only. In fact, understanding culture also involves attitudes, behaviors, and opinions that come from the values that live in society. Each sphere of society can have its own values, it may also have several values that are different from each other. In such circumstances, it is often necessary to act or agree so that attitudes, behaviors and opinions show togetherness in society. Attitudes and behavioral opinions that stem from making the values of the community adopted and having them establish rules in order to base human relations, relationships between people around them. Even the relationship between private and public with the natural environment, which is bound or strengthened by physical sanctions and not infrequently followed by religious-magical ties. Improvement of the legal substance aspect. In terms of legal substance, the law making process, law implementation and enforcement must respond to and accommodate living law as an expression of values, norms, institutions and legal traditions that live and develop in a multicultural society.

Keywords: Development; Law and Local Culture.

Abstrak

Pada umumnya masyarakat memahami budaya dalam bentuk karya seni saja. Padahal pemahaman budaya juga menyangkut sikap, perilaku, dan pendapat yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Setiap lingkup masyarakat dapat memiliki nilai-nilainya sendiri, mungkin juga memiliki beberapa nilai yang berbeda satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, seringkali diperlukan tindakan atau kesepakatan agar sikap, perilaku dan pendapat menunjukkan kebersamaan dalam masyarakat. Sikap dan pendapat perilaku yang berpangkal dari menjadikan nilai-nilai masyarakat yang dianut dan memilikinya menetapkan aturan-aturan dalam rangka mendasarkan hubungan antar manusia, hubungan antar manusia di sekitarnya. Bahkan hubungan antara privat dan publik dengan lingkungan alam, yang diikat atau diperkuat dengan sanksi fisik dan tidak jarang diikuti oleh ikatan religi-magis. Perbaikan aspek substansi hukum. Secara substansi hukum (*legal substance*), proses pembuatan hukum (*law making process*), implementasi dan penegakan hukum negara (*law implementation and enforcement*) wajib merespon dan mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) sebagai ekspresi nilai-nilai, norma, institusi dan tradisi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bernuansa multikultural.

Katakunci: Perkembangan; Hukum dan Kebudayaan Lokal.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF

Wafda Vivid izziyana, Sukimin, Endah Pujiastuti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Wafda@usm.ac.id

Abstract

This research examines legal protection for Indonesian migrant workers in Malaysia from a progressive and responsive legal perspective. Migrant workers often face serious challenges regarding employment rights, fair treatment, and legal protection in their destination countries. In this context, it is important to explore how progressive law can provide an effective framework to protect and fight for the rights of migrant workers, while responding to changing social, economic and political dynamics. The research method used in analyzing the problem is the empirical juridical method. The results show that a responsive progressive legal approach can strengthen legal protection for Indonesian migrant workers in Malaysia. Measures such as the formation of inclusive policies, strict supervision of the use of migrant workers, as well as education and training on their rights, are key in improving fair and safe working conditions for migrant workers. In addition, the active involvement of civil society and non-governmental organizations in monitoring and reporting human rights violations is also important to ensure effective protection. In conclusion, legal protection for Indonesian migrant workers in Malaysia from the perspective of progressive and responsive law requires cooperation between the government, legal institutions, and civil society to create a work environment that is safe, fair, and respectful of human dignity. Proper implementation of these principles can result in more sustainable and efficacious policies in protecting migrant workers and promoting social justice at the international level.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Malaysia, Legal Protection,

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia dari perspektif hukum progresif dan responsif. Pekerja migran sering menghadapi tantangan serius terkait hak-hak kerja, perlakuan yang adil, dan perlindungan hukum di negara tujuan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum progresif dapat menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran, sekaligus merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Metode penelitian yang di gunakan dalam menganalisis permasalahan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif yang responsif dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Langkah-langkah seperti pembentukan kebijakan yang inklusif, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan tenaga kerja migran, serta edukasi dan pelatihan tentang hak-hak mereka, menjadi kunci dalam meningkatkan kondisi kerja yang adil dan aman bagi pekerja migran. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia juga penting untuk memastikan perlindungan yang efektif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia dari perspektif hukum progresif dan responsif memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan menghormati martabat manusia. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna dalam melindungi pekerja migran dan mempromosikan keadilan sosial di tingkat internasional.

Katakunci : Pekerja Migran Indonesia, Malaysia, Perlindungan Hukum,

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TATA KELOLA DESA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF

Sukimin

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

sukimin@usm.ac.id

Abstract

This research examines the value of local wisdom in village governance from the perspective of progressive and responsive law. Village governance is crucial in ensuring inclusive, sustainable and local wisdom-based development in Indonesia. In this context, it is important to understand how cultural values, traditional norms and customary practices can be integrated into a legal framework that supports effective village planning and management. This research uses a qualitative approach by analyzing literature studies, legal documents, and interviews with community leaders and legal practitioners experienced in village governance. The main focus of the research includes respect for village autonomy, increased community participation in decision-making, inclusive law enforcement mechanisms, and the application of restorative justice. The study also evaluates the role of the government and relevant institutions in promoting the integration of local values in sustainable village development. The results show that progressive and responsive legal approaches can strengthen local wisdom-based village governance. Measures such as empowering local communities in formulating policies, protecting the rights of indigenous peoples, and integrating local wisdom values in development planning, are key in creating more independent and empowered villages. In addition, customary mediation mechanisms and restorative justice approaches can help resolve conflicts and strengthen social relations within village communities. In conclusion, the value of local wisdom in village governance from the perspective of progressive and responsive law is the foundation for creating an inclusive, equitable and sustainable environment at the local level. Proper implementation of these principles by the government, legal institutions, and civil society can help improve the welfare of village communities and promote overall social and economic justice.

Keywords: Village Governance, Local Wisdom, Progressive Law.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji nilai kearifan lokal dalam tata kelola desa dari perspektif hukum progresif dan responsif. Tata kelola desa menjadi krusial dalam memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan lokal di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya, norma-norma tradisional, dan praktik adat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang mendukung perencanaan dan pengelolaan desa yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis studi literatur, dokumen hukum, serta wawancara tokoh masyarakat dan praktisi hukum yang berpengalaman dalam tata kelola desa. Fokus utama penelitian meliputi penghormatan terhadap otonomi desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mekanisme penegakan hukum yang inklusif, serta penerapan keadilan restoratif. Studi ini juga mengevaluasi peran pemerintah dan lembaga terkait dalam mempromosikan integrasi nilai-nilai lokal dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif dan responsif dapat memperkuat tata kelola desa berbasis kearifan lokal. Langkah-langkah seperti pemberdayaan masyarakat lokal dalam merumuskan kebijakan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan, menjadi kunci dalam menciptakan desa yang lebih mandiri dan berdaya. Selain itu, mekanisme mediasi adat dan pendekatan keadilan restoratif dapat membantu menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat desa. Kesimpulannya, nilai kearifan lokal dalam tata kelola desa dari perspektif hukum progresif dan responsif merupakan fondasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Katakunci : Tata Kelola Desa, Kearifan Lokal, Hukum Progresif.

**PENGATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP
BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Subaidah Ratna Juita, Efi Yulistyowati, Supriyadi
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
ratna.juita@usm.ac.id

Abstract

Local wisdom in Indonesia plays an important role in the context of regulating criminal liability against beneficial ownership in relation to criminal acts committed by corporations. This concept reflects a cultural heritage that prioritizes values such as togetherness, mutual trust, and social justice in the ownership of assets or interests. In the context of Indonesian criminal law, the regulation of beneficial ownership demands clear recognition of actual ownership, which is often at odds with local practices that prioritize communal and collaborative aspects of ownership. This research examines how these local wisdom values can be integrated into beneficial ownership arrangements so that they can be criminally accountable. A balanced approach between universally applicable criminal law principles and local wisdom values is needed to ensure fair and inclusive legal protection for all parties involved. The implications of this integration are expected to improve social and cultural sustainability and maintain harmony in Indonesian society. Thus, this research offers a new perspective in understanding how local wisdom can play a role in developing criminal law policies that are responsive to social and cultural dynamics in Indonesia, especially in the context of criminal liability for beneficial ownership in criminal law.

Keywords: *Beneficial Ownership, Criminal Liability, Local Wisdom.*

Abstrak

Kearifan lokal di Indonesia memainkan peran penting dalam konteks pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik manfaat (beneficial ownership) berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Konsep ini mencerminkan warisan budaya yang mengedepankan nilai-nilai seperti kebersamaan, saling percaya, dan keadilan sosial dalam kepemilikan aset atau kepentingan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan beneficial ownership menuntut pengakuan yang jelas terhadap kepemilikan yang sebenarnya, yang sering kali bertentangan dengan praktik lokal yang lebih mengutamakan aspek komunal dan kolaboratif dalam kepemilikan. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat diintegrasikan dalam pengaturan beneficial ownership sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Perlu adanya pendekatan yang seimbang antara asas-asas hukum pidana yang berlaku secara universal dan nilai-nilai kearifan lokal untuk memastikan perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Implikasi dari integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan sosial dan budaya serta menjaga harmoni dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami bagaimana kearifan lokal dapat berperan dalam mengembangkan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap dinamika sosial dan budaya di Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pada beneficial ownership dalam hukum pidana.

Kata kunci : Beneficial Ownership , Pertanggungjawaban Pidana, Kearifan Lokal.

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PADA PERTANGGUNGJAWABAN BANK BAGI NASABAH TERHADAP KEJAHATAN ITE PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Dhian Indah Astanti, Amri Panahatan S, B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang

¹ dhian.indah@usm.ac.id, amri.panahatan@usm.ac.id,

Abstract

This research aims to analyze the role of local wisdom values in the development of national law related to the liability of banks to customers in the face of Electronic Information and Transaction (ITE) crimes. In the digital era, ITE crimes pose a serious threat to the banking sector, requiring effective regulations to protect customers. However, these regulations need to consider the values of local wisdom to be more in line with the social and cultural context of the community. This research uses a qualitative approach with literature study methods and in-depth interviews to identify how values such as gotong royong, honesty, and social justice can be integrated in bank liability policies. The results show that the application of local wisdom values in banking regulations can strengthen the relationship between banks and customers, create higher trust, and improve the effectiveness of handling ITE crimes. The use of local wisdom principles in national legal development also helps in creating more inclusive and sustainable policies. In conclusion, the integration of local wisdom values in bank liability policies not only provides better protection for customers, but also strengthens the legitimacy of national laws and the resilience of the banking system against ITE crimes.

Keywords: Local Wisdom, National Legal Development, Bank Liability, ITE Crimes,.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional terkait pertanggungjawaban bank terhadap nasabah dalam menghadapi kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di era digital, kejahatan ITE menjadi ancaman serius bagi sektor perbankan, mengharuskan adanya regulasi yang efektif untuk melindungi nasabah. Namun, regulasi tersebut perlu mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal agar lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, dan keadilan sosial dapat diintegrasikan dalam kebijakan pertanggungjawaban bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai kearifan lokal dalam regulasi perbankan dapat memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi, serta meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan ITE. Penggunaan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional juga membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, integrasi nilai kearifan lokal dalam kebijakan pertanggungjawaban bank tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum nasional dan ketahanan sistem perbankan terhadap kejahatan ITE.

Katakunci: Kearifan Lokal, Pembangunan Hukum Nasional, Pertanggungjawaban Bank, Kejahatan ITE,.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA ASURANSI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF

B. Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

rini.heryanti@usm.ac.id

Abstract

This research discusses the implementation of local wisdom values in agricultural insurance in the context of progressive and responsive legal development. Local wisdom includes knowledge, practices, and values that develop in local communities that can provide innovative and sustainable solutions in agricultural risk management. This research uses a normative juridical method of research approach that focuses on the study of legal documents, such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and existing doctrines. The results explain that the integration of these values into agricultural insurance not only strengthens farmers' resilience to the risks of natural disasters and climate change, but also supports environmental sustainability and social sustainability. Progressive and responsive legal development requires the renewal of laws and regulations that are adaptive to local and global dynamics, and responsive to community needs. Thus, the establishment of regulations that accommodate local wisdom in agricultural insurance can create a more inclusive, fair and competitive legal framework, which ultimately promotes farmers' welfare and national food security.

Keywords: *Agricultural Insurance, Local Wisdom, Progressive Law, Responsive Law*

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi nilai kearifan lokal dalam asuransi pertanian dalam konteks pembangunan hukum yang progresif dan responsif. Kearifan lokal mencakup pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat lokal yang dapat memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko pertanian. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normative pendekatan penelitian yang fokus pada studi dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Integrasi nilai-nilai ini ke dalam asuransi pertanian tidak hanya memperkuat ketahanan petani terhadap risiko bencana alam dan perubahan iklim, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Pembangunan hukum yang progresif dan responsif menghendaki pembaruan peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap dinamika lokal dan global, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang mengakomodasi kearifan lokal dalam asuransi pertanian dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional

Katakunci : Asuransi Pertanian, Kearifan Lokal, Hukum Progresif , Hukum Responsive

IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM JUAL BELI ONLINE UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIVE

Dharu Triasih

Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
dharu.triasih@usm.ac.id

Abstract

Online buying and selling in Indonesia has experienced rapid development in recent years, becoming one of the major trends in electronic commerce. In this context, online buying and selling refers to the process of buying and selling goods or services electronically through digital platforms such as e-commerce websites, mobile applications, and social media. Users can conduct transactions ranging from searching for products, selecting, to making payments online. This research aims to explore the implementation of local wisdom values in the context of online buying and selling as an effort to advance and respond to the development of national law. Using a normative juridical research approach, this study analyzes legal documents, e-commerce regulations, as well as relevant related literature. The main focus of this research is to identify and evaluate the ways in which local wisdom values, such as social justice, environmental sustainability, and community participation, can be integrated into the regulatory framework of online buying and selling. The results show that the application of local wisdom values can enrich and strengthen national legal frameworks, enhance consumer protection, promote responsible business practices, and support inclusive economic growth. The research also identifies possible challenges, such as conformity with international standards and technological adaptation, and provides policy recommendations to build a progressive legal system that is responsive to global dynamics and diverse local values.

Keywords: Local Wisdom; Online Buying and Selling; National Law

Abstrak

Jual beli online di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu tren utama dalam perdagangan elektronik. Dalam konteks ini, jual beli online mengacu pada proses transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik melalui platform-platform digital seperti situs web e-commerce, aplikasi seluler, dan media sosial. Pengguna dapat melakukan transaksi mulai dari mencari produk, memilih, hingga melakukan pembayaran secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi nilai kearifan lokal dalam konteks jual beli online sebagai upaya untuk memajukan dan meresponsifkan pengembangan hukum nasional. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, studi ini menganalisis dokumen hukum, regulasi e-commerce, serta literatur terkait yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi cara-cara di mana nilai-nilai kearifan lokal, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan partisipasi komunitas, dapat diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi jual beli online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai kearifan lokal dapat memperkaya dan memperkuat kerangka hukum nasional, meningkatkan perlindungan konsumen, mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kesesuaian dengan standar internasional dan adaptasi teknologi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk membangun sistem hukum yang progresif dan responsif terhadap dinamika global serta nilai-nilai lokal yang beragam.

Katakunci : Kearifan Lokal; Jual Beli Online; Hukum Nasional.

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH ADAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Supriyadi, Tri Mulyani, Dyah Ayu Sulistyarini

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Semarang, Indonesia;

³ Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Indonesia;

¹supriyadi@usm.ac.id; ²trimulyani@usm.ac.id, ³dyahrini411@gmail.com

Abstract

The purpose of the research is to analyze the internalization of Pancasila values in customary land registration policies through the PTSL program. The research method used is normative juridical, with qualitative data analysis. The results of the research show that the internalization of Pancasila Values in the customary land registration policy through the PTSL program can be reflected in its precepts, namely: Principle 1, Belief in Almighty God. exist in Indonesia with their respective beliefs or religiosity; Principle 2, Just and civilized humanity, it appears that the government upholds and respects the rights of indigenous peoples, the adjudication committee will validate the completeness of physical data and juridical data, after conducting research; Principle 3, Indonesian Unity, shows that even though the Indonesian State has thousands of tribes with their own cultures in terms of land, their policies are the same, reflecting unity in diversity; Principle 4, Democracy led by wisdom in representative deliberations, appears in the mediation policy in resolving land registration disputes; Principle 5, Social justice for all Indonesian people, it appears that the aim of implementing the PTSL policy is to guarantee fair legal certainty of land rights for all Indonesian people.

Keywords: Internalisation; Pancasila; PTSL; Traditional Land.

Abstrak

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis tentang internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pendaftaran tanah adat melalui program PTSL. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam kebijakan pendaftaran tanah adat melalui program PTSL dapat tercermin dari sila-silanya, yaitu: *Sila 1*, Ketuhanan YME, nampak bahwa dalam kebijakan PTSL mengakui hukum nasional bersumber dari hukum adat dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia dengan kepercayaan atau religiusitas masing-masing; *Sila 2*, Kemanusiaan yang adil dan beradab, nampak bahwa pemerintah menjunjung tinggi dan menghormati hak masyarakat adat, panitia adjudikasi akan mengesahkan kelengkapan data fisik dan data yuridis, setelah melakukan penelitian; *Sila 3*, Persatuan Indonesia, nampak bahwa meskipun Negara Indonesia beribu suku dengan budaya masing-masing dalam hal pertanahan, namun kebijakannya sama, mencerminkan persatuan dalam keberagaman; *Sila 4*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak dalam kebijakan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan pendaftaran tanah; *Sila 5*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nampak bahwa tujuan diberlakukannya kebijakan PTSL untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Internalisasi; Pancasila; PTSL; Tanah Adat.

PERIZINAN PENGGUNAAN AIR BAWAH TANAH BERDASARKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN AIR

Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih.

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
trimulyani@usm.ac.id

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the licensing of underground water use based on the value of local wisdom in preserving water towards the realization of sustainable development. Groundwater is water contained in layers of soil or rock below the ground surface. The use of groundwater must have a groundwater use agreement, in which water use activities need to be controlled as a form of government prudence in order to provide welfare, justice, benefits, balance and sustainability of a sustainable environment (sustainable development). Control that is very suitable for Indonesian culture is by using local wisdom values. The research method used in this research is normative juridical with qualitative data analysis. The results show that licensing the use of underground water based on the value of local wisdom in preserving water towards the realization of sustainable development, successfully preventing damage to environmental functions, both land, forest and water. In addition, complying with various advice or rituals is an example of local wisdom in maintaining balance, managing and caring for the natural environment. Care and management whose concepts are tailored to the conditions and character of the local community's local wisdom. The local wisdom of the community has a strong character, inherited by ancestors with a long history and adaptation, and can be used as a local community regulation system. Local wisdom plays a strategic role supported by the wisdom values contained in it and has the potential to prevent damage to nature and forest ecosystems and trigger sustainability.

Keywords: *Licensing; Underground Water Use; Local Wisdom Value*

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tentang perizinan penggunaan air bawah tanah berdasarkan nilai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian air menuju terwujudnya *sustainable development*. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Penggunaan air tanah wajib mempunyai persetujuan penggunaan air tanah, di mana dalam aktivitas penggunaan air perlu dikendalikan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah agar dapat memberikan kesejahteraan, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan serta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pengendalian yang sangat cocok dengan budaya Indonesia adalah dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan penggunaan air bawah tanah berdasarkan nilai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian air menuju terwujudnya *sustainable development*, berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah, hutan, maupun air. Selain itu, mematuhi berbagai petuah, atau ritual merupakan contoh kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keseimbangan, mengelola dan merawat lingkungan alam. Perawatan dan pengelolaan yang konsepnya disesuaikan dengan kondisi dan karakter kearifan lokal masyarakat setempat. Kearifan lokal masyarakat memiliki karakter yang kuat, diwariskan oleh leluhur dengan sejarah dan adaptasi yang lama, dan dapat digunakan sebagai tata pengaturan masyarakat lokal. Kearifan lokal memainkan peran strategis yang didukung oleh nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya dan berpotensi untuk mencegah kerusakan alam dan ekosistem hutan serta memicu keberlanjutan (*sustainability*).

Kata Kunci : Perizinan; Penggunaan Air Bawah Tanah; Nilai Kearifan Lokal

URGENSI DAN IMPLEMENTASI PERBANDINGAN WAKAF PRODUKTIF ANTAR NEGARA DEMI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Mukharom, Dhian Indah Astanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
mukharom@usm.ac.id

Abstract

Productive Waqf is a scheme of managing waqf donations from the community, by producing the donations, so that they are able to generate a sustainable surplus. This productive waqf surplus becomes a source of endowment funds for financing the needs of the community. The development of waqf also adapts to the current situation and conditions, such as the covid 19 pandemic that we do not know when it will end, but its need or utilization is very necessary for the welfare of society. Productive waqf in various countries that have been run and managed is very important to study and adopt the positive side which of course can be applied in Indonesia. This research was conducted descriptively analytically. The approach used is empirical juridical, so the data used in this research are primary data, and secondary data. Primary data is collected by interviewing the subjects determined by the researcher, namely the authorized agency/institution, while secondary data is obtained from literature, laws and regulations and related documents. The problem is how the urgency and implementation of productive waqf and how the forms of productive waqf. The result is that the development of waqf does not only occur in Islamic countries or countries where the majority of the population is Muslim. In the United States, for example, as a country whose Muslim population is still a minority, they are able to develop existing waqf productively. To develop waqf assets, various programs are carried out that greatly support the increase of waqf assets. Programs related to the development and utilization of waqf assets have received a lot of support from various parties. This is clearly one of the country's success factors in managing waqf.

Keywords: Productive Waqf, Covid 19, Welfare

Abstract

Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat. Perkembangan wakaf juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, seperti adanya pandemi covid 19 yang tidak kita ketahui kapan berakhirnya, namun kebutuhannya atau pemanfaatannya sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif diberbagai negara yang telah dijalankan dan dikelola sangat penting untuk dipelajari dan diadopsi sisi positifnya yang tentunya dapat diaplikasikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan adalah *juridis empiris*, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara kepada subyek yang ditentukan peneliti, yakni instansi/lembaga yang berwenang, sedangkan data sekunder diperoleh dari literature, peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Adapun permasalahannya adalah bagaimana urgensi dan implementasi wakaf produktif dan bagaimana bentuk-bentuk wakaf produktif. Hasilnya adalah pengembangan wakaf tidak hanya terjadi di negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Amerika Serikat misalnya, sebagai negara yang penduduk Muslimnya masih minoritas, mereka mampu mengembangkan wakaf yang ada secara produktif. Untuk mengembangkan harta wakaf, dilakukan berbagai program yang sangat menunjang peningkatan harta wakaf. Program-program yang berkenaan dengan pengembangan dan pemanfaatan harta wakaf banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal ini jelas merupakan salah satu factor keberhasilan negara dalam mengelola wakaf.

Katakunci: Wakaf Produktif, Covid 19, Kesejahteraan.

**NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA PERKOPERASIAN DALAM MEWUJUDKAN
DESA MANDIRI BERKELANJUTAN**

Nur Sulistyo Budi Ambarini

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia
ambarini@unib.ac.id

Abstract

Independent and sustainable villages are an ideal mandated in Law No. 6 of 2014 concerning Villages in implementing rural development. Based on Article 78 of Law No. 6 of 2014, independent villages have three objectives of village development, namely community welfare, quality of life and poverty reduction. One of the pillars supporting an independent village that is the basis for community welfare is economic resilience. To achieve economic resilience in rural areas, the role of economic institutions is very important to drive the village economy. However, the problem in many villages in Indonesia is that economic institutions such as BUMDes, cooperatives and so on have not been able to play an optimal role. By using a non-doctrinal legal research method through a sociolegal research approach, this research aims to examine the values of local wisdom as social capital to strengthen and develop economic economic institutions, especially cooperatives in rural areas. Cooperatives as legal entities are economic institutions that can act as drivers of the rural economy. Therefore, it is very important to provide strengthening by exploring local wisdom values that can become social capital in developing cooperatives as economic drivers in the village.

Keywords: *Village; Self-reliance; Sustainable; Local wisdom; Social capital; Cooperative*

Abstrak

Desa mandiri dan berkelanjutan merupakan suatu cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam melaksanakan Pembangunan pedesaan. Hal tersebut sebagai Upaya dalam mewujudkan nawacita ketiga Presiden RI yaitu “Membangun Negara Kesatuan RI dari pinggir”. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa mandiri memiliki tiga tujuan Pembangunan desa yaitu kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu pilar penyangga desa mandiri yang menjadi dasar kesejahteraan Masyarakat adalah ketahanan ekonomi. Untuk mencapai ketahanan ekonomi di pedesaan peran lembaga ekonomi sangat penting untuk menggerakkan perekonomian desa. Namun demikian yang menjadi persoalan di banyak desa di Indonesia, belum berperannya lembaga ekonomi seperti BUMDes, Koperasi dan sebagainya belum dapat berperan secara optimal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum non doctrinal melalui pendekatan sociolegal research, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial penguatan dan pengembangan lembaga ekonomi ekonomi khususnya koperasi di pedesaan. Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum merupakan lembaga ekonomi yang dapat berperan sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan penguatan dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi modal sosial dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak perekonomian di desa.

Katakunci: Desa; Kemandirian; Berkelanjutan; Kearifan lokal; Modal sosial; Koperasi

PARTISIPASI MASYARAKAT SUKU BADUY DALAM PEMILU SERENTAK 2024

Nur Aida

Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia
nuraidah.dpb@gmail.com

Abstract

Legal homogeneity is one of the directions of national legal development, which not only prepares normative or regulatory aspects, but also takes into account the legal realities that live in society. Community culture is part of local wisdom that reflects the character of noble values, rules as a living law. It is influential in people's lives and sometimes, its influence beats the positive law formulated by the State. Living law is dynamic in line with the development of society. One of the instruments that make it dynamic is, among others, through provisions made by the customary head or those considered to have authority in the customary community, in order to meet the legal needs of people who feel there is uncertainty so that there is certainty. How does the State behave towards living law in society? As a democratic state, the state must formulate indigenous people's law into positive law according to the needs of the indigenous people or the state respects the living law in indigenous people and facilitates that the living law can be implemented well in Indonesia. Baduy indigenous people who are part of Indonesian citizens, have the same rights and obligations as other Indonesian citizens, the uniqueness of the Baduy indigenous people with its own living law character, encourages the state and the Baduy indigenous people to move progressively and responsively to the development of national law. This research method is conducted with descriptive method with qualitative approach. The data collection methods are observation, in-depth interview, and literature study.

Keywords: *Participation; Baduy tribe community; Simultaneous election.*

Abstrak

Homogeni hukum salah satu arah pembinaan hukum nasional, yang bukan hanya mempersiapkan aspek normatif atau pengaturan saja, tetapi juga dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan hukum yang hidup di masyarakat. Budaya masyarakat bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan karakter nilai-nilai luhur, kaidah sebagai kenyataan hukum yang hidup (living law). Ia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang, daya pengaruhnya mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh Negara. Hukum yang hidup bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuat dinamis adalah antara lain melalui ketentuan yang dibuat oleh Kepala adat atau yang dianggap mempunyai otoritas di dalam masyarakat adat, guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan supaya ada kepastian. Bagaimana Negara bersikap terhadap living law di masyarakat? Sebagai negara demokratis, maka negara harus memformulasikan hukum masyarakat adat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan masyarakat adat bersangkutan atau Negara menghormati hukum yang hidup di masyarakat adat dan memfasilitasi agar hukum yang hidup dapat terlaksana dengan baik di negara Indonesia. Masyarakat Adat suku Baduy yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, kekhasan masyarakat adat suku Baduy dengan memiliki karakter living law tersendiri, mendorong negara maupun masyarakat adat suku baduy untuk bergerak progresif dan responsif terhadap pembangunan hukum Nasional. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa pengamatan (observasi), wawancara mendalam dan studi literatur.

Katakunci: Partisipasi; Masyarakat suku Baduy; Pemilu serentak.

NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ADAT SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF

Rosnidar Sembiring, Nurhadi Ahmad Juang
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
nurhadiahmadjuang@students.usu.ac.id

Abstract

The values of local wisdom are often embedded in the joints of customary law, including in customary economic law. The traditional/indigenous economic system is an economic system applied by traditional/indigenous communities for generations by relying solely on nature and labor, as well as traditional equipment. The existence of this system and customary economic law is considered necessary to know more about how the system and customary economic law exist in several regions in Indonesia, it is also necessary to examine how the concept of a customary economic system contains local wisdom values and the role of the state in the development of customary economic law in order to create progressive and responsive law. The data source used is secondary data. The views of judges, communities and parties involved in using this economic law are not used as respondents, but the author conducts a study of how customary economic law operates in several regions in Indonesia, existing literature and theories. The diverse customary law communities in Indonesia certainly have diverse cultural patterns and customary laws. The state in this case can be present to play a role in publishing a system or a series of regulations adopted from the diverse customary economic systems and laws spread throughout Indonesia. Customary law communities can also be empowered by the Indonesian state in basing progressive and responsive legal development. This is also done in order to realize the goals of the state as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The role of the state is also highly treated for the improvement and empowerment of indigenous peoples with their local wisdom values, so that a progressive legal paradigm is built, where the law is for humans not humans for the law.

Keywords: *Local Wisdom; Customary Economy; Progressive Law.*

Abstract

Nilai-nilai kearifan lokal kerap melekat dalam sendi-sendi hukum adat, termasuk dalam hukum perekonomian adat. Sistem ekonomi tradisional/adat merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional/adat secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja, serta peralatan tradisional. Adanya sistem dan hukum perekonomian adat ini, dinilai perlu untuk diketahui lebih lanjut bagaimana sistem dan hukum perekonomian adat yang ada pada beberapa daerah di Indonesia, perlulah juga kiranya untuk mengkaji bagaimana konsep sistem perekonomian adat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan peran negara dalam pengembangan hukum perekonomian adat guna terciptanya hukum yang progresif dan responsif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Tidak digunakan pandangan hakim, masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam menggunakan hukum perekonomian ini sebagai responden, melainkan penulis melakukan studi tentang bagaimana hukum perekonomian adat berjalan pada beberapa daerah di Indonesia, pustaka dan teori-teori yang ada. Masyarakat hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia tentunya mempunyai corak kebudayaan dan hukum adat yang beragam pula. Negara dalam hal ini dapat hadir berperan menerbitkan suatu sistem ataupun serangkaian regulasi yang diadopsi dari sistem dan hukum perekonomian adat yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat hukum adat juga dapat diberdayakan oleh negara Indonesia dalam mendasarkan pembangunan hukum yang progresif dan responsif. Hal ini juga dilakukan guna terwujudnya tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Peran negara juga sangat diperlakukan guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat adat dengan nilai kearifan lokalnya, sehingga terbangun sebuah paradigma hukum progresif, dimana hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Kata Kunci: Kearifan Lokal; Perekonomian Adat; Hukum Progresif.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI

¹Sri Astutik, ²Dudik Daja Sidharta, ³Subekti, ⁴Nur Handayati

Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo
sri.astutik@unitomo.ac.id

Abstract

Hajj is an act of worship that is highly recommended for Muslims who are able. Hajj requires a lot of money and currently has to queue for a long time for regular pilgrims. In order to be able to leave for Hajj with a fast time and not have to wait long, prospective pilgrims can leave by using the Hajj Plus and Hajj Furoda quota facilities, which are organized by Special Hajj Organizers (PIHK), although the cost is more expensive than Regular Hajj. Based on Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah, there are two types of legal Hajj visas that can be used to depart for Hajj, namely Indonesian quota Hajj visas (regular Hajj and Special Hajj quotas) and mujamalah Hajj visas (Invitation of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia) commonly referred to as Hajj Furoda. The Government of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia have banned the use of non-Hajj visas for prospective pilgrims, but there are still many prospective pilgrims who depart using non-Hajj visas, because it is faster to depart. Pilgrims with non-Hajj visas have the risk of getting into legal trouble because they can be caught by Saudi Arabian security forces, can be deported, fined a sum of money, banned from entering the Holy Land for 10 years and difficult to get help when lost or separated from the group. Hajj pilgrims with non-Hajj visas must receive legal protection because they are victims of irresponsible individuals. The perpetrators or agents of Hajj organizers can be given severe sanctions, including license revocation.

Keywords: Protection; Law; Hajj; Non-Hajj Visa.

Abstrak

Haji merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan waktu yang cepat dan tidak perlu menunggu lama, maka calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasilitas kuota Haji Plus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), meskipun biaya lebih mahal dibandingkan dengan Haji Reguler. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, terdapat dua jenis visa haji legal yang dapat digunakan untuk berangkat haji, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji reguler dan Haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undang Undang Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) yang biasa disebut Haji Furoda. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah melarang menggunakan visa non haji bagi calon Jamaah haji, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji, karena lebih cepat berangkat. Jamaah dengan visa non haji mempunyai risiko mendapatkan masalah hukum karena bisa tertangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi, bisa dideportasi, denda sejumlah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat pertolongan ketika tersesat atau terpisah dengan rombongan. Jamaah haji dengan visa non haji wajib mendapat perlindungan hukum karena mereka merupakan korban dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Terhadap pelaku atau agen penyelenggara ibadah haji dapat diberikan sanksi yang berat, termasuk penzabutan izin.

Katakunci : Perlindungan; Hukum; Haji; Non Visa Haji.

KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA-PERTAMBANGAN TIMAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG

IGA Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adi, Agung Basuki Prasetyo

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia
ganggasanti@gmail.com,

Abstract

State control over the earth, water and space means giving the state authority to regulate and organize the allocation, use, supply and maintenance of the earth, water and space, between people and the earth, water and space. The large number of mining requests in Belitung Regency on the coast and sea illegally encourages the state with its policies to reclaim mining results by maintaining sustainable environmental conditions. This research uses primary data and secondary data. Primary data was collected through observation in the reclamation area and in-depth interviews with respondents from land managers, related agencies, informants and competent key-persons. Secondary data was obtained through reviewing policies, local community habits as local wisdom to preserve a sustainable environment. The results showed that in Belitung Regency many coastal and marine areas were used for mining which damaged the environment, so a government policy was held. The target of orientation activities, namely all elements of society and related parties, is expected to benefit all parties so that no party feels disadvantaged. The rehabilitation method with a planting pattern using Rhizophora species seedlings on the grounds that these seedlings are easily available and strong to withstand the tides.

Keywords: Policy; Reclamation; Post-mining; Sustainable.

Abstrak

Penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa mengandung arti memberi wewenang negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Banyaknya permintaan pertambangan di Kabupaten Belitung di pesisir dan laut secara ilegal mendorong negara dengan kebijakannya mereklamasi hasil pertambangan dengan menjaga kondisi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi di kawasan reklamasi dengan wawancara mendalam dengan responden pengelola lahan, dinas terkait, informan maupun pihak/ tokoh kunci (key-persons) yang berkompeten. Data sekunder diperoleh melalui mengkaji kebijakan, kebiasaan masyarakat setempat sebagai kearifan lokal menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan di Kabupaten Belitung banyak areal pesisir dan laut yang digunakan untuk pertambangan yang merusak lingkungan, maka diadakan kebijakan pemerintah. Target kegiatan orientasi yaitu seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Metode rehabilitasi dengan pola penanaman menggunakan bibit jenis *Rhizophora* dengan alasan bibit ini mudah didapatkan dan kuat menahan laju dari pasang surut air laut.

Katakunci : Kebijakan; Reklamasi; Pasca-pertambangan; Berkelanjutan.

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Joice Soraya¹, Muhammad Ansy Althafzufar²

¹Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

¹joicewijayas99@gmail.com, ²muhammadansy96@gmail.com

Abstract

Environmental Impact Assessment (EIA) is an important instrument in Indonesia's environmental law system to minimize the negative impacts and maximize the positive impacts of a development project on the environment. However, the effectiveness of EIA is often constrained by various factors, such as lack of community participation, data limitations, and conflicts of interest. On the other hand, Indonesia has a wealth of local wisdom that has proven to play an important role in environmental conservation. This study aims to analyze the urgency and mechanism of integration of local wisdom in EIA as an effort to strengthen the environmental legal system in Indonesia, as well as its implications for legitimacy, effectiveness, and justice in environmental management. This research uses normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The results show that the integration of local wisdom in EIA is a necessity to realize a strong, fair, and sustainable environmental legal system in Indonesia. Local wisdom has significant potential to complement and enrich conventional EIAs that tend to be technical and formalistic. The integration of local wisdom can increase the legitimacy and effectiveness of environmental law, as well as community participation and compliance with environmental management policies. However, the integration of local wisdom can also pose challenges, such as potential conflicts with positive legal norms and the risk of fragmentation in the application of environmental law, so a holistic and integrative approach is needed. This study concludes that the integration of local wisdom in AMDAL is a strategic step to strengthen the environmental legal system in Indonesia. In the long run, this integration is expected to contribute to the realization of a more just, participatory, and sustainable environmental legal system.

Keywords: EIA, Environmental Law, Local Wisdom

Abstrak

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen penting dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari suatu proyek pembangunan terhadap lingkungan. Namun, efektivitas AMDAL seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan data, dan konflik kepentingan. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang telah terbukti berperan penting dalam pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan mekanisme integrasi kearifan lokal dalam AMDAL sebagai upaya penguatan sistem hukum lingkungan di Indonesia, serta implikasinya terhadap legitimasi, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam AMDAL merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan sistem hukum lingkungan yang kuat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Kearifan lokal memiliki potensi yang signifikan untuk melengkapi dan memperkaya AMDAL konvensional yang cenderung bersifat teknis dan formalistik. Integrasi kearifan lokal dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum lingkungan, serta partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Namun, integrasi kearifan lokal juga dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi konflik dengan norma-norma hukum positif dan risiko fragmentasi dalam penerapan hukum lingkungan, sehingga diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam AMDAL merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum lingkungan di Indonesia. Dalam jangka panjang, integrasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum lingkungan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: AMDAL, Hukum Lingkungan, Kearifan Lokal

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERKENAAN DENGAN TARIF PROGRESIF

(STUDI KASUS DI UPTD SAMSAT WIDODAREN KABUPATEN NGAWI)

Mohammad Choirul Anam,¹ Retno Catur Kusuma Dewi²

^{1,2} Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

Email: mohammadchoirulanam174@gmail.com.

Email: retnocatur63@gmail.com

Abstract

Vehicle tax is included in the local revenue that can support the local revenue and expenditure budget. Progressive tax is collected by increasing the tax to be paid in accordance with the provisions of the tax object. The purpose of this study is to determine the application of progressive tax to motor vehicle taxpayers in the Ngawi Regency area and to determine the legal protection for taxpayers against the imposition of progressive tax on motor vehicles in Ngawi Regency. The method used is empirical legal research. Primary legal sources are obtained through research results and it can be concluded that the imposition of progressive tax on vehicles can increase local revenue on motor vehicle tax (PKB) which is part of the regional revenue and expenditure budget (APBD) of East Java Province which aims to improve structures and infrastructure that support regional welfare. Legal protection for progressive taxpayers is often a problem for vehicle owners because they often do not report that the vehicle has changed hands, causing disputes.

Keywords: *Progressive Tax; Legal Protection; Taxpayer.*

Abstrak

Pajak kendaraan termasuk kedalam pendapatan daerah yang dapat menunjang anggaran pendapatan serta belanja daerah. Pajak progresif pemungutannya dengan cara menaikkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan objek pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Ngawi dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wajib pajak terhadap pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Ngawi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukum primer didapat melalui hasil penelitian dan dapat disimpulkan pengenaan mengenai pengenaan pajak progresif kendaraan dapat meningkatkan pendapatan daerah terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan struktur dan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan daerah. Perlindungan hukum bagi wajib pajak progresif sering menjadi permasalahan bagi pemilik kendaraan dikarenakan seringnya tidak melaporkan bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah tangan sehingga menimbulkan sengketa.

Katakunci: Pajak Progresif; Perlindungan Hukum; Wajib Pajak.

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *LOVE SCAMMING*

Krista Yitawati, Eka Widia Ningrum

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Madiun**

Email: krista@unmer-madiun.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out the development of criminal liability for the perpetrators of Love Scamming and to find out the legal efforts for victims affected by Love Scamming. This legal research is a type of normative legal research. This type of research method is intended to describe the sources of formal legal material obtained based on legal norms or rules relevant to the subject matter. The development of information and communication technology which is increasingly accelerating in today's world, has given rise to a new phenomenon called cybercrime, which can even be done by love scammer communication or love scamming. The type of Indonesian women who prioritize good looks such as white, clean, tall and others. which are all widely owned by foreigners. Making them have high hopes to find husbands from other countries, even though the background of the foreigner is not known for sure. Because of this, many people take advantage of this momentum to commit crimes, especially to women in Indonesia. For readers both from academic backgrounds and the general public to be used as knowledge that do not easily put trust in others, because crime knows no place and time. Based on the results of the research obtained the results of several factors that cause crime by means of love scamming communication to provide solutions. Love Scamming uses a way to involve the emotions or feelings of the victim then utilizes feelings or good intentions to commit fraud. And classified as fraud by spreading false news to attract the attention of its victims.

Keywords: *Fraud; Online Dating; Criminal Actions*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku *Love Scamming* dan untuk mengetahui Upaya hukum bagi korban yang terkena *Love Scamming*. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menjabarkan sumber bahan hukum formal yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin melesat di dunia saat ini, memunculkan fenomena baru yang disebut kejahatan dunia maya (*cybercrime*), bahkan dapat juga dilakukan komunikasi *scammer love* atau *love scamming*. Tipe wanita Indonesia yang mengedepankan *good looking* seperti putih, bersih, tinggi dan lain-lain. yang mana itu semua banyak dimiliki oleh orang asing. Menjadikan mereka mempunyai harapan besar untuk mencari suami dari negara lain, meskipun latar belakang orang asing tersebut belum diketahui secara pasti. Oleh karena hal tersebut banyak orang yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kejahatan, terutama kepada wanita-wanita di Indonesia. Untuk para pembaca baik dari kalangan yang berlatar belakang akademik maupun masyarakat umum agar dijadikan pengetahuan bahwasanya jangan mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain, karena kejahatan tidak mengenal tempat dan waktu. Berdasarkan dari hasil penelitian memperoleh hasil beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dengan cara komunikasi *love scamming* untuk memberikan solusi. *Love Scamming* memakai cara dengan melibatkan emosi atau perasaan korban kemudian memanfaatkan perasaan atau niat baik untuk melakukan penipuan. Dan tergolong penipuan dengan menyebarkan berita bohong untuk menarik perhatian korbanya.

Katakunci : *Penipuan; Kencan Online; Tindakan Pidana*

AKIBAT HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM MEDIA SOSIAL

Anik Tri Haryani¹, Taufiq Yuli Purnama²

^{1,2} Dosen fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

¹anik@unmer-madiun.ac.id

²taufiqyp@unmer-madiun.ac.id

Abstract

This research aims to provide an understanding to the entire community relating to the legal consequences of expressing opinions on social media. Social media can no longer be separated from the routine of human life. Social media plays an important role in globalization and the entry of foreign cultures into Indonesia because through this platform, people connect with each other in any context without being limited by time, place, and subject. All people have the right to express their opinions as regulated in Article 28E of the 1945 Constitution and Law Number 1 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 1 of 2008 on Electronic Information and Transactions and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. In this case, restrictions on public opinion or on social media can backfire when the way to convey it is wrong. The research method used in this research is the Normative Juridical research method, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law, as a consequence of the selection of legal problem topics. The results of this study are in several regulations in Indonesia that regulate freedom of speech on social media. That freedom of speech is still misused as opinion knows no boundaries in the form of defamation and hate speech. Freedom of speech must be accompanied by ethics and morals as mandated by Pancasila.

Keywords: *Freedom of speech; Moral ethics; Social media.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat yang berkaitan dengan akibat hukum dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Media sosial tidak dapat lagi dilepaskan dari rutinitas hidup manusia. Media sosial berperan penting dalam globalisasi dan masuknya budaya luar ke Indonesia karena melalui platform ini, manusia terhubung satu sama lain dalam konteks apapun tanpa terbatas waktu, tempat, dan subjek. Semua masyarakat memiliki hak dalam mengemukakan pendapat seperti yang di atur dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pembatasan berpendapat dimuka umum atau di media sosial bisa menjadi bumerang ketika cara menyampaiannya yang salah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum. Hasil penelitian ini adalah dalam beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di media sosial. Bahwa kebebasan berpendapat masih di salah gunakan seperti berpendapat tidak kenal batas dalam bentuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat harus di sertai etika dan moral seperti yang di amanatkan Pancasila.

Katakunci: Kebebasan berpendapat; Etika moral; Media social.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HOMOGRAPH

Meirza Aulia Chairani¹, Bambang Sukarjono²

¹⁻²Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun

¹meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the pattern of homograph crime. To find out the criminal responsibility for perpetrators of homograph crimes. The research methodology used is normative juridical research, which uses a statutory approach and conceptual approach. So this research looks for patterns of homograph criminal offenders deceiving victims by using writing similar to the original web, for victims who are not careful about the web name and official web url link by the perpetrators of homograph crimes will carry out the action by breaking into their personal data to enter banking access and access-askse that can be broken into by the perpetrators of homograph crimes. Criminal liability for homograph offenders is temporarily regulated in Article 35 of the ITE Law and gets a maximum sanction of 12 years and a fine of 12 billion rupiah contained in Article 51 of the ITE Law and Article 378 of the old Criminal Code and Article 492 of the new Criminal Code with fraud. Making a website by asking for the same form of writing as the original website so that the perpetrator of this homograph crime can trick the victim and can easily access the victim's personal data or what is often called web forgery makes the web similar to the original. The victim enters his user id and password and the data will be stored in the data base on the website and the perpetrator can easily use the data for his interests. For the perpetrator by accessing the victim's personal data that has entered the fake web, he can be subject to Article 67 of the PDP Law because he unlawfully uses other people's personal data without permission.

Keywords: Criminal Responsibility; Perpetrators of Crimes; Homograph.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola tindak pidana homograph. Untuk mengetahui peratnggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana homograph. Dengan Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maka penelitian ini mencari pola pelaku tindak pidana homograph mengelabui korban dengan menggunakan tulisan yang serupa dengan web aslinya, bagi korban yang tidak teliti terhadap nama web dan link url web resmi oleh pelaku tindak pidana homograph akan melakukan aksinya dengan membobol data pribadinya untuk masuk ke akses perbankan dan akses-askse yang bisa di bobol oleh pelaku tindak pidana homograph. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku homograph ini sementara di atur di dalam Pasal 35 UU ITE dan mendapatkan sanksi paling lama 12 tahun denda 12 miliar rupiah terdapat dalam Pasal 51 UU ITE dan Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP baru dengan tindak piddana penipuan. Pembuatan situs website dengan menyakan bentuk tulisan yang sama dengn website asli makan pelaku tindak pidana homograph ini dapat mengelabui korban dan dapat mudah di aksisesnya data pribadi korban atau yang sering disebut dengan web forgery membuat web mirip dengan aslinya. Korban masukan user id dan paswordnya makan data akan tersimpan di data base di situs website tersebut dan pelaku dapat dengan muah menggunakan data tersebut untuk kepentinganya. Bagi pelaku dengan mengakases data pribdai korban yang sudah masuk web palsu tersebut dapat dikenai Pasal 67 UU PDP karena secara melawan hukum menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin.

Katakunci : Pertanggung Jawaban Pidana; Pelaku Tindak Pidana; Homograph.

**HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT:
SEBUAH PERBANDINGAN HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI *CITIZEN LAW SUIT***

Sigit Sapto Nugroho, Sarjiyati

^{1,2}**Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun**
sightsapto@unmer-madiun.ac.id, sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

Abstract

This research provides an explanation that every citizen has the right to obtain constitutional guarantees to live and obtain a good and healthy environment to grow and develop as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution, the Charter of Human Rights, the Stockholm Declaration and several constitutions of countries in the world. This research uses normative juridical research methods, where research is sourced from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the research show that: Comparison of arrangements regarding the Right to a healthy environment in various countries bears the burden of obligation to the state to maintain and preserve the carrying capacity of the environment. The existence of a Citizen Law Suit legal breakthrough is an alternative citizen's right to demand government responsibility for policies that harm citizens' rights through a lawsuit in court.

Keywords: *Environmental Rights, Citizen Law Suit*

Abstrak

Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh jaminan konstitusi untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, Piagam Hak Asasi Manusia, Deklarasi Stockholm dan beberapa konstitusi negara-negara di dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dimana penelitian bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perbandingan pengaturan mengenai Hak atas lingkungan yang sehat di berbagai negara memikul beban kewajiban kepada negara untuk menjaga dan melestarikan daya dukung lingkungan hidup. Adanya terobosan hukum *Citizen Law Suit* merupakan sebuah alternatif hak warga negara untuk menuntut tanggung jawab pemerintah atas kebijakan yang merugikan hak warga negara melalui gugatan di Pengadilan.

Katakunci: *Hak Atas Lingkungan, Citizen Law Suit*

RECONSTRUCTION OF CUSTOMARY LAW IN DEVELOPMENT

AGRARIAN LAW IN THE FIELD OF MORTGAGE RIGHTS

Anita Kamilah, Hesti Dwi Astuti, Grace E. Tambun, & Ajeng Permana

Faculty of Law, Suryakencana University

¹*anitakamilah@unsur.ac.id*

²*dwiastutihesti6@gmail.com*

³*graceetbn03@gmail.com*

⁴*ajengpermana21@gmail.com*

Abstract

Customary law as one of the sources of Indonesian national law that is local and traditional, has a great influence in the development of agrarian law, and has relevance in overcoming the problems faced by the Indonesian people in the era of globalization. This research has an important role in examining issues regarding: (1) Customary law as the basis of Indonesian national agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law in Indonesian national agrarian law in the field of mortgage rights. The method used in this research, through a doctrinal legal research approach, descriptive analysis research specifications, types and sources of data come from secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis is carried out qualitatively. The results of the study; (1) The enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles is not based on western colonial agrarian law, but is based on customary law as a manifestation of Indonesian legal politics to eliminate dualism in agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law institutions in the land sector is carried out by incorporating the concepts and principles of customary law into new legal institutions, including land mortgages, which are a source of inspiration for the formation of national law.

Keywords: *Agrarian law; Customary law; Mortgage rights; Reconstruction*

Abstrak

Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional Indonesia yang bersifat lokal dan tradisional, memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan hukum agraria, serta memiliki relevansi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi. Penelitian ini memiliki peran penting dalam mengkaji permasalahan mengenai: (1) Hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional Indonesia; dan (2) Rekonstruksi hukum adat dalam hukum agraria nasional Indonesia di bidang hak tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, melalui pendekatan penelitian hukum doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data berasal dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian; (1) Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak didasarkan pada hukum agraria kolonial barat, tetapi didasarkan pada hukum adat sebagai perwujudan dari politik hukum Indonesia untuk menghilangkan dualisme dalam hukum agraria; dan (2) Rekonstruksi pranata hukum adat di bidang pertanahan dilakukan dengan cara memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam pranata hukum yang baru, termasuk di dalamnya adalah hak tanggungan atas tanah, yang menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum nasional.

Kata kunci: Hukum agraria; Hukum adat; Hak tanggungan; Rekonstruksi

ANALISIS ALIH FUNGSI HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN HOTEL, PERUMAHAN, DAN VILLA DIKAWASAN PUNCAK - CIANJUR

M. Budi Mulyadi, M. Raka Pratama Nurjati

¹Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana ²Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,
¹ mbudimulyadi@unsur.ac.id; ² rakamuhammad88@gmail.com.

Abstract

The Puncak area is a mountainous region that has become a popular tourist destination, both for domestic and foreign tourists. The rapid development of hotels, housing, and villas in this area has led to uncontrolled conversion of forest land. This not only brings positive impacts, but also negative impacts on the environment. This study aims to analyze the implementation of forest conversion permits and the impacts arising from development in the Puncak area. The research method used is descriptive qualitative, by describing and explaining the factors causing the conversion of forest land. The results of the study indicate that the control of the construction of hotels, housing, and villas in the Puncak area still has many irregularities and has not been implemented effectively. This is due to the widespread illegal construction without a building permit (IMB). This study concludes that the control and supervision of development in the Puncak area needs to be tightened and supervised by strictly enforcing policy regulations so that forests are maintained according to their designated purpose. This research provides a new contribution in analyzing the issue of forest conversion for development in strategic areas, and emphasizes the importance of law enforcement and good governance in controlling spatial utilization.

Keywords: *Development; Environmental impact; Forest conversion; Licensing; Spatial planning.*

Abstrak

Kawasan Puncak merupakan daerah pegunungan yang menjadi tujuan wisata populer, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pesatnya pembangunan hotel, perumahan, dan villa di kawasan ini telah menyebabkan alih fungsi lahan hutan yang tidak terkendali. Hal ini tidak hanya membawa dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan izin alih fungsi hutan serta dampak yang ditimbulkan dari pembangunan di kawasan Puncak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan dan menjelaskan faktor penyebab alih fungsi lahan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian pembangunan hotel, perumahan, dan villa di kawasan Puncak masih banyak penyimpangan dan belum terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan oleh masih maraknya pembangunan ilegal tanpa izin mendirikan bangunan (IMB). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan pembangunan di kawasan Puncak perlu diperketat serta diawasi dengan pemberlakuan regulasi kebijakan secara tegas agar hutan tetap terjaga sesuai peruntukannya. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam menganalisis isu alih fungsi hutan untuk pembangunan di kawasan strategis, serta menekankan pentingnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Kata Kunci: *Alih Fungsi Hutan; Dampak lingkungan; Pembangunan; Perizinan; Tata Ruang.*

LEGAL PROTECTION OF THE NATION'S CULTURAL IDENTITY IN THE ERA OF GLOBALISATION

Yuyun Yulianah, Mumum M Rozi, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Salsabila Hadi Aulia, Rendy Kurniawan

Faculty of Law, Suryakencana University, Cianjur, Indonesia

²Faculty, University, City, Country
correspondent email address

Abstract

Indonesia is blessed with an extraordinary and diverse cultural wealth, stretching from Sabang to Merauke. Each region has unique traditions, customs, languages, arts and local wisdom that reflect the nation's identity. This cultural wealth is a valuable heritage that has been passed down from generation to generation and has become an integral part of Indonesian life. In the era of globalisation, Indonesian culture is faced with various complex challenges. The heavy influence of foreign culture, liberalisation, westernisation, and internationalisation is eroding the existence of the nation's culture. This can threaten the national identity and cultural heritage that has been preserved for centuries. This research uses a normative juridical method to examine various efforts to preserve Indonesian culture in the era of globalisation. This approach is carried out by analysing various laws and regulations, legal norms, and rules relating to cultural preservation. Preserving Indonesian culture is the shared responsibility of all Indonesian people. This preservation effort must be carried out comprehensively and sustainably, by involving various parties, from the government, the community, to the younger generation.

Keywords: Culture, Globalisation, Challenges, Efforts, Preservation.

Abstrak

Indonesia dianugerahi kekayaan budaya yang luar biasa dan beragam, membentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, bahasa, kesenian, dan kearifan lokal yang unik yang mencerminkan identitas bangsa. Kekayaan budaya ini merupakan warisan berharga yang telah diwariskan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di era globalisasi, kebudayaan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Derasnya pengaruh budaya asing, liberalisasi, westernisasi, dan internasionalisasi mengikis eksistensi budaya bangsa. Hal ini dapat mengancam identitas bangsa dan warisan budaya yang telah dilestarikan selama berabad-abad. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji berbagai upaya pelestarian budaya Indonesia di era globalisasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Melestarikan budaya Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pelestarian ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga generasi muda.

Katakunci: Budaya, Globalisasi, Tantangan, Upaya, Pelestarian.

THE CHALLENGES OF GLOBALISATION: EXISTENCE AND EFFORTS IN MAINTAINING CULTURAL IDENTITY

Saptaning Ruju Paminto, Mia Amalia, Ira Permatasari, Salsa Octaviani Suryanto

Faculty of law, Suryakancana University, Cianjur, Indonesia
miaamalia@unsur.ac.id

Abstract

Culture and social life are one particle that becomes a binding unity, culture faithfully escorts the development of human civilization from pre-Islamic times to the perfect Islamic era as a teaching from ancient Greece to modern times like today. From this long process, culture basically has values that can traditionally be passed on to the next generations. Indonesia is a country that has a lot of culture, which consists of a collection of cultures that exist throughout the Indonesian homeland in the form of local culture. Foreign cultures continue to enter unstopably into Indonesia which can erode or dilute the local culture owned by the Indonesian people. This problem lies in the need for the government's role in protecting Indonesian culture in the era of globalisation, such as in preserving local culture, the government must facilitate all forms of artistic activities held by the community, besides that the government also has a role to provide support in activities related to culture and open as much as possible the participation of young people or adolescents in maintaining its preservation. The research method used is descriptive method, the foundation of the research method is the philosophy of postpositivism. It aims to be able to determine whether the social and cultural life movement will succeed in having a broad impact and provide changes in living standards as expected.

Keywords: Culture; Globalisation; Identity; Law; Transformation.

Abstrak

Budaya dan kehidupan sosial merupakan satu partikel yang menjadi satu kesatuan yang mengikat, budaya dengan setia mengawal perkembangan peradaban manusia dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam yang sempurna sebagai ajaran dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern seperti saat ini. Dari proses yang panjang tersebut, kebudayaan pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang secara turun temurun dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali kebudayaan, yang terdiri dari kumpulan budaya yang ada di seluruh tanah air Indonesia yang berupa budaya lokal. Budaya asing terus masuk tanpa terbandung ke Indonesia yang dapat mengikis atau melunturkan budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Permasalahan ini terletak pada perlunya peran pemerintah dalam menjaga kebudayaan Indonesia di era globalisasi, seperti dalam melestarikan kebudayaan lokal, pemerintah harus memfasilitasi segala bentuk kegiatan kesenian yang diadakan oleh masyarakat, selain itu pemerintah juga memiliki peran untuk memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan dan membuka seluas-luasnya peran serta anak muda atau remaja dalam menjaga kelestariannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang berlandaskan pada metode penelitian filsafat postpositivisme. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah gerakan kehidupan sosial dan budaya tersebut akan berhasil memberikan dampak yang luas dan memberikan perubahan taraf hidup sesuai dengan yang diharapkan.

Katakunci: Budaya; Globalisasi; Identitas; Hukum; Transformasi.

SOCIAL CONFLICT RESOLUTION RELATED TO BULLYING CASES THROUGH THE DELIBERATION SYSTEM BASED ON PANCASILA PERSPECTIVE

Trini Handayani, Aji Mulyana , Cucu Solihah , Azzahra Salsabila Ramadani, Kayla Andini Putri

¹Faculty of Law, Suyakancana University, Indonesia; ²Faculty of Law, Suyakancana University, Indonesia; ³Faculty of Law, Suyakancana University, Indonesia; ⁴Faculty of Law, Suyakancana University, Indonesia; ⁵Faculty of Law, Suyakancana University, Indonesia
trinihandayani@unsur.ac.id¹; ajimulyana@unsur.ac.id²; cucusolihah2012@gmail.com³; azzahra2829@gmail.com⁴; kaylaandiniputri44@gmail.com⁵

Abstract

This article discusses the review of Social Conflict Resolution Related to Bullying Cases Through the Deliberation System Based on the Perspective of Pancasila. Bullying can be physical, verbal, and mental. Bullying cases in Indonesia are increasing and need serious handling. Deliberation based on Pancasila values can be a solution to resolve bullying conflicts peacefully and constructively. A culture of deliberation needs to be promoted in schools and communities to create a safe environment and respect for human rights. This article discusses the importance of resolving bullying-related social conflicts through a deliberation system based on the perspective of Pancasila. Bullying conflicts create tension and hostility in society, and if not properly addressed can affect the school and workplace environment. This research uses a normative juridical research method by referring to literature and internet materials. Bullying is a form of physical and psychological violence that can be experienced by anyone, and has long existed in society. Bullying is increasingly widespread in educational institutions, influenced by family, environmental, peer group, and media factors. Victims of bullying experience psychological, physical, social and academic impacts. Perpetrators of bullying also experience psychological, social, academic and long-term impacts. The resolution of bullying conflicts can be done through deliberation based on the values of Pancasila, but if not, the conflict can be resolved through deliberation.

Keywords: Bullying; Deliberation; Health; Mental; Pancasila.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai tinjauan Penyelesaian Konflik Sosial Terkait Kasus Perundungan Melalui Sistem Musyawarah Berdasarkan Perspektif Pancasila. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, dan mental. Kasus bullying di Indonesia semakin meningkat dan perlu penanganan yang serius. Musyawarah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik perundungan secara damai dan konstruktif. Budaya musyawarah perlu digalakkan di sekolah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi manusia. Artikel ini membahas pentingnya menyelesaikan konflik sosial terkait perundungan melalui sistem musyawarah berdasarkan perspektif Pancasila. Konflik perundungan menciptakan ketegangan dan permusuhan di masyarakat, dan jika tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi lingkungan sekolah dan tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada bahan kepustakaan dan internet. Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dapat dialami oleh siapa saja, dan telah lama ada di masyarakat. Bullying semakin marak terjadi di lembaga pendidikan, dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, peer group, dan media. Korban perundungan mengalami dampak psikologis, fisik, sosial, dan akademis. Pelaku bullying juga mengalami dampak psikologis, sosial, akademis dan dampak jangka panjang. Penyelesaian konflik perundungan dapat dilakukan melalui musyawarah yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, namun jika tidak, konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Kata kunci: Perundungan; Musyawarah; Kesehatan; Mental; Pancasila

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI SAMARINDA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Yatini, Tombur Ompu Sunggu

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Yatini@uwgm.ac.id

Abstract

National legal development often ignores local wisdom that has great potential in creating a fair and inclusive legal system. The tradition of buying and selling in Samarinda, which ends with “beredaan-lah”, is one example of local wisdom that contains values of justice, honesty and trust, but has not been widely integrated into national legal policy. Therefore, the problem studied is how the values contained in the tradition, “beredaan lah”, can be integrated in the development of progressive and responsive national law. The purpose of this research is to explore and analyze the values contained in the tradition, “beredaan lah” and evaluate its relevance in national legal development. The research method is normative juridical, with an interpretative approach and prescriptive analysis techniques. The results show that the tradition, “beredaan-lah”, contains important values such as distributive, social trust, and moral responsibility that contribute to social harmonization and economic stability in Samarinda. The integration of these values in the national legal framework can increase the legitimacy and effectiveness of the law and create a legal system that is more inclusive and responsive to the needs of local communities. The recommendation is the importance of recognizing and integrating local wisdom in national legal development to achieve more holistic and sustainable justice.

Keywords: Local Wisdom; Samarinda; Buying and Selling; Legal Development.

Abstrak

Pembangunan hukum nasional sering kali mengabaikan kearifan lokal yang memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif. Tradisi jual beli di Samarinda yang diakhiri dengan “beredaan-lah”, adalah salah satu contoh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepercayaan, namun belum banyak diintegrasikan dalam kebijakan hukum nasional. Sehingga permasalahan yang diteliti, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, “beredaan lah”, dapat diintegrasikan dalam pembangunan hukum nasional yang progresif dan responsif. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, “beredaan lah” serta mengevaluasi relevansinya dalam pembangunan hukum nasional. Metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan interpretasi dan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi, “beredaan-lah”, mengandung nilai-nilai penting seperti distributif, kepercayaan sosial, dan tanggung jawab moral yang berkontribusi terhadap harmonisasi sosial dan stabilitas ekonomi di Samarinda. Integrasi nilai-nilai dalam kerangka hukum nasional dapat meningkatkan legitimasi dan efektifitas hukum serta menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Rekomendasinya adalah pentingnya mengakui dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional untuk mencapai keadilan yang lebih holistic dan berkelanjutan.

Katakunci: Kearifan Lokal; Samarinda; Jual beli; Pembangunan Hukum.

FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK DAERAH (*GOOD REGIONAL GOVERNANCE*)

Jaidun, Syaharie Jaang

Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia

doktorjaidun@gmail.com, syahariejaanguwgm@gmail.com,

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) is a representative institution containing a collection of Political Party members who are elected as members of the Regional People's Representative Council (DPRD) in a general election which has an important role in realizing good regional government through the function of legislation in the context of the formation of legal products (Regional regulations) are responsive and aspirational and the Regional People's Representative Council (DPRD) has political responsibility in seeking to increase local democratic development and realize good regional governance. Efforts to realize good regional governance will be carried out well through aspirational and responsive legal instruments (Regional Regulations). So that the maximum effort in improving the performance of the Regional People's Representative Council (DPRD) includes, among other things, capturing public aspirations through a sociological approach to community leaders and interfaith leaders as well as non-governmental organizations (NGOs) who are concerned with realizing good regional governance which can be carried out through Hearing Meetings. Opinion (RDP) to obtain information and data as material in the formation of Regional Regulations.

Keywords: Function of DPRD Legislation, Good Regional Government

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan yang berisi kumpulan para anggota Partai Politik yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam suatu pemilihan umum memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik melalui fungsi legislasi dalam konteks pembentukan produk hukum (Peraturan daerah) yang responsif dan aspiratif serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggungjawab politik dalam mengupayakan peningkatan pembangunan demokrasi lokal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik akan terlaksana dengan baik melalui perangkat hukum (Peraturan Daerah) yang aspiratif dan responsif. Sehingga upaya maksimal dalam meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) antara lain adalah menjaring aspirasi publik melalui pendekatan sosiologis kepada para tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen dalam mewujudkan pemberintahan daerah yang baik dapat dilaksanakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendapatkan informasi dan data sebagai bahan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi DPRD, Pemerintahan Daerah Yang Baik

INDEPENDENSI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DIKOTA SAMARINDA

Dinny Wirawan Pratiwie¹

Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia¹

dinipratiwie@gmail.com

Abstract

*An independent, impartial, competent, transparent, accountable and authoritative judiciary capable of upholding the authority of law, legal protection, legal certainty and justice is a *conditio sine qua non* or absolute requirement in a state based on law. The judiciary is the main pillar in upholding law and justice. Therefore, the existence of the Judicial Commission is very important, given the need to maximize supervision of judicial institutions both internally and externally. In carrying out its duties, the Judicial Commission is obliged to maintain the independence and freedom of judges in adjudicating and deciding cases, as well as in supervising the behavior of judges, the Judicial Commission must be independent, not to be influenced or influenced by anyone and anything. The purpose of this study, namely to find out about the independence of the East Kalimantan Judicial Commission liaison in the implementation of supervision of judge behavior in Samarinda City and to find out the obstacles of the East Kalimantan Judicial Commission liaison in the implementation of supervision of judge behavior in Samarinda City. This research was prepared using normative juridical research. The independence of the Liaison of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia of East Kalimantan Province in conducting supervision of judges is by setting limits in interacting both physically and non-physically with people or parties related to reports of alleged violations that are being handled. While the obstacles of PKY Kaltim in supervising the behavior of judges are, first, PKY Kaltim must be more selective in receiving reports for monitoring reports or complaints from the public. Second, the involvement of the community to participate in supervising to maintain the honor and authority of judges, Third, data or information provided to PKY Kaltim to follow up reports on alleged violations committed by judges.*

Keywords: *Supervision; Judges; Judicial Commission*

Abstrak

Peradilan yang mandiri, tidak memihak, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Yudisial menjadi sangat penting, mengingat perlunya memaksimalkan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik secara internal maupun eksternal. Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara, begitupula dengan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial harus bersikap independen, tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui mengenai independensi penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pengawasan perilaku hakim di Kota Samarinda serta mengetahui kendala penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pengawasan perilaku hakim di Kota Samarinda. Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Independensi Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan terhadap hakim yaitu dengan melakukan batasan-batasan dalam berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik dengan orang-orang atau pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran yang sedang ditangani. Sedangkan kendala PKY Kaltim dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yaitu, pertama, PKY Kaltim harus lebih selektif dalam menerima laporan untuk dilakukannya pemantauan terhadap laporan atau aduan dari masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim, Ketiga, data atau informasi yang diberikan kepada PKY Kaltim untuk menindaklanjuti laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim.

Katakunci: Pengawasan; Hakim; Komisi Yudisia

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA PENGEMBANGAN UMKM DI SAMARINDA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF

Wahyuni Safitri, Nainuri Suhadi.
Universitas Widyagama Mahakam Samarinda
wahyunibun@gmail.com, nainuri.suhadi@uwgm.ac.id

Abstract

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Samarinda is one of the main keys to improving the local economy and community welfare. In this context, the application of local wisdom values is crucial to ensure the sustainability and success of MSMEs. Local wisdom values, such as gotong royong, ecological wisdom, and local ethics and culture, not only support MSME competitiveness and innovation, but also strengthen community identity and social cohesion. Progressive and responsive national legal development must be able to accommodate and integrate these local wisdom values. Responsive laws can adapt to the real needs and conditions on the ground, while progressive laws ensure that regulations and policies continue to evolve along with social, economic and technological changes. In this case, regulations that take into account local wisdom are able to provide more effective protection and support to MSMEs, as well as promote inclusive and sustainable growth. This study explores how local wisdom values in Samarinda can be integrated into the national legal framework, as well as their impact on MSME development. Through a qualitative and case study approach, this research finds that the synergy between local wisdom and legal regulations can create a conducive environment for MSMEs to thrive. In addition, policies that prioritize community participation and respect for local values have proven to be more effective in achieving equitable and sustainable economic development goals.

Keywords: Local wisdom; MSMEs; National Law.

Abstrak

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Samarinda merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai kearifan lokal menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan UMKM. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, kearifan ekologi, serta etika dan budaya setempat, tidak hanya mendukung daya saing dan inovasi UMKM, tetapi juga memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang progresif dan responsif harus mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ini. Hukum yang responsif dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan, sementara hukum yang progresif memastikan bahwa regulasi dan kebijakan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam hal ini, regulasi yang memperhatikan kearifan lokal mampu memberikan perlindungan dan dukungan lebih efektif terhadap UMKM, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal di Samarinda dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional, serta dampaknya terhadap pengembangan UMKM. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara kearifan lokal dan regulasi hukum mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang. Selain itu, kebijakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal terbukti lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kearifan local; UMKM; Hukum Nasional.

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI KEARIPAN LOKAL DIDESA KUTAI LAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA

Rustiana

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

rustiana149@gmail.com

Abstract

The existence of the Customary Institution of Kutai Lama Village is a reflection of community efforts in exploring, developing, maintaining and preserving customary culture which is applied through customs and customary law in community life. The problem in this study is how the role of customary institutions in maintaining the values of local heritage in kutai lama village is viewed from the perspective of state administration. This research uses Normative juridical methods, which are supported by factual data obtained from research in the field. The statutory approach is used with the analysis technique, namely, identifying the role of customary institutions in maintaining local heritage values in kutai lama village in terms of State administration perspective. The purpose of this research is to find out the role of customary institutions in maintaining the values of local heritage in kutai lama village in terms of State administration perspective. The results of the study show that the role of customary institutions in maintaining the values of local heritage in kutai lama village in terms of the perspective of state administration has not been running properly as a government partner in seeking smooth development in all fields, especially in the social and socio-cultural fields, that based on article 67 paragraph 2 (b) of the Kutai Kartanegara Regent Regulation Number 38 of 2022 as intended that village customary institutions are formed with one of the requirements, namely actively developing local values and customs that are not contrary to human rights and are obeyed by the community. It is hoped that the local government can work together with village customary institutions in terms of local government cooperation with traditional leaders, especially in the old kutai village community empowerment program.

Keywords: Customary Institutions, Local Heritage Values.

Abstrak

Keberadaan Lembaga Adat Desa Kutai Lama merupakan suatu cerminan upaya masyarakat dalam menggali, mengembangkan, menjaga dan melestarikan budaya adat yang dimana diterapkan melalui adat istiadat dan hukum adat pada kehidupan masyarakat. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal didesa kutai lama ditinjau dari perspektif administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif yaitu didukung dengan data faktual yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Digunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisa yaitu mengidentifikasi peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal didesa kutai lama ditinjau dari perspektif administrasi Negara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal didesa kutai lama ditinjau dari perspektif administrasi Negara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal didesa kutai lama ditinjau dari perspektif administrasi Negara belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai mitra pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan disegala bidang terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya, bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 (b) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud bahwa lembaga adat desa dibentuk dengan salah satu persyaratan yaitu aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat. Diharapkan pemerintah daerah dapat bersinergi dengan lembaga adat desa dalam hal kerjasama pemerintah daerah dengan tokoh adatnya terutama dalam program pemberdayaan masyarakat desa kutai lama.

Katakunci : Lembaga Adat, Nilai Kearifan Lokal.

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI PEMANDU *NATIONAL INTEREST LAW*

Naya Amin Zaini

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Indonesia
nayaaminzaini@gmail.com

Abstract

Pancasila ideology as a guiding star (leitstar) in the life of the nation and state. Ideology is a science of ideas to do dialectics in the search for truth. Pancasila is the formulation of an idea, idea, thought by and from the founding fathers of the Indonesian state. The ideology of Pancasila is a struggle of ideas, ideas, thoughts carried out by the founders of the nation to become a prosecutor of the nation and state to be better. Pancasila ideology can be a guide (guidance) in the field of law and legislation. Legislation that is imbued and shines the ideology of Pancasila in order to become a regulation that favors the national interest of Indonesia (national interest). Regulations that favor the national interest are regulations that in the laws, articles, paragraphs can protect national interests. Many regulations do not have national interest, especially in the field of natural resource regulations in Indonesia. This paper will use normative data and then do a description by being arranged in such a way. It is hoped that the paper will be able to answer and explain that the ideology of Pancasila as a guide to national interest in the field of law and legislation is getting stronger.

Keywords: Pancasila Ideology; National Interest Law

Abstrak

Ideologi Pancasila sebagai Bintang pemandu (*leitstar*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi sebuah ilmu tentang ide untuk dilakukan dialetika dalam menari kebenaran. Pancasila adalah rumusan dari sebuah gagasan, ide, pemikiran oleh dan dari para pendiri bangsa (*funding fathers*) negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan pergumulan ide, gagasan, pemikiran yang dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk menjadi penuntut bangsa dan negara agar menjadi lebih baik. Ideologi Pancasila dapat menjadi pemandu (*guidance*) dalam bidang hukum dan peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang dijiwai dan sinari ideologi Pancasila agar menjadi peraturan yang berpihak kepentingan nasional Indonesia (*national interest*). Peraturan yang berpihak kepentingan nasional adalah peraturan yang didalam undang – undang, pasal – pasal, ayat – ayat dapat melindungi kepentingan nasional. Banyak peraturan yang tidak memiliki nasional interest terutama dalam bidang peraturan sumber daya alam di Indonesia. Tulisan ini akan menggunakan data normatif kemudian dilakukan deskripsi dengan disusun sedemikian rupa. Harapannya tulisan mampu menjawab dan menjelaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai pemandu nasional interest dalam bidang hukum dan peraturan perundang – undangan yang semakin kokoh.

Katakunci : Ideologi Pancasila; Nasional Interest Law.

KAJIAN KEKUATAN HUKUM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 3 TAHUN 2023

Wieke Dewi Suryandari

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, Indonesia
wieke@undaris.ac.id

Abstract

The legal force in the registration of Electronic Certificates in accordance with the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 3 of 2023 on the issuance of Electronic Certificates in Land Registration Activities is motivated by innovations carried out by the Minister of ATR/BPN to convert conventional certificates into electronic certificates as issued by the regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No Year 2023 concerning the issuance of electronic certificates in land registration activities. This study aims firstly to find out the process of issuing electronic certificates, and secondly to find out the policy for the implementation of electronic land certificates in an effort to improve land services and increase the guarantee of legal certainty and provide legal protection for the owner.

Keywords: *Legal Force; Electronic; Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023*

Abstrak

Kekuatan hukum dalam kegiatan pendaftaran Sertifikat Elektronik sesuai Peraturan Menteri Atr/Kepala Bpn No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dilatarbelakangi oleh inovasi yang dilakukan oleh menteri ATR/BPN untuk mengubah sertifikat konvensional menjadi sertifikat elektronik sebagaimana dikeluarkannya peraturan menteri ATR/Kepala BPN No tahun 2023 tentang penerbitan sertifikat elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat elektronik, dan kedua untuk mengetahui kebijakan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pertanahan serta meningkatkan jaminan kepastian hukumnya dan memberikan perlindungan hukum bagi pemilikannya.

Katakunci : Kekuatan Hukum; Elektronik; Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023

INTERVENSI ATURAN PERPU TERHADAP PUTUSAN HUKUM ADAT ATAS KASUS PELECEHAN DI DESA ADAT SUKU PASEMAH BENGKULU

Ridho Sa'dillah Ahmad, Faisal Mirza Pradana

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

ridhosadillahahmad@gmail.com , faisalmirzapradana@gmail.com

Abstract

Customary law can be defined as a cultural concept consisting of cultural values, norms, laws and rules that are interconnected with each other to form a system that is covered by a family spirit, where a person submits and serves the rules of society as a whole. One area that still applies customary law is Pasemah Village. The indigenous people of Pasemah Village use Pasemah customary law to resolve sexual harassment cases. However, it was felt that this was not enough to provide justice for the victims. Therefore, the intervention of statutory regulations, namely articles 81 and 82, is needed to provide sanctions and a deterrent effect on perpetrators

Keywords: Customary Law; Pasemah Village; Sexual Violence; Laws and Regulations.

Abstrak

Hukum Adat dapat diperlukan sebagai konsep kebudayaan yang ditunjukan dari nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berhubungan dengan semangat kekeluargaan dimana seorang tunduk dan mengabdikan pada aturan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu daerah yang masih menerapkan hukum adat adalah Desa Pasemah. Masyarakat adat Desa Pasemah menggunakan hukum adat Pasemah untuk menyelesaikan masalah kasus pelecehan seksual. Namun, hal tersebut dirasa tidak cukup memberikan keadilan bagi korban. Maka dari itu, diperlukan intervensi peraturan perundang – undangan yaitu undang – undang pasal 81 dan 82 untuk memberikan sanksi, dan efek jera terhadap pelaku.

Katakunci : Hukum Adat; Desa Pasemah; Kekerasan Seksual; Peraturan perundang – undangan.

NILAI KEARIFAN LOKAL PADA HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Lailasari Ekaningsih

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Lailasarien@gmail.com

Abstract

Copyright is an exclusive right granted to creators or copyright holders for their works in the fields of science, art, and literature. These rights include the right to publish, reproduce, and license the use of the work. Copyright protects the form of expression of a particular idea or information, but does not protect the idea itself. This research aims to analyze the role of local wisdom values in copyright regulation as part of national legal development in Indonesia. In the context of globalization and modernization, recognition of local wisdom is often marginalized by a legal system dominated by Western values. However, in Indonesia, local wisdom has great potential to enrich and strengthen the national legal system, including in copyright regulation. Local wisdom reflects the cultural values, traditions and practices that have existed and been passed down from generation to generation in Indonesian society. These values include the concept of collective rights, respect for the community, and protection of traditional intellectual property. By integrating local wisdom into copyright law, national legal development can be more relevant and adaptive to the needs of local communities. The research method is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies and interviews with legal experts and cultural practitioners. The results show that the recognition and protection of local wisdom-based copyright not only provides more comprehensive legal protection for creators and owners of works, but also encourages the preservation of traditional culture and the economic sustainability of indigenous peoples. This effort requires commitment from the government, academics and communities to ensure that local wisdom is respected and protected within a dynamic and sustainable legal framework.

Keywords: local wisdom, Copyright, National legal development

Abstrak

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya-karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan karya tersebut. Hak cipta melindungi bentuk ekspresi dari ide atau informasi tertentu, tetapi tidak melindungi ide itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai kearifan lokal dalam pengaturan hak cipta sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional di Indonesia. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pengakuan terhadap kearifan lokal seringkali terpinggirkan oleh sistem hukum yang didominasi oleh nilai-nilai Barat. Namun, di Indonesia, kearifan lokal memiliki potensi besar untuk memperkaya dan memperkuat sistem hukum nasional, termasuk dalam pengaturan hak cipta. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan praktik yang telah ada dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini mencakup konsep hak kolektif, penghargaan terhadap komunitas, serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam hukum hak cipta, pembangunan hukum nasional dapat lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta berbasis kearifan lokal tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pencipta dan pemilik karya, tetapi juga mendorong pelestarian budaya tradisional dan keberlanjutan ekonomi masyarakat adat. Upaya ini memerlukan komitmen dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kearifan lokal dihormati dan dilindungi dalam kerangka hukum yang dinamis dan berkelanjutan.

Kata kunci: kearifan lokal, Hak Cipta, Pembangunan hukum nasional .

INTEGRASIKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL: PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF

Mohamad Tohari

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Indonesia.

mohamadtohari.undaris@gmail.com

Abstract

Traditional market development in Indonesia faces various challenges, especially related to competition from modern markets and changes in people's lifestyles. The integration of local wisdom values in the development of traditional markets is a strategic solution to face these challenges. This research aims to analyze how the value of local wisdom can be integrated in the development of traditional markets from the perspective of progressive and responsive legal development. This research methodology uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and literature studies. The results show that local wisdom values such as gotong royong, justice, and togetherness have great potential to strengthen the social and economic structure of traditional markets. The development of progressive and responsive law is key in supporting the implementation of these values, with a focus on regulatory flexibility and active community participation. Progressive law offers a dynamic and innovative approach in formulating regulations that are adaptive to social change, while responsive law emphasizes the importance of community involvement in the policy formation process. This study concludes that the integration of local wisdom values in traditional market development can create a more sustainable and inclusive trading environment, and strengthen local cultural identity.

Keywords: Local Wisdom Value; Traditional Market; Progressive Law Development; Responsive Law Development.

Abstrak

Pengembangan pasar tradisional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan persaingan pasar modern dan perubahan gaya hidup masyarakat. Integrasi nilai kearifan lokal dalam pengembangan pasar tradisional menjadi solusi strategis untuk menghadapi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pengembangan pasar tradisional dari perspektif pembangunan hukum progresif dan responsif. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal seperti gotong royong, keadilan, dan kebersamaan memiliki potensi besar untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi pasar tradisional. Pengembangan hukum progresif dan responsif menjadi kunci dalam mendukung implementasi nilai-nilai tersebut, dengan fokus pada fleksibilitas regulasi dan partisipasi aktif masyarakat. Hukum progresif menawarkan pendekatan dinamis dan inovatif dalam merumuskan regulasi yang adaptif terhadap perubahan sosial, sedangkan hukum responsif menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai kearifan lokal dalam pengembangan pasar tradisional dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat identitas budaya lokal.

Katakunci: Nilai Kearifan Lokal; Pasar Tradisional; Pembangunan Hukum Progresif; Pembangunan Hukum Responsif.

**KONTRA PERSEPSI HUKUM PIDANA TENTANG PASAL PERZINAAN DAN KOHABITASI
DALAM KUHP BARU
(SUATU TELAAH BUDAYA TABU DALAM DINAMIKA MASYARAKAT ADAT BERBASIS
KEARIFAN LOKAL)**

Surya Kusuma Wardana, Emy Handayani

¹Fakultas Hukum Undaris Semarang

²APHA Indonesia / Fakultas Hukum Undip Semarang

gandiwaandpartners@gmail.com

Abstract

Adultery and cohabitation are problem definitions, sources of problems, making moral decisions and treatment recommendations in solving cases that occur in society, related to the relationship between social power structures, media in society with objective reality because there are underlying values. So it is hoped that the application of these rules will not have an impact on complaints and not harm foreign nationals who come to Indonesia, the tourism and investment sectors and must emphasize norms as a foundation in the criminal field. It can be said that Criminal Law is a tool to bring order to legal problems that exist in society, including providing legal protection to the community, especially to indigenous peoples for violations of the taboo culture of indigenous peoples from perpetrators, vigilante actions and sanctions to deter the perpetrators related to values and morals. The taboo culture of indigenous peoples, philosophically adultery and cohabitation are carried out to protect the meaning of a marriage, adultery and cohabitation have violated western culture even though they violate the cultural values of the legal system and cause the fading of eastern culture in indigenous peoples. Thus, cohabitation is an act that is included in adultery as a social phenomenon that is considered to cause social problems in the social life of the community but does not yet have a definite law that oversees legal events that occur in indigenous communities. Based on Local Wisdom, adultery and cohabitation clearly create horizontal conflicts in indigenous communities that deviate from the original values and norms that exist and live in indigenous communities in the form of raids, ostracism or expulsion from indigenous communities because they are considered to commit cultural taboos that should not be violated in indigenous communities in a particular indigenous area.

Keywords: *Counter Perception of Criminal Law; Adultery and Cohabitation Articles; Indigenous People's Taboo Culture; Based on Local Wisdom.*

Abstrak

Perzinaan dan kohibitasi merupakan definisi masalah, sumber masalah, membuat keputusan moral dan treatment rekomendasi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat, terkait dengan hubungan struktur kekuasaan social, media dalam masyarakat dengan realitas obyektif karena ada nilai-nilai yang mendasarinya. Sehingga diharapkan diterapkan aturan tersebut tidak berdampak pada delik aduan serta tidak merugikan Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia, sector pariwisata dan investasi dan harus menekankan norma sebagai landasan di bidang pidana. Dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana sebagai alat untuk menertibkan permasalahan hukum yang ada di masyarakat, termasuk memberikan perlindungan hukum pada masyarakat khususnya pada masyarakat adat atas pelanggaran terhadap budaya tabumasyarakat adat dari pelaku, perbuatan main hakim sendiri dan memberikan sanksi efek jera kepada pelakunya terkait nilai dan moral. Budaya Tabu Masyarakat Adat, secara filosofis perzinaan dan kohabitasi dilakukan untuk melindungi makna sebuah perkawinan, perzinaan dan kohibitasi telah melanggar budaya barat meski melanggar nilai kultural sistem hukum dan menyebabkan luntarnya budaya ketimuran dalam masyarakat Ada. Dengan demikian, kohabitasi merupakan perbuatan yang masuk perzinaan sebagai fenomena social yang dianggap menimbulkan masalah social pada kehidupan social masyarakat namun belum memiliki hukum pasti yang memayungi peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat adat. Berbasis Kearifan Lokal, perzinaan dan kohabitasi jelas menciptakan konflik horizontal pada masyarakat adat yang menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma asli yang ada dan hidup di masyarakat adat berupa penggerebekan, pengucilan atau pengusiran dari lingkungan masyarakat adat karena dianggap

melakukan budaya tabu yang tidak boleh dilanggar dalam masyarakat adat di suatu wilayah adat tertentu.

Katakunci : Kontra Persepsi Hukum Pidana; Pasal Perzinaan dan Kohabitasi; Budaya Tabu Masyarakat Adat; Berbasis Kearifan Lokal.

**KEWAJIBAN NAFKAH AYAH BAGI ANAK PASKA PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(STUDI DI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG)**

Nurdin

Universitas Muhammadiyah Kupang

Nurdin211264@gmail.com

Abstract

This research examines the father's maintenance obligations for children after divorce from a civil law perspective, with a case study at the Kupang Religious High Court. The focus of the research is to understand how the court determines the amount of child maintenance, the factors considered in the determination, as well as the implementation and compliance of the father with the court's decision. This research method is juridical empirical, an approach in legal research that combines normative legal analysis (legal theory) with empirical data (field facts). Data was obtained through document analysis of court decisions, interviews with judges, and direct observation of the trial process. The results showed that the court considered various aspects such as the needs of the child, the father's financial capacity, and a decent standard of living in determining the amount of maintenance. However, there were challenges in implementing the decision, including the father's inability to fulfill his maintenance obligations consistently. This study provides important insights for legal practitioners, policy makers, and the general public regarding the dynamics of child support obligations after divorce and the importance of effective law enforcement.

Keywords: *Maintenance Obligation; Post-Divorce Children; Civil Law; Kupang Religious High Court*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewajiban nafkah ayah bagi anak pasca perceraian dalam perspektif hukum perdata, dengan studi kasus di Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana pengadilan menetapkan besaran nafkah anak, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tersebut, serta implementasi dan kepatuhan ayah terhadap putusan pengadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum normatif (teori hukum) dengan data empiris (fakta lapangan). Data diperoleh melalui analisis dokumen putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, serta observasi langsung proses persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan anak, kemampuan finansial ayah, dan standar hidup yang layak dalam menetapkan besaran nafkah. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pelaksanaan putusan tersebut, termasuk ketidakmampuan ayah untuk memenuhi kewajiban nafkah secara konsisten. Studi ini memberikan wawasan penting bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum mengenai dinamika kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan pentingnya penegakan hukum yang efektif.

Kata kunci : Kewajiban Nafkah; Anak Pasca Perceraian; Hukum Perdata; Pengadilan Tinggi Agama Kupang

WEWENANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MENGESAHKAN SUATU AKTA OTENTIK

Mikayani Putri¹, Evelyn B. Sumbly.²

Universitas Muhammadiyah Kupang

mikayaniputri@yahoo.co.id¹, vey.sumbly@gmail.com²

Abstract

This research examines the legal responsibilities of notaries in making deeds. The focus of this research is to understand the responsibilities of notaries as public officers authorized to make authentic deeds, notaries have great legal responsibilities ranging from ensuring the legality of a transaction, maintaining client confidentiality, to ensuring the correctness of the contents of the deed. This responsibility is reflected in various aspects, ranging from ethical principles to operational procedures that notaries must comply with. The actions of notaries are very important in society, as they act as public officials who provide legal certainty to official documents. Deeds made by notaries have strong evidentiary power, thus ensuring the legal interests of the parties involved. In addition, notaries also play an important role in preventing future disputes. The research method used in this research is empirical juridical, the approach used combines normative law with empirical data. Data is obtained through analysis of notarial deeds, interviews and direct observation in the process of making deeds by notaries. The results showed that notaries carry out their duties according to regulations, notaries also uphold professional ethics in order to maintain public trust.

Keywords: Responsibility; Notary; Deed Making.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tanggungjawab hukum notaris dalam pembuatan akta. Fokus penelitian ini adalah memahami tanggungjawab notaris sebagai petugas umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang besar mulai dari memastikan legalitas suatu transaksi, menjaga kerahasiaan klien, hingga menjamin kebenaran isi akta. Tanggung jawab ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari prinsip-prinsip etika hingga prosedur operasional yang harus dipatuhi notaris. Tindakan notaris sangat penting dalam masyarakat, karena notaris berperan sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum terhadap dokumen-dokumen resmi. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga menjamin kepentingan hukum para pihak yang terlibat. Selain itu, notaris juga memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan yang digunakan menggabungkan hukum normative dengan data empiris. Data diperoleh melalui analisis akta notaris, wawancara serta observasi langsung dalam proses pembuatan akta oleh notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris melaksanakan tugas sesuai peraturan, notaris juga menjunjung tinggi etika profesi demi menjaga kepercayaan publik.

Katakunci: Tanggung Jawab; Notaris; Pembuatan Akta.

AN ANALYTICAL STUDY ON THE LEGAL FRAMEWORK OF MONEY POLITICS AND ITS COMPLIANCE WITH BAWASLU REGULATION

Susianikanaha

Universitas Muhammadiyah Kupang

susiana.k10@gmail.com

Abstract

Money politics, the practice of using financial incentives to influence voter behavior, poses a significant challenge to the integrity of democratic processes. This article aims to critically analyze the legal framework governing money politics in Indonesians election and evaluate the effectiveness of The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in enforcing the regulation. This research utilizes a normative legal analysis conducted by analyzing the money politics and its coherence to Bawaslu Regulation. Through an examination of the current legislation, case studies, and Bawaslu's operational protocols, this paper evaluates the effectiveness of existing legal measures and provides recommendations for amplifying regulatory compliance. The findings underscore the necessity for a precise enforcement and ongoing legal reforms to maintain fair and transparent electoral processes.

Keywords: Money Politics; Bawaslu; Indonesia.

Abstrak

Politik uang, praktik penggunaan insentif keuangan untuk mempengaruhi perilaku pemilih, merupakan tantangan yang signifikan terhadap integritas proses demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kerangka hukum yang mengatur politik uang dalam pemilu di Indonesia dan mengevaluasi efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menegakkan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis politik uang dan koherensinya dengan Peraturan Bawaslu. Melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan protokol operasional Bawaslu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas langkah-langkah hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kepatuhan terhadap peraturan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tepat dan reformasi hukum yang berkelanjutan untuk menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.

Katakunci: Politik Uang; Bawaslu; Indonesia.

PEMUKA AGAMA DAN LINGKARAN PELECEHAN SEKSUAL: STUDI KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH OKNUM VIKARIS DI GMT SILOAM NAILANG, KABUPATEN ALOR

Andi Irfan, Siti Syahida Nurani, Dan Sahrul Amir

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: irfanilmuhukum73@gmail.com, nuranisyahida05@gmail.com,
amiramir09112001@gmail.com

Abstract

This research examines the phenomenon of sexual abuse of children committed by religious leaders, with a focus on the case of a Vicar of the Christian Church in Timor (GMIT) in Siloam Nailang, Alor Timur Utara District, Alor Regency. Using a criminological approach, this study aims to analyze the causal factors, modus operandi, and social impacts of criminal acts of sexual abuse against children. The research method used is empirical legal research. The research approach used is a case approach to examine patterns, causes, and impacts of behavior and the effectiveness of law enforcement in cases of criminal sexual abuse of children. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and document study. The data obtained was then validated, analyzed, and presented qualitatively. The results of this research reveal that there are factors that cause the sexual abuse of children carried out by vicars at GMIT. Siloam Nailang are factors originating from within the perpetrator (internal), such as the need for sexual desire that exists within the perpetrator, power relations, high sexual desire, and not being able to apply religious understanding, as well as factors that arise from outside the perpetrator (external), such as participation of victims and environmental factors. The social impacts identified include psychological trauma for victims, decreased public trust in religious institutions, and the potential for social conflict in local communities. The efforts made by the police to deal with sexual harassment perpetrated by the vicar of GMIT against this child are repressive efforts, namely a conceptual crime prevention effort that is taken after the crime has occurred. Countermeasures with repressive measures are intended to take action against perpetrators of sexual harassment according to their actions.

Keywords: Sexual Abuse; Children; Criminology; GMIT Vicar, Alor Regency

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pemuka agama, dengan fokus pada kasus yang menimpa seorang Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) di Siloam Nailang, Kecamatan Alor Timur Utara, Kabupaten Alor. Dengan menggunakan pendekatan kriminologi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, modus operandi, dan dampak sosial dari tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji pola, penyebab, dan dampak perilaku serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian divalidasi, dianalisis, dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh para pendeta di GMIT. Siloam Nailang yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku (internal), seperti kebutuhan hasrat seksual yang ada dalam diri pelaku, relasi kuasa, hasrat seksual yang tinggi, dan tidak mampu mengaplikasikan pemahaman agama, serta faktor yang muncul dari luar diri pelaku (eksternal), seperti partisipasi korban dan faktor lingkungan. Dampak sosial yang teridentifikasi antara lain trauma psikologis bagi korban, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan, dan potensi konflik sosial di masyarakat setempat. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendeta GMIT terhadap anak ini adalah upaya represif, yaitu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku pelecehan seksual sesuai dengan perbuatannya.

Kata kunci: Pelecehan Seksual; Anak; Kriminologi; Vikaris GMIT, Kabupaten Alor

TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PELAKU PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK (BOM IKAN) DI WILAYAH PERAIRAN DESA TABLOLONG KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG

Satria Akbar Bachtiar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang
satria.kefamenanu123@gmail.com

Abstract

Indonesia is a tropical country with high biodiversity, both on land and in the sea, especially in coastal areas. The waters of NTT, especially Kupang Regency, have a coastline length of 423.86 km. West Kupang sub-district is one of the sub-districts in Kupang Regency that has the longest coastline with a length of 25.0 km, with an area of coastal and marine ecosystems of 1,393.1 ha. (Kupang National Marine Conservation Area Center, 2009). The length of these shallow waters supports the thriving and high diversity of organisms that have the potential to support fisheries production. Meanwhile, the increase in population and the quality of human life followed by the consumption patterns of the community allows the demand for aquatic and marine ecosystem products, especially fish, to increase. So that there is a condition of over fishing which results in the emergence of damage to marine biota. Juridically, based on Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries and Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, several fisheries offenses are known, regulated in Articles 86 to 101. The fisheries offense is divided into the offense of pollution, destruction of fish resources and fishing using explosives, the offense of fish resource management and destruction of fish resources and fishing using prohibited materials. To avoid violations, the use of fishing gear and/or fishing aids is necessary to avoid fishing using equipment that can harm the preservation of fish resources and the environment. This research aims to (1) Know the form of handling against the perpetrators of dealers and fishing using explosives (fish bombs) in the Waters of Tablolong Village, West Kupang District, Kupang Regency, NTT Province, (2) find out the obstacles faced by the NTT Police Water Police in handling cases of fishing using fish bombs. The research method uses normative qualitative juridical analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that (1) The handling of perpetrators of fishing crimes using explosives (fish bombs) in the waters of Tablolong village carried out by Ditpol Airud NTT includes preventive, repressive and curative actions. It's just that repressive actions are more dominant, this is evidenced by the existence of several perpetrators who have been prosecuted to court, while preventive and curative actions are less maximized. (2) The obstacles experienced by Ditpol Airud Polda NTT in handling fish bombers include the complexity of law enforcement against explosives, as well as the lack of facilities and infrastructure to supervise and enforce the practice of fish bombing in the relatively vast waters of Tablolong village.

Keywords: *Handling; Fish Bombing; Kupang Waters.*

Abstrak

Indonesia adalah negara tropis mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di darat maupun di laut, khususnya di wilayah pesisir. Perairan NTT khususnya daerah Kabupaten Kupang mempunyai panjang garis pantai 423,86 km. Kecamatan Kupang Barat merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kupang yang mempunyai garis pantai terpanjang dengan panjang 25,0 km, dengan mempunyai luas daerah ekosistem pantai dan laut sebesar 1.393, 1 Ha. (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, 2009). Panjangnya perairan dangkal ini mendukung tumbuh subur dan tingginya keanekaragaman jenis organisme sehingga memiliki potensi menunjang produksi perikanan. Sementara Peningkatan jumlah penduduk dan kualitas hidup manusia yang diikuti dengan pola konsumsi masyarakat memungkinkan permintaan terhadap hasil ekosistem perairan dan laut khususnya ikan semakin meningkat. Sehingga terjadi kondisi lebih tangkap (over fishing) yang mengakibatkan timbulnya kerusakan biota laut. Secara yuridis berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengerusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan

peledak, delik pengelolaan sumber daya ikan dan pengerusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan terlarang. Untuk menghindari pelanggaran, penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui bentuk penanganan terhadap pelaku pengedar dan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di Wilayah Perairan Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, (2) mengetahui kendala- kendala yang dihadapi oleh pihak DitPol Air Polda NTT dalam menangani kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Metode penelitian menggunakan analisis yuridis kualitatif normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Penanganan pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di wilayah perairan desa Tablolong yang dilakukan oleh Ditpol Airud NTT meliputi tindakan preventif, represif dan kuratif. Hanya saja tindakan represif lebih dominan dilakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pelaku yang diproses hukum sampai pengadilan, sedangkan tindakan preventif dan kuratif kurang dimaksimalkan. (2) Kendala yang dialami oleh Ditpol Airud Polda NTT dalam penanganan pelaku bom ikan di antaranya adalah faktor rumitnya penegakan hukum terhadap bahan peledak, serta minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan penindakan praktik pemboman ikan di perairan desa Tablolong yang relatif sangat luas.

Katakunci: Penanganan; Bom Ikan; Perairan Kupang.

EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DAN LAUT YANG TIDAK BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Nabilla Rastiana, Ivana Malida Malfa Lena, Wafda Vivid Izziyana, A Heru Nuswato

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
billangumbuk@gmail.com ivanamalvalena@gmail.com

Abstract

Exploitation of natural and marine resources is the process of taking and utilizing resources available on land and in the sea to meet human needs. This process includes activities such as mineral mining, logging, fishing, and oil and gas extraction. Unsustainable exploitation often leads to long-term negative impacts on the environment and community welfare. The unsustainable exploitation of natural resources, such as mining, logging, and marine exploitation, causes various negative impacts on the environment and society. In this context, a normative approach becomes relevant to examine how local wisdom can be integrated in national legal development to achieve sustainability. Local wisdom, with its traditional principles that support natural balance and sustainability, has the potential to serve as a foundation for formulating more equitable and effective policies and regulations. This research explores how local wisdom values can be applied in national regulations to mitigate the negative impacts of natural resource exploitation. By adopting a normative method, this research examines the existing legal framework, identifies regulatory gaps, and proposes the integration of local wisdom in natural resource policies. The results show that the implementation of local wisdom in national law can not only strengthen environmental protection, but also empower local communities in natural resource management, thus supporting sustainable and inclusive development.

Keywords: *Exploitation, Natural Resources, Marine Resources, Local Wisdom*

Abstrak

Eksplorasi sumber daya alam dan laut adalah proses pengambilan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di darat maupun di laut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses ini meliputi berbagai kegiatan seperti penambangan mineral, penebangan hutan, penangkapan ikan, serta ekstraksi minyak dan gas bumi. Eksploitasi yang tidak berkelanjutan seringkali menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya regulasi yang ketat dan penerapan praktik-praktik yang berkelanjutan menjadi semakin mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti kegiatan penambangan, penebangan, dan eksploitasi laut, menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan normatif menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pembangunan hukum nasional guna mencapai keberlanjutan. Kearifan lokal, dengan prinsip-prinsip tradisionalnya yang mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan, memiliki potensi untuk menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih adil dan efektif. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diterapkan dalam regulasi nasional untuk mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Dengan mengadopsi metode normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi celah-celah regulasi, dan mengusulkan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan sumber daya alam. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam hukum nasional tidak hanya dapat memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Katakunci : Eksploitasi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Laut, Kearifan Lokal

PENGELOLAAN LIMBAH PLASTIK DAN LIMBAH ELEKTRONIK YANG MENINGKAT PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Rizqy Firman Syah, Athallah Febrio Yumna Faruqi, Sukimin

Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia

rizqyfirman311@gmail.com

Abstract

Waste management is a series of activities that include the collection, transportation, treatment, and disposal of waste with the aim of minimizing negative impacts on human health and the environment. It covers various types of waste, including solid, liquid, gaseous, and hazardous waste, generated from industrial, household, agricultural, and other activities. The main objectives of waste management are to reduce the volume and hazard of waste, optimize the reuse and recycling of usable materials, and ensure safe and efficient final disposal. Effective waste management requires a strong regulatory framework, appropriate technology, as well as active participation from the public. Waste management, especially plastic waste and e-waste, is becoming an increasingly pressing issue as global production and consumption increase. Normative research method used in this study. Local wisdom, which includes traditional practices and knowledge passed down through generations, offers a thoughtful approach to managing waste in an environmentally friendly and community-oriented manner. This research examines the existing legal framework for waste management in Indonesia, identifies gaps in the regulations, and proposes the integration of local wisdom principles in waste management policies. The results show that the application of local wisdom in plastic and electronic waste management can not only improve the effectiveness of waste management, but also strengthen community participation in protecting the environment. Thus, the integration of local wisdom in national legal development has the potential to support a more sustainable and inclusive waste management strategy.

Keywords: Management, Waste, Local Wisdom

Abstrak

Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Pengelolaan ini mencakup berbagai jenis limbah, termasuk limbah padat, cair, gas, dan limbah berbahaya, yang dihasilkan dari kegiatan industri, rumah tangga, pertanian, dan aktivitas lainnya. Tujuan utama dari pengelolaan limbah adalah untuk mengurangi volume dan bahaya limbah, mengoptimalkan penggunaan kembali dan daur ulang material yang dapat dimanfaatkan, serta memastikan pembuangan akhir dilakukan secara aman dan efisien. Pengelolaan limbah yang efektif memerlukan kerangka regulasi yang kuat, teknologi yang tepat, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Tujuan Pengelolaan limbah, terutama limbah plastik dan limbah elektronik, menjadi masalah yang semakin mendesak seiring dengan peningkatan produksi dan konsumsi global. Metode penelitian normatif digunakan dalam studi ini. Kearifan lokal, yang mencakup praktik dan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, menawarkan pendekatan yang bijaksana dalam mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan dan berorientasi pada komunitas. Penelitian ini menelaah kerangka hukum yang ada terkait pengelolaan limbah di Indonesia, mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi, serta mengusulkan integrasi prinsip-prinsip kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan limbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan limbah plastik dan elektronik tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional berpotensi untuk mendukung strategi pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Katakunci : Pengelolaan, Limbah, Kearifan Lokal

EKSPLOITASI PENAMBANGAN PADA PENGAMBILAN MINERAL DAN BAHAN TAMBANG DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

M Nurul Auliyail Arifin, Adellia Lutfi Indriani, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

auliyail20043@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze Mining exploitation, including the extraction of minerals and mining materials such as gold, coal, and iron ore, often causes negative impacts on the environment, such as erosion, water pollution, and habitat loss. This research uses normative methods to examine how local wisdom can be integrated in mining regulations and policies to mitigate adverse environmental impacts. Local wisdom, which includes traditional practices in maintaining the balance of nature and utilizing resources sustainably, offers a valuable perspective in wiser mining management. This study examines the existing legal framework for mining in Indonesia, identifies regulatory weaknesses, and proposes integrating local wisdom into mining policy. The results show that an approach that incorporates local wisdom can strengthen environmental conservation efforts and support more sustainable mining practices. Thus, the integration of local wisdom in national legal development has the potential to reduce environmental degradation and improve the welfare of communities affected by mining activities. The integration of local wisdom in national legal development has the potential to reduce environmental degradation and improve the welfare of communities affected by mining activities in profound and multifaceted ways. Thus, the application of local wisdom in national legal development is a strategic step to achieve a balance between economic development and environmental preservation, while strengthening the resilience and welfare of local communities.

Keywords: Exploitation, Mining, Local Wisdom

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Eksploitasi penambangan, termasuk pengambilan mineral dan bahan tambang seperti emas, batubara, dan bijih besi, seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti erosi, pencemaran air, dan hilangnya habitat. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam regulasi dan kebijakan penambangan guna memitigasi dampak lingkungan yang merugikan. Kearifan lokal, yang meliputi praktik-praktik tradisional dalam menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan, menawarkan perspektif yang berharga dalam pengelolaan penambangan yang lebih bijaksana. Studi ini menelaah kerangka hukum yang ada terkait penambangan di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan regulasi, dan mengusulkan pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan penambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan kearifan lokal dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan mendukung praktik penambangan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional berpotensi mengurangi degradasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas penambangan. Integrasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional berpotensi mengurangi degradasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas penambangan dengan cara-cara yang mendalam dan multifaset. Dengan demikian, penerapan kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional adalah langkah strategis untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan dan kesejahteraan komunitas lokal.

Kata Kunci : Eksploitasi, Penambangan, Kearifan Lokal

TANTANGAN POLUSI UDARA, AIR, DAN TANAH YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN MANUSIA DAN EKOSISTEM DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Stefani Aurel Pradina, Debora, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
Eydebby@gmail.com, wafda@usm.ac.id

Abstract

Air, water and land pollution are serious problems that negatively impact human health and ecosystems. This research uses normative methods to explore how local wisdom can contribute to efforts to address pollution through integration in environmental policies and regulations. Local wisdom includes traditional practices and community knowledge that have proven effective in maintaining environmental balance and managing natural resources sustainably. This study examines the existing legal framework related to pollution control in Indonesia, identifies shortcomings in current regulations, and proposes the application of local wisdom values in pollution control policies. The results show that the integration of local wisdom can improve the effectiveness of pollution management in a more environmentally friendly and community-oriented way. In addition, this approach can also empower local communities in the implementation and monitoring of environmental policies. Thus, the incorporation of local wisdom in national legal development not only has the potential to reduce pollution levels, but also improve the welfare and quality of life of affected communities, and support the sustainability of the ecosystem as a whole. Addressing air, water and land pollution from a local wisdom perspective, however, faces a number of complex and diverse challenges. One key challenge is the social and cultural changes brought about by modernization and urbanization, which often result in a decline in the use of traditional environmentally-friendly practices. Addressing these challenges therefore requires a holistic and inclusive approach, involving various parties in a joint effort to create a healthier and more sustainable environment.

Keywords: Pollution, Human Health, Local Wisdom

Abstrak

Polusi udara, air, dan tanah merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi polusi melalui integrasi dalam kebijakan dan regulasi lingkungan. Kearifan lokal mencakup praktik-praktik tradisional dan pengetahuan komunitas yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Studi ini menelaah kerangka hukum yang ada terkait pengendalian polusi di Indonesia, mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi saat ini, dan mengusulkan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebijakan pengendalian polusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan polusi dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada komunitas. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberdayakan masyarakat lokal dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penggabungan kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional tidak hanya berpotensi mengurangi tingkat polusi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang terdampak, serta mendukung keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan. Akan tetapi Mengatasi polusi udara, air, dan tanah dari perspektif kearifan lokal menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah perubahan sosial dan budaya yang disebabkan oleh modernisasi dan urbanisasi, yang sering kali mengakibatkan penurunan penggunaan praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan. Oleh karenanya mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik dan inklusif, melibatkan berbagai pihak dalam upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Katakunci : Polusi, Kesehatan Manusia, Kearifan Lokal

UPAYA EKSTRADISI SEBAGAI PENGATURAN PENEGAK HUKUM PROGRESIF DAN RESPONSIF TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA

Beatrich Advismadya Pamungkas, Muhamad Feri Setiawan, Subaidah Ratna Juita

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

[1beatrichdvs@gmail.com](mailto:beatrichdvs@gmail.com) [2sferi4362@gmail.com](mailto:sferi4362@gmail.com)

Abstract

This research aims to find the problems of law enforcement in Indonesia through data analysis or normative law in using progressive and responsive law as a new paradigm in law enforcement in Indonesia. The formulation of the problem in this study is the application of law enforcement as a form of extradition regulation in eradicating narcotics criminals through an analysis of the extradition case of Indonesia and South Korea. With normative legal research method, it is concluded: 1. That on December 14, 1990 the UN General Assembly unanimously approved Resolution No.45/117 on Model Treaty on Extradition. This resolution can be used as a model by countries in making agreements on extradition, 2. The legal basis for extradition requests by one country to another is based on 4 (four), namely: National legislation, extradition treaties, expanded conventions, and international manners. However, if there is a request for extradition outside these rules, extradition can be carried out on the basis of good relations between a country and another country either for reciprocal or unilateral interests. The practice of extradition in this way is called Disguised Extradition or Handing Over. Progressive Law has a scientific structure, first, that Progressive Law has a moral paradigm and reason. Second, the concept of "law for humans", which was originally used as a paradigm, is then placed as a doctrine. The justice in question is the sense of justice that lives in society.

Keywords: Extradition; Crime; Responsive; Progressive.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan problematika penegakan hukum di Indonesia melalui analisa data atau hukum normatif dalam menggunakan hukum progresif serta responsif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan penegak hukum sebagai bentuk pengaturan ekstradiksi dalam memberantas pelaku kejahatan narkotika melalui analisa kasus ekstradisi Indonesia dengan Korea Selatan. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 1990 Majelis Umum PBB dengan suara bulat telah menyetujui Resolusi No.45/117 tentang Model Treaty on Ekstradition. Resolusi ini dapat dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian tentang ekstradisi, 2 Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara kenegara lain didasarkan pada 4 (empat) yaitu: Perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi, dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi di luar aturan-aturan tersebut maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktek ekstradisi dengan cara ini disebut Disguished Ekstradisi atau Handing Over (Ekstradisi Terselubung). Hukum Progresif memiliki struktur keilmuan, pertama, bahwa Hukum Progresif memiliki paradigma moral dan akal budhi. Kedua, konsep "hukum untuk manusia", yang semula dijadikan paradigma, selanjutnya diletakkan sebagai doktrin. Keadilan yang dimaksud yaitu rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Katakunci: Ekstradisi; Kejahatan; Responsif; Progresif.

IMPLEMENTASI DEPORTASI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF

Bunga Punta Wibi, Ananda Ridho Rafiqi, Supriyadi

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
1bungawibi13@gmail.com; 2ananda4ridho@gmail.com

Abstract

The Directorate General of Immigration is one of Indonesia's national institutions that has authority in the field of immigration. The immigration regulates the entry and exit of people into Indonesian territory and the supervision of foreigners who are in Indonesian territory. Immigration to Indonesia is supervised by the Ministry of Law and Human Rights. One of the functions of immigration is law enforcement. Under Indonesian immigration law, anyone who violates regulations or endangers the security and sovereignty of the country may be subject to TAK based on Immigration Law No. 6 of 2011. This research examines the perspective of deportation in the context of international law with a focus on the development of progressive law. Deportation as an instrument of migration regulation often involves normative complexities that cross various conventions and principles of international law. Normative research methods are used to analyze the legal framework governing deportation, taking into account human rights perspectives and the obligations of states. The research approach examines the development of progressive law. Results This research examines the concept of deportation from various international legal instruments and related doctrinal views, with a focus on the protection of human rights and principles of justice in deportation proceedings. The analysis also includes an attempt to identify legal trends that support the development of a more inclusive and just international law in the handling of deportation cases. The research aims to explore how deportation practices can influence the evolution of international law. This analysis involves identifying new patterns in international law that take human rights and justice into account in the context of deportation proceedings, as well as efforts to expand the scope of protection for individuals affected by states' deportation policies.

Keywords: Deportation; International Law; Immigration.

Abstrak

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu lembaga nasional Indonesia yang mempunyai kewenangan di bidang keimigrasian. Keimigrasian tersebut mengatur tentang keluar masuknya orang ke dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Imigrasi ke Indonesia diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu fungsi imigrasi adalah penegakan hukum. Berdasarkan undang-undang keimigrasian Indonesia, siapa pun yang melanggar peraturan atau membahayakan keamanan dan kedaulatan negara dapat dikenakan TAK berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011. Penelitian ini mengkaji sudut pandang deportasi dalam konteks hukum internasional dengan fokus pada pengembangan hukum progresif. Deportasi sebagai instrumen regulasi migrasi sering kali melibatkan kompleksitas normatif yang melintasi berbagai konvensi dan prinsip hukum internasional. Metode penelitian normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur deportasi, dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan kewajiban negara-negara. Pendekatan penelitian mengkaji pengembangan hukum progresif. Hasil Penelitian ini menelaah konsep deportasi dari berbagai instrumen hukum internasional serta pandangan doktrinal terkait, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan dalam proses deportasi. Analisis ini juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi tren hukum yang mendukung pengembangan hukum internasional yang lebih inklusif dan adil dalam penanganan kasus deportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik deportasi dapat mempengaruhi evolusi hukum internasional. Analisis ini melibatkan pengidentifikasian pola-pola baru dalam hukum internasional yang memperhitungkan hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks proses deportasi, serta upaya-upaya untuk memperluas cakupan perlindungan terhadap individu yang terpengaruh oleh kebijakan deportasi negara-negara.

Kata Kunci: Deportasi; Hukum Internasional; Keimigrasian.

PENGEMBANGAN HUKUM PROGRESIF DAN RESPOSIF PADA PELAKSAAN EKSTRADISI DALAM PERMASALAHAN BOM BALI

Divo Aulia Adhitama, Saman Rois Aziiz Zakiri, Subaidah Ratna Juita, Supriyadi

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Negara Indonesia
divoadhitama82@gmail.com; ayisuyus@gmail.com

Abstract

The value of local wisdom has an important role in the development of progressive and responsive law, especially in the context of extradition implementation in major cases such as the Bali Bombing. The normative research method is used in this study to analyze the integration of local wisdom values in the existing legal system, as well as how these values can enrich and strengthen the legal process. This study aims to examine the role of local wisdom values in strengthening the principles of progressive and responsive law, particularly in the context of extradition of perpetrators of international terrorism. Through analysis of various relevant national and international legal instruments, as well as the Bali Bombing case study, this research finds that the application of local wisdom values can improve substantive justice and the effectiveness of law enforcement. Values such as gotong royong, musyawarah untuk mufakat, and the local community's sense of justice, when integrated within the existing legal framework, can provide a more humane and fair approach in the extradition process. The results of this study show that legal reforms that accommodate local wisdom values not only fulfill formal legal requirements, but also strengthen legitimacy and community acceptance of the legal process, resulting in more just and equitable law enforcement.

Keywords: Local Wisdom, Law, Progressive, Responsive, Extradition

Abstrak

Nilai kearifan lokal memiliki peran penting dalam pengembangan hukum progresif dan responsif, terutama dalam konteks pelaksanaan ekstradisi pada kasus-kasus besar seperti Bom Bali. Metode penelitian normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum yang ada, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memperkaya dan memperkuat proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran nilai kearifan lokal dalam memperkuat prinsip-prinsip hukum progresif dan responsif, khususnya dalam konteks ekstradisi pelaku terorisme internasional. Melalui analisis terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan, serta studi kasus Bom Bali, penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan rasa keadilan komunitas lokal, ketika diintegrasikan dalam kerangka hukum yang ada, dapat memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil dalam proses ekstradisi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum yang mengakomodasi nilai kearifan lokal tidak hanya memenuhi persyaratan legal formal, tetapi juga memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap proses hukum tersebut, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Katakunci : Kearifan Lokal, Hukum, Progresif, Responsif, Ektradisi

MASA DEPAN HUKUM TRANSNASIONAL DAN KEARIFAN LOKAL

M Agung Izzul, Zaki Pramudita N, Wafda Vivid Izziyana, B Rini Heryanti

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Negara Indonesia
izul@gmail.com; zakipn@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the future prospects and potential for further development of transnational law that integrates local wisdom values. Using normative research methods, this study analyzes various existing international and national legal instruments, as well as how local wisdom can contribute to the development of more inclusive and equitable laws. Local wisdom, which includes cultural values, norms, and traditional practices, has great potential to enrich transnational law, especially in the context of conflict resolution, law enforcement, and human rights protection. This research finds that the integration of local wisdom in transnational law can increase legal legitimacy, strengthen public acceptance, and create a more responsive and adaptive legal approach to global dynamics. In the context of increasingly complex globalization, collaboration between transnational law and local wisdom can be an innovative solution to emerging legal challenges. The results of this research are expected to provide practical recommendations for policy makers and legal practitioners in formulating a more comprehensive and sustainable legal development strategy..

Keywords: Law, Local Wisdom, Transnational.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prospek masa depan dan potensi pengembangan lebih lanjut dari hukum transnasional yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, studi ini menganalisis berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang ada, serta bagaimana kearifan lokal dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kearifan lokal, yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, dan praktik-praktik tradisional, memiliki potensi besar untuk memperkaya hukum transnasional, terutama dalam konteks penyelesaian konflik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan bahwa integrasi kearifan lokal dalam hukum transnasional dapat meningkatkan legitimasi hukum, memperkuat penerimaan masyarakat, dan menciptakan pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika global. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, kolaborasi antara hukum transnasional dan kearifan lokal dapat menjadi solusi inovatif untuk menghadapi tantangan-tantangan hukum yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi pengembangan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Katakunci : Hukum, Kearifan Lokal, Transnasional

SIGNIFIKANSI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM

Resky Amalia, Putri Nurmasari, B Rini Heryanti, A Heru Nuswanto

¹²Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Negara Indonesia
resky@gmail.com; putriN@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the significance of local wisdom in legal development using normative research methods. Local wisdom, which includes cultural values, norms, and traditional practices, can provide an invaluable additional perspective in the legal system. The integration of local wisdom into the law not only strengthens the legitimacy of the law in the eyes of the community, but also enhances substantive justice by ensuring that the law reflects the values and needs of local communities. This research analyzes various legal cases and policies where local wisdom has been successfully integrated, showing that this approach can improve the effectiveness of law enforcement and community acceptance of legal decisions. The results show that local wisdom has great potential to enrich the legal system in a more inclusive and equitable way, and provide recommendations for policy makers and legal practitioners to adopt and implement local wisdom values in the formulation of legal policies. Thus, this research contributes to the development of laws that are more responsive and adaptive to the needs of society.

Keywords: Local Wisdom, Law, Signification

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji signifikansi kearifan lokal dalam pengembangan hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif. Kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, dan praktik-praktik tradisional, dapat memberikan perspektif tambahan yang sangat berharga dalam sistem hukum. Integrasi kearifan lokal ke dalam hukum tidak hanya memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat, tetapi juga meningkatkan keadilan substantif dengan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan komunitas lokal. Penelitian ini menganalisis berbagai kasus dan kebijakan hukum di mana kearifan lokal telah berhasil diintegrasikan, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar untuk memperkaya sistem hukum dengan cara yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam perumusan kebijakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Katakunci : Kearifan Lokal, Hukum, Signifikasi

HUKUM DAN KEBIJAKAN KEHUTANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Farros Kaka A, Deco Maftuh R, Tri Mulyani

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Negara Indonesia

Farroskk@gmail.com; decomr@gmail.com

Abstract

Forest law and policy refer to a set of regulations, laws and policies designed to govern the utilization, management and conservation of forests. Forest law includes legal provisions that regulate the rights and obligations of relevant parties, such as the government, indigenous communities, companies and individuals in the management of forest resources. Forest policies, on the other hand, are guidelines and strategies set by the government to achieve certain objectives in forest management, such as biodiversity conservation, climate change mitigation, and local community empowerment. Forest law and policy work together to ensure that forest resources are used sustainably and fairly, and provide economic, ecological and social benefits to communities. This research examines how national forestry law and policy can accommodate and support local wisdom in Indonesia. The research method used is normative. Local wisdom, which includes traditional practices and knowledge of indigenous communities in managing forests, has an important role in the preservation of forest ecosystems and the welfare of local communities. The research found that although there are some efforts to integrate local wisdom into forestry policies, there is still a gap between formal policies and local practices. This study highlights the importance of aligning forestry policies with the values and needs of indigenous communities to achieve sustainable forest management and provides concrete recommendations for policymakers to strengthen recognition and protection of indigenous peoples' rights, as well as encourage active participation in forestry-related decision-making. Thus, the development of local wisdom-based laws and policies can increase the effectiveness and legitimacy of forest conservation efforts in Indonesia.

Keywords: Local Wisdom, Law, Forestry

Abstrak

Hukum dan kebijakan kehutanan merujuk pada serangkaian peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian hutan. Hukum kehutanan mencakup ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat adat, perusahaan, dan individu dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kebijakan kehutanan, di sisi lain, merupakan pedoman dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan hutan, seperti konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hukum dan kebijakan kehutanan bekerja bersama untuk memastikan bahwa sumber daya hutan digunakan secara berkelanjutan dan adil, serta memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum dan kebijakan kehutanan nasional dapat mengakomodasi dan mendukung kearifan lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. Kearifan lokal, yang mencakup praktik-praktik tradisional dan pengetahuan komunitas adat dalam mengelola hutan, memiliki peran penting dalam pelestarian ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa upaya untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan kehutanan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik lokal. Studi ini menyoroti pentingnya penyesuaian kebijakan kehutanan dengan nilai-nilai dan kebutuhan komunitas adat untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kehutanan. Dengan demikian, pengembangan hukum dan kebijakan yang berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi upaya konservasi hutan di Indonesia.

Katakunci : Kearifan Lokal, Hukum, Kehutanan

PENGARUH MODERNISASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL DALAM KEHUTANAN

Zaki Pramudita N, Muhammad Agung Izzul, Tri Mulyani

Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia
ZakiPN@gmail.com, Magungl@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of modernization and social change on local wisdom in forest management in Indonesia. Using normative research methods, this study examines relevant regulations, policies, and literature to understand the dynamics of interaction between modernization and traditional practices in forestry. Modernization, which includes technological development, economic change and social transformation, often results in the decline of local wisdom practices in forest management. This can result in the loss of traditional knowledge that has proven effective in maintaining forest sustainability and the welfare of local communities. This research found that while modernization can bring economic benefits and increased access to resources, there is an urgent need to preserve and adapt local wisdom to remain relevant in the modern context. The study identifies various efforts that can be made, such as integrating traditional knowledge into formal education programs, involving local communities in forestry decision-making, and developing policies that support harmonization between modern technology and local wisdom practices. Thus, the results of this study are expected to provide strategic recommendations for policy makers and forestry practitioners in promoting sustainable and inclusive forest management, which respects and maintains local wisdom in the era of modernization.

Keywords: Modernization, Local Wisdom, Forestry.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi dan perubahan sosial terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, studi ini menelaah berbagai peraturan, kebijakan, dan literatur yang relevan untuk memahami dinamika interaksi antara modernisasi dan praktik-praktik tradisional dalam kehutanan. Modernisasi, yang meliputi perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan transformasi sosial, sering kali berdampak pada penurunan praktik kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan komunitas lokal. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun modernisasi dapat membawa manfaat ekonomi dan peningkatan akses terhadap sumber daya, ada kebutuhan mendesak untuk melestarikan dan mengadaptasi kearifan lokal agar tetap relevan dalam konteks modern. Studi ini mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat dilakukan, seperti pengintegrasian pengetahuan tradisional ke dalam program pendidikan formal, pelibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan kehutanan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung harmonisasi antara teknologi modern dan praktik kearifan lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan praktisi kehutanan dalam mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan inklusif, yang menghargai dan mempertahankan kearifan lokal dalam era modernisasi.

Katakunci : Modernisasi, Kearifan Lokal, Kehutanan.

KONFLIK DAN RESOLUSI DALAM PENGELOLAAN HUTAN

M Naufal Asyhari, Yanuar Tri, Tri Mulyani

Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia

naufal@gmail.com, yanuart@gmail.com

Abstract

Conflicts in forest management refer to disagreements or tensions between different parties involved in the policy, management and utilization of forest resources. These conflicts can involve various actors such as indigenous peoples, governments, companies and non-governmental organizations, who have often conflicting interests. The roots of conflicts can stem from disagreements over forest utilization policies, competition over natural resources, land ownership rights, or environmental impacts resulting from forest activities. Conflict resolution approaches can involve a variety of strategies, ranging from mediation, negotiation, to arbitration. The importance of using local wisdom in forest conflict resolution emphasizes cultural values, traditions and traditional mechanisms in resolving disputes, which are often more accepted and applied by local communities. Thus, an in-depth understanding of conflicts and their resolution strategies in forest management is crucial to achieving sustainable development and equitable distribution of benefits for all parties involved. This study examines conflicts that occur between indigenous peoples and outsiders, such as the government or companies, over forest management in Indonesia using normative research methods. The study analyzes various cases of forestry conflicts, highlighting the root causes and impacts on the environment and the welfare of indigenous peoples. The study recommends an approach that prioritizes dialogue between the parties involved, empowerment of indigenous communities, and the implementation of policies that support the recognition and protection of indigenous peoples' rights. Thus, the results of this study are expected to provide practical guidance for policy makers and practitioners in managing forestry conflicts constructively and equitably, based on local wisdom.

Keywords: *Conflict, Resolution, Forest Management*

Abstrak

Konflik dalam pengelolaan hutan merujuk pada pertentangan atau ketegangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan. Konflik ini dapat melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat adat, pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah, yang memiliki kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Akar konflik bisa bermula dari ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemanfaatan hutan, persaingan atas sumber daya alam, hak kepemilikan tanah, atau dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan hutan. Pendekatan resolusi konflik dapat melibatkan berbagai strategi, mulai dari mediasi, negosiasi, hingga arbitrase. Pentingnya penggunaan kearifan lokal dalam resolusi konflik hutan menekankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan mekanisme tradisional dalam menyelesaikan sengketa, yang sering kali lebih diterima dan diterapkan oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konflik dan strategi resolusinya dalam pengelolaan hutan menjadi krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini mengkaji konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan pihak luar, seperti pemerintah atau perusahaan, terkait pengelolaan hutan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Studi ini menganalisis berbagai kasus konflik kehutanan, menyoroti akar permasalahan dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat adat. Studi ini merekomendasikan pendekatan yang mengedepankan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, pemberdayaan komunitas adat, serta penerapan kebijakan yang mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam mengelola konflik kehutanan secara konstruktif dan berkeadilan, berbasis pada kearifan lokal.

Kata Kunci : Konflik, Resolusi, Pengelolaan Hutan

SISTEM PERTANIAN HUTAN (AGROFORESTRY) TRADISIONAL

Ahmad Giovani , Mahesa Tio S, Sukimin

Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia

ahgiovani@gmail.com, mahesa@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze traditional agroforestry systems used by various communities in Indonesia, using normative methods. Traditional agroforestry systems combine food crops, forestry crops and livestock in one sustainable system, utilizing forest biodiversity to increase productivity and local food security. This study evaluates the positive impacts of agroforestry systems on forest sustainability, such as soil and water conservation, reduced deforestation, and biodiversity preservation. In addition, the study also highlights the role of agroforestry systems in improving the welfare of local communities through increased access to food and non-food resources, as well as additional income from forest products. The analysis considers traditional values in agroforestry practices, such as local knowledge of forest ecology and environmentally friendly farming patterns. As such, this research provides insight into how the implementation of traditional agroforestry systems can support global sustainability goals while promoting the well-being of local communities in Indonesia. The application of traditional agroforestry systems in Indonesia has a significant impact in supporting global sustainability goals and promoting the well-being of local communities. Overall, the application of traditional agroforestry not only supports global sustainability through environmental conservation and climate change mitigation, but also empowers local communities in a socially and economically sustainable way. Therefore, the development and promotion of traditional agroforestry systems is an important strategy in achieving sustainable development in Indonesia and around the world.

Keywords: Agriculture, Forest, traditional

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanian hutan (agroforestri) tradisional yang digunakan oleh berbagai komunitas di Indonesia, dengan menggunakan metode normatif. Sistem agroforestri tradisional menggabungkan tanaman pangan, tanaman kehutanan, dan ternak dalam satu sistem yang berkelanjutan, memanfaatkan keanekaragaman hayati hutan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan lokal. Studi ini mengevaluasi dampak positif dari sistem agroforestri terhadap keberlanjutan hutan, seperti konservasi tanah dan air, pengurangan deforestasi, dan pelestarian biodiversitas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran sistem agroforestri dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya pangan dan non-pangan, serta pendapatan tambahan dari hasil-hasil hutan. Analisis ini mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dalam praktik agroforestri, seperti pengetahuan lokal tentang ekologi hutan dan pola pertanian yang ramah lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan sistem agroforestri tradisional dapat mendukung tujuan keberlanjutan global sambil mempromosikan kesejahteraan komunitas lokal di Indonesia. Penerapan sistem agroforestri tradisional di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung tujuan keberlanjutan global dan mempromosikan kesejahteraan komunitas lokal. Secara keseluruhan, penerapan agroforestri tradisional tidak hanya mendukung keberlanjutan global melalui pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal dengan cara yang berkelanjutan secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan dan promosi sistem agroforestri tradisional menjadi strategi yang penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Katakunci : Pertanian, Hutan, tradisional

KONTRIBUSI PEREMPUAN TERHADAP KEBERLANJUTAN HUTAN DAN EKONOMI LOKAL

Moh Dwi Ferrinata, Victaura Chrisendy, Sukimin

Fakultas Hukum Universitas Semarang
victaurachrisendy@gmail.com

Abstract

This study aims to examine women's contribution to forest sustainability and the local economy using normative research methods. The main focus is on the important role played by women in sustainable forest management practices and the economic utilization of natural resources. The study analyzes women's various contributions in biodiversity conservation, ecosystem restoration, and agroforestry practices. In addition, the study also explores women's roles in local economic innovation through the utilization of non-timber forest products, such as herbal products and handicrafts. This analysis provides insights into how women's empowerment in the context of forestry can improve food security, sustainable livelihoods and the well-being of local communities at large. By strengthening women's roles in forestry-related decision-making and empowering them as agents of change, the research offers insights into women's immense potential in achieving sustainable development goals at local and global levels. By strengthening the role of women in forestry-related decision-making and empowering them as agents of change, this research underscores the great potential of women in supporting the achievement of sustainable development goals at the local and global levels. Women's roles in forestry not only enrich perspectives and strategies in natural resource management, but also increase the inclusiveness and sustainability of policies and practices implemented in environmental and social contexts. By improving women's access to education, resources and leadership positions, it is certain that their contributions can be a key driver for innovation and positive transformation in forest and environmental management at large.

Keywords: *Women's Contribution, Forest, Local Economy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi perempuan terhadap keberlanjutan hutan dan ekonomi lokal dengan menggunakan metode penelitian normatif. Fokus utama adalah pada peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam praktik pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis. Studi ini menganalisis berbagai kontribusi perempuan dalam pelestarian keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, dan praktik agroforestri. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran perempuan dalam inovasi ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti produk herbal dan kerajinan tangan. Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dalam konteks kehutanan dapat meningkatkan ketahanan pangan, penghidupan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan komunitas lokal secara luas. Dengan memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kehutanan dan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan, penelitian ini menawarkan pandangan tentang potensi besar perempuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan global. Dengan memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kehutanan dan memberdayakan mereka sebagai agen perubahan, penelitian ini menggarisbawahi potensi besar perempuan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan global. Peran perempuan dalam kehutanan tidak hanya memperkaya perspektif dan strategi dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan inklusivitas serta keberlanjutan kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam konteks lingkungan hidup dan sosial. Dengan meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, sumber daya, dan posisi kepemimpinan, dapat dipastikan bahwa kontribusi mereka dapat menjadi pendorong utama bagi inovasi dan transformasi positif dalam pengelolaan hutan dan lingkungan secara luas.

Katakunci : Kontribusi Perempuan, Hutan, Ekonomi Lokal

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAUT

Lutfi Amaliya , Bararela Sebastian U, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum Universitas Semarang

lutfiamaliya05@gmail.com, sebastianbara1020@gmail.com

Abstract

This research aims to conduct a normative analysis on the integration of local wisdom in marine management policies. The main focus is on how cultural values, traditions, and local knowledge can be integrated in marine resource management policies to improve ecosystem sustainability and strengthen the welfare of coastal communities. The study uses a normative approach to explore existing regulations and policies, as well as related literature that demonstrate the importance of considering local perspectives in marine conservation efforts. The research highlights that traditional practices, such as local knowledge systems on fishing seasons and cultural heritage related to marine resource management, have strategic value in ensuring ecological and economic sustainability in coastal areas. By considering and integrating local wisdom in marine management policies, it is hoped that a more holistic and sustainable strategy can be created to maintain marine ecosystems and improve the welfare of coastal communities in the future. By considering and integrating local wisdom in marine management policies, it is hoped that a more holistic and sustainable strategy can be created to maintain the sustainability of marine ecosystems and improve the welfare of coastal communities in the future. The integration of local wisdom not only enriches understanding of the complex dynamics of marine ecosystems, but also strengthens the active participation of coastal communities in decision-making regarding their natural resources. By engaging traditional knowledge and practices in ocean management, policies can be more responsive to environmental and social changes, while ensuring that the ecological and social interests of coastal communities are protected and sustainably supported.

Keywords: Policy, Local Wisdom, Sea

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif tentang integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan laut. Fokus utama adalah pada bagaimana nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya laut untuk meningkatkan keberlanjutan ekosistem dan memperkuat kesejahteraan komunitas pesisir. Studi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengeksplorasi berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, serta literatur terkait yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perspektif lokal dalam upaya konservasi laut. Penelitian ini menyoroti bahwa praktik-praktik tradisional, seperti sistem pengetahuan lokal tentang musim tangkap ikan dan peninggalan budaya terkait pengelolaan sumber daya laut, memiliki nilai strategis dalam memastikan keberlanjutan ekologis dan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan laut, diharapkan dapat tercipta strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan. Dengan mempertimbangkan dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan laut, diharapkan dapat tercipta strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di masa depan. Integrasi kearifan lokal tidak hanya memperkaya pemahaman tentang dinamika ekosistem laut yang kompleks, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam mereka. Dengan melibatkan pengetahuan dan praktik tradisional dalam pengelolaan laut, kebijakan dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan sosial, sambil memastikan bahwa kepentingan ekologis dan sosial dari komunitas pesisir terlindungi dan didukung secara berkelanjutan.

Katakunci : Kebijakan, Kearifan Lokal, Laut

KEARIFAN LOKAL YANG PROGRESIF DAN RESPONSIF PERFEKTIF

KAJIAN HUKUM PERDATA

Japansen Sinaga, Irene Puteri AS Sinaga, Alum Simbolon

Universitas Pelita Harapan Medan, Universitas Pelita Harapan Jakarta,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

japansen.sinaga@uph.edu, Irene.sinaga@uph.edu, alum.simbolon@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Local wisdom is a way of life and knowledge as well as various life strategies in the form of activities carried out by local communities in responding to various problems in meeting their needs. Every country in the world has its own uniqueness, including Indonesia. The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) itself has various kinds of uniqueness. The uniqueness of Indonesia itself comes from the customs, traditions, and local wisdom that exist in Indonesia. Not just one, each region even has its own local wisdom, because of the diverse cultures and accompanied by the vastness of the Republic of Indonesia. Unfortunately, as time goes by, just like most customs, traditions, and cultures, the local wisdom that exists in various regions is increasingly being eroded by the times. Instead of maintaining the local wisdom that has been passed down from ancestors, many young people replace it with outside views that are not necessarily true or even will only damage existing local wisdom. This research examines progressive and responsive local wisdom from the perspective of civil law through normative research methods. This research aims to identify and understand how local wisdom can be effectively integrated and applied in the existing civil law system. The results show that local wisdom has great potential to enrich and strengthen the civil law system, by providing solutions that are more in line with the needs and values of local communities. The progressive and responsive integration of local wisdom can help create a legal system that is more inclusive, adaptive and relevant to the evolving social dynamics. This research is expected to make a significant contribution to the development of civil law theory and practice in Indonesia.

Keywords: Local Wisdom, Progressive, Responsive, Civil Law

Abstrak

Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. **Kearifan Lokal** Setiap negara di dunia itu memiliki keunikannya tersendiri, termasuk juga negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sendiri memiliki berbagai macam keunikan. Keunikan Indonesia sendiri berasal dari adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Bukan hanya satu, setiap daerah bahkan memiliki kearifan lokalnya masing-masing, karena beragam budaya dan didampangi luasnya NKRI. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, sama seperti kebanyakan adat, tradisi, dan budaya, kearifan lokal yang ada di berbagai daerah semakin banyak yang tergerus zaman. Alih-alih mempertahankan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, banyak anak muda yang menggantinya dengan pandangan-pandangan dari luar yang justru belum tentu ada benarnya atau bahkan hanya akan merusak kearifan lokal yang sudah ada. Penelitian ini mengkaji kearifan lokal yang progresif dan responsif dari perspektif hukum perdata melalui metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dan diaplikasikan secara efektif dalam sistem hukum perdata yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi besar untuk memperkaya dan memperkuat sistem hukum perdata, dengan memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Integrasi kearifan lokal yang progresif dan responsif dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Progresif, Responsif, Hukum Perdata

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA:
DISKURSUS ANTARA ASAS LEGALITAS DAN *LIVING LAW* DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA
HUKUM NASIONAL**

Erwin Syahrudin,¹ Mella Ismelina,² Diana Fitria³

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya¹, Universitas Taruma Nagara²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya³

erwin.syahrudin@dsn.ubharajaya.ac.id¹, mellaismelina@yahoo.com²

diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id³

Abstract

Recognition of customary law is an issue that is often discussed but there is no constructive solution. This is very contradictory considering that the Criminal Code in article 1 paragraph one explains the view of the Criminal Code on the principle of legality. Meanwhile, the next article contradicts, namely customary law which has different philosophical principles. This raises several philosophical problems, sociological problems, juridical problems and cultural problems. This research is expected to explain how the nature of customary law and how the relationship between customary law and national law. The criminal law reform plan that juxtaposes the principle of legality with the recognition of laws that live in the community is not without problems. The limits of criminal offenses are expanded, not only to those written in the law but also according to customary (criminal) law both written and unwritten. The type of research used in this research is normative with a statutory approach, conceptual approach and conceptual approach. The results show that the recognition of customary law in Indonesian national law, as manifested in the Criminal Code and the criminal law reform plan, represents an attempt to accommodate legal diversity in society. However, the inherent contradiction between the principle of legality and the recognition of customary law creates serious challenges in consistency, legal certainty, and justice. To address these issues, a cautious approach is needed in harmonizing national laws with the values and norms of customary law, while maintaining the basic principles of universal law and respect for cultural diversity.

Keywords: *Discourse, Principle of Legality, Living Law*

Abstrak

Pengakuan Hukum adat menjadi isu yang sering dibahas namun tidak ada Solusi konstruktif. Seperti halnya politik hukum KUHP yang mengakui hukum adat dalam pasal 1 ayat 2. Hal ini sangat kontradiktif mengingat KUHP dalam pasal 1 ayat satu menjelaskan pandangan KUHP pada asas legalitas. Sedangkan pada pasal berikutnya bertolak belakang yaitu adalah hukum adat yang mempunyai prinsip filosofi yang berbeda. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan filosofis, permasalahan sosiologis, permasalahan yuridis dan permasalahan budaya. Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan bagaimana hakekat dari hukum adat dan bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum nasional. Rencana pembaruan hukum pidana yang menyandingkan asas legalitas dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat ini bukan tanpa persoalan. Batasan tindak pidana diperluas, tidak saja pada yang tertulis dalam undang-undang tetapi juga menurut hukum (pidana) adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dalam hukum nasional Indonesia, seperti yang termanifestasikan dalam KUHP dan rencana pembaruan hukum pidana, menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi keberagaman hukum di masyarakat. Namun, kontradiksi inherent antara asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum adat menciptakan tantangan serius dalam konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat, sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum yang universal dan menghormati keberagaman budaya.

Katakunci : *Diskursus, Asas Legalitas, Living Law*

INTEGRITAS & EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEKAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Vieta Imelda Cornelis, Siti Marwiyah, Stefanus Budi Juwono, Andik Mannulusi

vieta@unitomo.ac.id

Abstract

The Honorary Board of Election Organizers (DKPP) is an independent state institution mandated to enforce the code of ethics of election organizers. DKPP is one of the election organizers besides KPU and Bawaslu. The integrity and existence of DKPP are key in realizing elections with integrity and justice, as well as analyzing the behavior of election organizers, and evaluating the integrity and existence of DKPP in carrying out its duties and functions. The implementation of elections with integrity cannot be separated from the important role of election organizers who uphold the code of ethics and professionalism. In order to maintain the integrity of election organizers, in the history of the dynamics of elections in Indonesia, the Honorary Board of Election Organizers (DKPP) was formed as an independent institution tasked with upholding the code of ethics of election organizers. This research uses normative juridical research. The results of the study are expected to be able to see and get solutions to the problematic violations of ethical violations of election organizers. DKPP has an important role in maintaining the integrity of election organizers and realizing elections with integrity. The integrity and existence of DKPP needs to be strengthened through improving regulations and increasing transparency in carrying out the process of examining violations of the code of ethics, as well as the aggressiveness of DKPP's authority in taking action against serious violations of the code of ethics and strengthening the supervisory mechanism for DKPP's performance. The enforcement of the ethics of election organizers by DKPP is based on various legal theories, including the theory of the rule of law, the theory of trias politica, theories related to constitutional law, ethical legal theory, and international legal theory. Understanding these legal theories is important to understand the legal basis and framework of DKPP in carrying out its duties and functions.

Keywords: *Honorary Board of Election Organizers (DKPP), Integrity, Existence, Code of Ethics of Election Organizers, Rule of Law*

Abstrak

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga negara independen yang diamanatkan untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP merupakan salah satu penyelenggara Pemilu selain KPU dan Bawaslu. Integritas dan eksistensi DKPP menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, serta menganalisis tingkah laku para penyelenggara pemilu, serta mengevaluasi integritas dan eksistensi DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas tidak terlepas dari peran penting penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme. Dalam rangka menjaga integritas penyelenggara pemilu, maka pada sejarah dinamika pemilu di Indonesia terbentuklah sejarah dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini memakai penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian diharapkan bisa melihat dan mendapatkan solusi akan problematik pelanggaran pelanggaran etika para penyelenggara Pemilu. DKPP memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas. Integritas dan eksistensi DKPP perlu diperkuat melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan transparansi dalam menjalankan proses pemeriksaan pelanggaran kode etik. Serta ketagasan kewenangan DKPP dalam menindak pelanggaran kode etik yang berat. serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja DKPP. Penegakan etika penyelenggara pemilu oleh DKPP didasarkan pada berbagai teori hukum, termasuk teori negara hukum, teori trias politica, teori yang berkaitan dengan hukum tata negara, teori hukum etika, dan teori hukum internasional.

Memahami teori-teori hukum ini penting untuk memahami dasar hukum dan kerangka berpikir DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Katakunci: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ,Integritas, Eksistensi, Kode Etik Penyelenggara Pemilu,Aturan Hukum

**PENGAKUAN TANAH ADAT DALAM DIMENSI HUKUM ADAT DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN
PENDAFTARAN TANAH**

Wahyu Prawesthi, M.Syahrul Borman, Dedi Wardana Nasoetion

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id; m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id;

dedi.wardhana@unitomo.ac.id

Abstract

Customary land is an ancestral heritage and has magical religious power which is still widely maintained in several regions of the Republic of Indonesia. The issue of customary land is an interesting study to discuss. In customary law, customary land is a communal unit that cannot be separated from the scope of the customary law community, the land is often referred to as customary land. Customary land has a great influence on customary law communities in their daily lives, so legal certainty is needed in its implementation. Although the existence of customary land in customary law is recognized in the Basic Agrarian Law (UUPA), namely Law Number 5 of 1960. Especially in the conversion rules contained in Article II paragraph 1, Article VI and Article VII through procedures in the registration of land rights in accordance with the mandate contained in the provisions of Article 19 of the UUPA and the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. However, the emergence of Government Regulation Number 18 of 2021, especially in Land Registration, the recognition of customary land in its existence is problematic, because the existence of Government Regulation Number 18 of 2021, is only based on Law Number 11 of 2020 or the Job Creation Law does not mention the UUPA as a basis of reference. Although the UUPA is not mentioned as the basis for "remembering", the UUPA must still be a reference. This is what causes multiple interpretations in the conception of recognition of customary land that is still controlled by Masyarakat Hukum Adat, especially in the registration of their land rights.

Keywords: *recognition, customary land, customary law*

Abstrak

Tanah adat merupakan tanah warisan leluhur dan mempunyai kekuatan *religius magis* yang sampai saat ini masih banyak dipertahankan di beberapa wilayah Republik Indonesia. Permasalahan tanah adat menjadi suatu kajian yang menarik untuk dibahas. Dalam Hukum adat, tanah adat merupakan satu kesatuan yang bersifat secara komunal yang tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup masyarakat hukum adat, tanah tersebut sering disebut sebagai tanah *ulayat*. Tanah *ulayat* memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun secara eksistensinya keberadaan tanah adat dalam hukum adat ini diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Terutama dalam aturan konversi yang tertuang dalam Pasal II ayat 1, Pasal VI dan Pasal VII melalui tata cara dalam pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan amanah yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 UUPA dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi, munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 khususnya dalam Pendaftaran Tanah, pengakuan tanah adat dalam eksistensinya menjadi problematik, karena keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hanya disandarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja tidak menyebutkan UUPA sebagai dasar rujukan. Meskipun UUPA tidak disebutkan sebagai dasar "mengingat", tetapi UUPA tetap wajib menjadi rujukan. Hal inilah yang menyebabkan multitafsir dalam konsepsi pengakuan tanah adat yang masih dikuasi oleh Masyarakat Hukum Adat, khususnya dalam pendaftaran hak atas tanahnya.

Katakunci : Pengakuan, Tanah Adat, Hukum Adat

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL ALIH KREDIT

Sri Astutik¹, Renda Aranggraeni², Alvin Pratama Choiri³, Lukman Hakim⁴

Fakultas Hukum Univeritas Dr. Soetomo

sri.astutik@unitomo.ac.id; renda.aranggraeni@unitomo.ac.id;

alvinchoiri22@gmail.com; lukman.ega@gmail.com

Abstract

In a sale and purchase agreement, risks will arise if the consumer defaults. One of the risks arises when the credit has not been paid off, transferred to another party. The problem in this study is how to resolve disputes between the parties due to default. The settlement efforts in the event of a dispute due to default use the "troubled consumer handling procedure" system which is divided into eight settlement steps. If there is a problem related to juridical matters, the company specifically requires a legal presence shown by the management. However, in principle, every problem caused by consumers is resolved in a family manner and if it cannot be resolved in a family manner, it can be submitted to the authorized institution or judicial institution. This article is written based on a literature study using primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research show some interesting things that the validity of an agreement that is not fulfilled as binding law then the agreement can be canceled, as contained in the contents of the decision of the panel of judges granting the validity of the agreement between the plaintiff and the defendant on the grounds that the plaintiff has fulfilled his rights and obligations. With regard to the Bank as a legal entity that was not present as a co-defendant in the trial, it is questionable the guarantee and protection of the Bank against the legal act of transferring rights to objects that are still in credit and the demand for delivery of the object of the agreement by the Bank to the Plaintiff in the absence of an obligation that gives birth to achievement as stipulated in Article 1340 of the Civil Code.

Keywords: Credit Transfer; Sale and Purchase; Dispute Resolution; Default

Abstrak

Dalam perjanjian jual beli risiko akan muncul apabila konsumen melakukan wanprestasi. Salah satu risiko muncul ketika kredit belum lunas, dialihkan kepada pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak akibat adanya wanprestasi. Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat wanprestasi menggunakan sistem "prosedur penanganan konsumen bermasalah" yang dibagi menjadi delapan langkah penyelesaian. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan yuridis maka perusahaan secara khusus membutuhkan kehadiran hukum yang ditunjukkan oleh manajemen. Namun pada prinsipnya setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka dapat diserahkan kepada lembaga yang berwenang atau lembaga peradilan. Artikel ini ditulis berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yang menarik bahwa syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi sebagai hukum yang mengikat maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, seperti yang terdapat dalam isi putusan majelis hakim mengabulkan keabsahan perjanjian antara penggugat dengan tergugat dengan alasan penggugat telah memenuhi hak dan kewajibannya. Berkenaan dengan Bank sebagai badan hukum yang tidak hadir sebagai turut tergugat dalam persidangan, maka patut dipertanyakan jaminan dan perlindungan terhadap Bank terhadap perbuatan hukum pengalihan hak atas benda yang masih dalam kredit dan tuntutan penyerahan objek perjanjian oleh Bank kepada Penggugat tanpa adanya perikatan yang melahirkan prestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara.

Katakunci: Alih Kredit; Jual Beli; Penyelesaian Sengketa; Wanprestasi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMAAH HAJI INDONESIA NON VISA HAJI

Sri Astutik¹, Dudik Djaja Sidharta², Subekti³, Nur Handayati⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia; ²Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia; ³Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia;

⁴Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo, Surabaya, Indonesia:

sri.astutik@unitomo.ac.id; dudik.djaja@unitomo.ac.id;

subekti@unitomo.ac.id; nur.handayati@unitomo.ac.id

Abstract

Hajj is an obligatory act of worship for Muslims who are able. Hajj requires a lot of money and currently has to queue for a long time for prospective Regular pilgrims. In order to leave for Hajj quickly, prospective pilgrims can leave by using the Special Hajj and Furoda Hajj quota facilities, which are organized by Special Hajj Organizers (PIHK), at a higher cost. One of the requirements to go on Hajj is to use a legal Hajj visa, namely an Indonesian quota Hajj visa (regular and special Hajj quotas) and a mujamalah Hajj visa (Invitation of the Government of the Kingdom of Saudi Arabia) for Furoda Hajj. Despite the prohibition, there are still many prospective pilgrims who are departed using non-Hajj visas by PIHK, because it is faster to depart. This article analyzes the form of legal protection for Indonesian pilgrims and legal consequences for Indonesian pilgrims who use Non-Hajj Visa. This normative legal research uses a statutory approach, conceptual approach with qualitative juridical analysis. The result of this research is that prospective pilgrims who depart using non-Hajj visas must receive legal protection, because they are also victims. In addition to having to provide compensation, Special Hajj Organizers can also be prosecuted criminally and non-administrative sanctions in the form of revocation of operational licenses. Consequences for pilgrims with non-Hajj visas include: deportation, a fine of a sum of money, a ban on entry to the Holy Land for 10 years and difficulty obtaining legal protection.

Keywords: Law; Hajj; Pilgrims; Non Visa; Protection

Abstrak

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Ibadah haji membutuhkan biaya yang banyak dan saat ini harus antri untuk waktu yang lama bagi calon jamaah haji Reguler. Agar dapat berangkat haji dengan cepat, calon jamaah haji dapat berangkat dengan menggunakan fasilitas kuota Haji Khusus dan Haji Furoda, yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dengan biaya lebih mahal. Salah satu syarat untuk berangkat haji adalah dengan menggunakan visa haji legal, yakni visa haji kuota Indonesia (kuota haji reguler dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (Undang-an Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) untuk Haji Furoda. Meskipun ada larangan, namun masih banyak calon jamaah haji yang diberangkatkan dengan menggunakan visa non haji oleh PIHK, karena lebih cepat berangkat. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji Indonesia dan konsekuensi hukum bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan Visa Non Haji. Penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa calon jamaah haji yang berangkat dengan menggunakan visa non haji harus mendapat perlindungan hukum, karena mereka juga menjadi korban. Kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus selain harus memberikan ganti rugi juga dapat dituntut secara pidana dan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional. Konsekuensi bagi jamaah haji dengan visa non haji antara lain : dapat, dideportasi, denda sejumlah uang, larangan masuk ke Tanah Suci selama 10 tahun dan sulit mendapat perlindungan hukum.

Katakunci : Hukum; Haji; Jamaah; Non Visa ; Perlindungan

PENERAPAN TEORI KONTRAK DALAM SENGKETA JUAL BELI

RUMAH PERUMAHAN

Subekti, Dudik Djaja Sidarta, Nur Handayati, Fita Fitriana Parwahadi, Humairoh

¹subekti@unitomo.ac.id; ²dudik.djaja@unitomo.ac.id; ³nur.handayati@unitomo.ac.id;
⁴vinosangjuara@gmail.com; ⁵sayahumairoh58@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Abstract

This research aims to analyze the application of contract theory in disputes over the sale and purchase of housing which has many disputes, while the demand for landed houses by the community is increasing because it is a primary need. 3 (three) stages in making a contract, namely the pre-contractual stage, the contractual stage and the post-contractual stage, then at the pre-contractual stage there is already good faith, meaning that good faith must have existed between the parties at the time of negotiation. This research is a normative juridical research that uses primary legal materials in the form of laws and regulations related to housing and agreements and secondary legal materials in the form of books, journals related to the research problem. The results showed that at the pre-contractual stage or pre-Sale Purchase Agreement, according to the classical theory of contract law, advertisements and promises contained in brochures that are circulated cannot be held liable, Because these promises are pre-contract promises that are not included in the binding consumer financing contract, but according to modern theory, the promises of the developer as outlined in the brochure / advertisement are binding and the developer is obliged to fulfill these promises because one of the considerations for consumers to buy the landed house is the promises offered by the developer. The application in practice of what theory is used depends very much on the judge who resolves the dispute, whether to use the classical theory or the modern theory of the contract. It is hoped that the judge can provide the fairest possible decision for both parties to the case.

Keywords: Sale and Purchase, Housing, Dispute, Contract Theory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori kontrak dalam sengketa jual beli perumahan yang banyak terjadi sengketa, sementara permintaan rumah tapak oleh masyarakat semakin meningkat karena merupakan kebutuhan primer. 3 (tiga) tahapan dalam pembuatan kontrak, yaitu tahap prakontraktual, tahap kontraktual dan tahap postkontraktual maka pada tahap prakontraktual tersebut sudah ada iktikad baik, artinya iktikad baik harus telah ada diantara para pihak pada saat negosiasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangan yang terkait dengan perumahan dan perjanjian serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap prakontraktual atau pra Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Menurut teori klasik hukum kontrak, iklan maupun janji-janji yang ada di dalam brosur-brosur yang diedarkan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena janji-janji tersebut adalah janji-janji prakontrak yang tidak tercantum dalam pengikatan kontrak pembiayaan konsumen akan tetapi menurut teori modern janji-janji pengembang yang dituangkan dalam brosur/iklan sudah mengikat dan pengembang wajib memenuhi janji-janji itu karena salah satu pertimbangan konsumen membeli rumah tapak tersebut adalah janji-janji yang ditawarkan oleh pengembang. Penerapan dalam praktek teori apa yang digunakan sangat tergantung pada hakim yang menyelesaikan sengketa tersebut, apakah akan menggunakan teori klasik atau teori modern dari kontrak. Diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Kata Kunci : Jual Beli, Perumahan, Sengketa, Teori Kontrak

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG KEBEBASAN BERBICARA DI DUNIA MEDIA SOSIAL MEDIA

Tri Supartini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Trisupartini648@gmail.com

Abstract

Freedom of speech is a fundamental democratic value that must be preserved but exercised responsibly. Transparency, accountability, public education, and stakeholder engagement are critical elements in addressing these legal challenges. This research explores the impact of legal challenges on freedom of speech in social media, including content regulation, censorship, legal threats, privacy, legal variations across jurisdictions, and protection of individual rights. The research question in this study is, in the rapidly evolving world of social media, how do legal challenges affect efforts to uphold freedom of speech, and to what extent is regulation necessary to address issues related to freedom of speech on social media platforms? The research methodology employed in this study is normative legal research using a qualitative approach with a focus on secondary data. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The findings of this study underscore the importance of prudent regulation, transparency, and openness in decision-making as the primary focus in confronting legal challenges. Freedom of speech is a fundamental right that should be preserved while considering broader public interests. It is essential to make a judicious determination of the extent to which regulation is required, with the right regulations capable of safeguarding the public from harmful content without sacrificing individual rights. The challenges of harmonizing and ensuring consistency across jurisdictions in a global context need to be addressed. In all circumstances, freedom of speech should be upheld as a fundamental democratic value.

Keywords: Freedom of Speech, Social Media, Content Regulation, Legal Challenges

Abstrak

Kebebasan berbicara adalah nilai demokratis yang mendasar, dan perlu dijaga, tetapi juga harus dijalankan dengan pertanggung jawaban yang tepat. Transparansi, akuntabilitas, pendidikan masyarakat, dan keterlibatan pihak berkepentingan adalah elemen-elemen penting dalam menjawab tantangan hukum ini. Penelitian ini mengeksplorasi dampak tantangan hukum terhadap kebebasan berbicara di media sosial, termasuk pengaturan konten, sensor, ancaman hukum, privasi, perbedaan hukum antar-yurisdiksi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Rumusan masalah dalam penelitian adalah dalam era media sosial yang berkembang pesat, bagaimana tantangan hukum mempengaruhi upaya mempertahankan kebebasan berbicara, dan sejauh mana perlu adanya regulasi untuk mengatasi isu-isu yang muncul sehubungan dengan kebebasan berbicara di platform-platform media sosial? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada data sekunder. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa regulasi yang bijaksana, keterbukaan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan harus menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan hukum. Kebebasan berbicara adalah hak dasar yang harus dijaga, namun harus sejalan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Perlu diputuskan dengan bijaksana sejauh mana regulasi dibutuhkan, dan regulasi yang tepat dapat melindungi masyarakat dari konten berbahaya tanpa mengorbankan hak individu. Harmonisasi dan konsistensi antar-yurisdiksi adalah tantangan yang perlu diatasi dalam konteks global. Dalam semua hal, kebebasan berbicara harus dijaga sebagai nilai demokratis yang mendasar.

Katakunci: Kebebasan Berbicara, Media Sosial, Regulasi Konten, Tantangan Hukum.



Penerbit:
UNIVERSITAS SEMARANG PRESS

Jl. Soekarno-Hatta, Tlogasari, Semarang 50196
Telp: (024) 6702757, Fax: (024) 6702272
E-mail: usmpress@usm.ac.id
<http://www.usmpress.usm.ac.id>

